

**Strategi Keluarga Petani Ditengah Perubahan Sosial-Politik Pasca
Reformasi**

TESIS

BAYU ASIH YULIANTO

0606018684



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA SOSIOLOGI**

Depok

Juni, 2009

**Strategi Keluarga Petani Ditengah Perubahan Sosial-Politik Pasca
Reformasi**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

BAYU ASIH YULIANTO

0606018684



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA SOSIOLOGI**

Depok

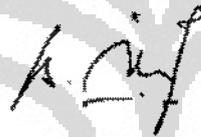
Juni, 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Bayu Asih Yulianto
NPM : 0606018684

Tanda Tangan :



Tanggal : 1 Juni 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Bayu Asih Yulianto
NPM : 0606018684
Program Studi : Sosiologi
Judul Tesis : Strategi Keluarga Petani di Tengah Perubahan Sosial Politik
Pasca Reformasi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

PANITIA PENGUJI

Ketua Sidang : Lugina Setyawati Ph.D

Sekretaris Sidang : Lidya Triana S. Sos, M.Si

Pembimbing : Prof. Dr. Robert M.Z. Lawang

Penguji : Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan MSc. Agr

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 1 Juni 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya hingga thesis ini bisa diselesaikan pada waktunya. Thesis ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains dalam Program Pasca Sarjana Sosiologi, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Tulisan ini bisa menjadi thesis melalui satu proses yang panjang, diskusi yang sangat intens dan sumbangsih yang tidak terkira dari berbagai pihak serta orang-orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Oleh karenanya penulis berkeinginan untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Pembimbing thesis saya yang sangat saya hormati, Prof. Dr. Robert M.Z. Lawang yang telah memperkenalkan ranah kajian sosiologi kepada saya.
2. Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan MSc. Agr, yang telah bersedia menjadi penguji ahli pada sidang thesis saya tanggal 1 April 2009.
3. Lugina Setyawati Ph.D dan Lidya Triana S. Sos, Msi, yang berturut-turut telah bertindak selaku Ketua dan Sekretaris pada sidang thesis saya tanggal 1 April 2009.
4. Staff sekretariat Program Pasca Sarjana Sosiologi FISIP UI, Mas Santoso, Mbak Vidhi, Mbak Rini dan Mas Agus yang telah membantu "banyak" hal dalam perkuliahan maupun penyelesaian tugas akhir saya.
5. Istri saya yang tercinta Sofi Mardiah, yang atas segala pengertiannyalah saya mampu berdiri di titik ini.
6. Anakku, Radithya Bimo Sulessana, yang telah menemani saya di akhir penulisan thesis ini dan di masa depan yang akan kami lalui bersama.
7. Keluarga saya, Bapak, Mamak dan Ratih yang telah begitu tulus memberikan dorongan dan senantiasa mendoakan saya untuk bisa menjalani hidup.
8. Mas Didit dan Mas Dodi, dua kakak yang tidak pernah bosan memperingatkan saya agar segera menyelesaikan thesis yang tertunda. Atas "penugasan dan kepercayaan" beliau berdualah thesis ini akhirnya mewujud.
9. Kamrad-kamrad seperjuangan di Kekal, Timor, Ade, Wawo, Edi, Vodka, Kojek, Dais, Ipung, Gembong, Gajah, Yayah dan Mas Surip yang telah memberikan amanat kepada saya untuk melanjutkan dan menyelesaikan studi.

10. Tim Sosiologi Perdesaan, Nia, AA, dan “rekan-rekan muda” yang selalu mampu melahirkan inspirasi-inspirasi segar pada saya.
11. Rekan-rekan di “Cimandiri”, Bu Engkom, Pak Maman, Pak Jai, Pak Husin, Pak Lurah, Andi Jaya, Pak Hasan, Pak Utay dan lainnya yang telah memberikan banyak pelajaran berharga kepada penulis dan membantu dengan segenap hati sehingga semua informasi yang saya butuhkan untuk thesis ini bisa diperoleh.
12. Rekan-rekan Sosio '06 atas kebersamaannya selama ini, Cahyo, Adi, Onggo, Desi, Nelly, Gigih, Audri, Nina, Yerus, Dini, Syatori, Irsyad, Mughis, Harry, Nur, Aan, Rahmat, Nanang.
13. Berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Sebagai sebuah karya tulis, sangat pasti bahwa thesis ini penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Namun saya tetap berharap semoga thesis ini bisa memiliki arti yang lebih luas..

Bogor, 1 Juni 2009


Bayu A. Yulianto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu Asih Yulianto
NPM : 0606016864
Program Studi : Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Strategi Keluarga Petani di Tengah Perubahan Sosial Politik Pasca Reformasi

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 1 Juni 2009

Yang menyatakan


(Bayu Asih Yulianto)

ABSTRAK

Nama : Bayu A. Yulianto
Program Studi : Sosiologi
Judul : Strategi Keluarga Petani di Tengah Perubahan Sosial Politik Pasca Reformasi

Tesis ini membahas dinamika strategi bertahan hidupnya keluarga-keluarga petani di pedesaan, terutama menyangkut dimensi ekonomi dan politik pada kurun waktu setelah tumbangannya rezim penguasa orde baru. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode etnografi di salah satu desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini antara lain menyatakan bahwa kelompok petani kecil seperti buruh tani dan petani penggarap di pedesaan cenderung mengalami stagnasi kemiskinan, dimana proses eksploitasi yang dilakukan saat ini semakin canggih dan tidak kentara. Pasar melakukan eksploitasi simbolik dengan memanfaatkan jaringan kekerabatan dan sistem kepercayaan yang kuat diantara masyarakat desa. Dalam konteks ini pula, adanya kekuasaan yang semakin terdistribusi diantara warga desa semakin menyuburkan serta semakin menyamarkan praktek-praktek eksploitasi yang tengah berlangsung. Dan oleh karenanya, batasan antara negara, pasar dan masyarakat semakin kabur.

Kata kunci :

Elit, *patron-klien*, dominasi, kekuasaan simbolis, eksploitasi simbolis, negara, pasar

ABSTRACT

Name : Bayu Asih Yulianto
Study Program : Sociology
Title : Peasant Strategy in The Middle of Post Reformation Social-Political Change

This research explored the dynamic of how peasant society survive in rural area linked to political and economic dimension in post reformation period. This reseach located at a village in Bogor district, West Java and used qualitative approach with ethnograph method. The result showed that the group of the peasant like poor peasant or small farmer still in the same circumstances, which is poverty stagnation. The exploitation now tend in the shopisticated and vague form. The market exploitation today seen as symbolic exploitation where the kindship ties and trust system have been used by them. Still in this context, the distributive power between people in the village made exploitation practices become vague and more effective. And because of the distributive power, the limitation between state, market and civil society become borderless.

Keywords : elite, patron-client, domination, symbolic power, symbolic exploitation, state, market

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Permasalahan Penelitian.....	10
1.3. Pertanyaan Penelitian	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Signifikansi Penelitian.....	11
BAB II. TINJAUAN KONSEPTUAL PENELITIAN	12
2.1. Petani dan Kemiskinan Struktural	12
2.1.1. Petani Diantara Desa dan Kota.....	13
2.1.2. Dimensi Ekonomi-Politik Petani	15
2.2. Kelompok Elit di Desa.....	19
2.2.1. Relasi Dominasi Kelompok Elit di Perdesaan	20
2.2.2. Antara Patronase dan Eksploitasi Simbolis Kelompok Elit.....	22
2.3. Tangan-Tangan Negara di Desa.....	23
2.4. Struktur Sosial Masyarakat Perdesaan di Jawa Barat	25
2.4.1. Dari Menak ke Ulama-Jawara.....	25
2.4.2. Dinamika Relasi Patron-Klien di Perdesaan.....	28
2.5. Kerangka Konseptual.....	31
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	34
3.1. Merencanakan Kebutuhan Informasi.....	36
3.2. <i>First Engagement</i>	38
3.4. Analisa: Triangulasi dan Kekuasaan Sang Informan	40

3.5.	Memahami Bahasa Lokal.....	43
3.6.	Memahami Kalender Harian Petani	44
BAB IV. DESA DAN SEJARAH SOSIALNYA		48
4.1.	Akses Jalan dan Problem Angkot.....	48
4.2.	Balai Desa dan Rumah Mantan Kepala Desa.....	53
4.3.	Perumahan dan Permukiman Penduduk	55
4.4.	Proyek Sanitasi dan Air Bersih Desa	57
4.5.	Perkembangan Ekonomi dan Industri Desa	59
4.6.	Sejarah Politik Desa	61
BAB V. STRATEGI PETANI DALAM BERTAHAN HIDUP DITENGAH PERUBAHAN SOSIAL POLITIK KONTEMPORER		66
5.1.	Dinamika Sosial-Politik Kontemporer di Perdesaan.....	68
5.1.1.	Pergeseran Relasi Politik Tingkat Desa.....	69
5.1.2.	Dinamika Relasi Sosial Buruh Tani.....	77
5.1.3.	Dinamika Strategi Kelompok Petani Penggarap.....	89
5.1.4.	Persoalan Kepemilikan Tanah Penguasa dan Elit Desa	96
5.2.	Dinamika Perekonomian Desa Pasca Reformasi.....	105
5.2.1.	Sistem Bukti, Kepercayaan Antar Warga dan Strategi Eksploitasi	107
5.2.2.	Sistem Gada, Dari Hutang ke Perpindahan Kepemilikan Tanah.....	111
5.2.3.	Sistem Borong	115
5.3.	Dinamika Relasi Patronase Orang Desa	116
5.3.1.	Meluruhnya Dominasi Menak di Perdesaan, Stagnasi Kemiskinan	116
5.3.2.	Jawara di Cimandiri	121
5.3.2.	Kampung Orang Pasar	125
5.3.3.	Mengkonstruksi Identitas.....	128
5.3.4.	Ritus dan Kontrol Sosial.....	139
5.4.	Strategi Petani, Jaringan Kerabat dan Pragmatisme Politik	142
5.5.	Perubahan Yang Melanggengkan Eksploitasi dan Kemiskinan	146
5.6.	Kekuasaan Yang Tersebar.....	150
5.7.	Siapa Pasar dan Siapa Negara	153
BAB VII. KESIMPULAN.....		157
Daftar Pustaka		159

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.....	33
Gambar 2. Kalender Harian Buruh Tani.....	46
Gambar 3. Pangkalan Angkot.....	50
Gambar 4. Balai Desa.....	54
Gambar 5. Salah Satu MCK Umum di Cimandiri.....	59
Gambar 6. Lurah Pembangunan (Dalam Lingkaran Putih).....	62
Gambar 7. Buruh Tani Perempuan.....	86
Gambar 8. Seorang Buruh Tani di Depan Rumahnya.....	88
Gambar 9. Peta 'Simbolisasi Orbit Kekuasaan Jali'.....	131
Gambar 10. Dorongan Petani Miskin Untuk Berjaringan.....	146
Gambar 11. Problem Hubungan Pasar dan Petani.....	147



BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Persoalan kemiskinan dapat dilihat melalui dua kaca mata, melalui kaca mata struktural ataupun kultural. Dari kaca mata struktural, kemiskinan dilihat sebagai akibat dari ketidakadilan dalam pembangunan, ketimpangan penguasaan tanah, kebijakan yang *urban bias*, dan lain hal yang disebabkan oleh factor manusianya. Sementara dari kaca mata kultural, kemiskinan dilihat sebagai akibat dari lemahnya sumberdaya manusia serta minimnya sumberdaya alam. Perbedaan mendasar atas dua proposisi itu, adalah apabila yang pertama didasari oleh ketimpangan struktur sosial yang menyebabkan kemiskinan itu muncul, sedangkan yang kedua menekankan persoalan-persoalan yang sifatnya *given*, seperti karakteristik sifat orang-orang dari suatu suku bangsa atau kondisi alam tidak dapat yang didiami oleh satu kelompok masyarakat. Faktanya kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dalam masyarakat perdesaan misalnya, kemiskinan karena struktur yang timpang dan karakteristik sosio-kultural masyarakat satu suku bangsa bisa bercampur (*blended*) menjadi satu kompleksitas persoalan kemiskinan itu sendiri. Oleh karenanya mengurai persoalan kemiskinan menjadi penting untuk mengetahui dimana celah-celah yang bisa dimasuki untuk mengupayakan penyelesaian atas sebagian kecil persoalan kemiskinan itu sendiri.

Dalam satu kasus kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat di perdesaan, kiranya Desa Cimandiri (bukan nama desa yang sebenarnya) bisa dijadikan sebagai satu contoh betapa di desa itu, kemiskinan sendiri berangkat dari problem politik masa lalu yang pernah dilalui oleh desa ini, urusan penguasaan tanah yang didominasi oleh sekelompok elit desa dan persoalan-persoalan lainnya. Di desa ini pernah dilakukan beberapa intervensi sosial untuk mengatasi sebagian kecil dari persoalan kemiskinan itu sendiri oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat, yakni Yayasan Kekal yang bekerja sama dengan satu lembaga pangan PBB. Intervensi yang pernah dilakukan diantaranya :

pertama, pada awal reformasi masyarakat yang paling miskin dari mereka yang dikategorikan miskin diberikan pelayanan beras murah melalui Operasi Pasar Swadaya Masyarakat, dengan bentuk intervensi ini, masyarakat yang miskin bisa mendapatkan beras dengan harga yang cukup murah pada waktu itu (seharga Rp.1000/kg) dengan jatah setiap bulannya mendapatkan 50 kg beras untuk setiap kepala keluarga. Penerima manfaat dari program ini kurang lebih 300 KK. Program ini kemudian dihentikan di awal tahun 2004 karena pemerintah beranggapan mampu melaksanakan program ini sendiri melalui program Raskin atau beras untuk rakyat miskin. Intervensi berikutnya, adalah pembangunan sarana dan prasarana sanitasi dan air bersih serta pembukaan akses jalan di wilayah yang mengalami keterisolasi. Program ini melibatkan masyarakat secara langsung. Sedangkan program berikutnya atau yang terakhir adalah pelatihan kesehatan alami.

Ketiga program yang telah dilakukan tentu saja tidak serta merta mampu mengatasi persoalan kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat desa Cimandiri, namun demikian berangkat dari pemahaman bahwa persoalan kemiskinan adalah persoalan yang sangat kompleks, kiranya, penyelesaian yang sifatnya non struktural hanya bisa dilakukan dengan mengatasi satu persatu persoalan-persoalan yang ada, seperti membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat, membuka aksesibilitas dari dan ke satu kampung, maupun mendirikan sarana yang mampu mengurangi ongkos kesehatan masyarakat. Dari sini sebagian kecil persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh masyarakat mampu diatasi.

Persoalan kemiskinan di perdesaan sendiri dalam kacamata Chambers (1987) dilihat sebagai satu perangkat kota. Satu situasi dimana kota dengan berbagai macam fasilitas serta tawaran-tawarannya memenjarakan orang-orang ataupun kelompok-kelompok masyarakat untuk enggan melihat realitas sosial yang ada di perdesaan. Kelompok-kelompok yang oleh Chambers dianggap penting dan sesungguhnya memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk bisa mengubah cara pandang kita mengenai kemiskinan di perdesaan itu antara lain adalah para cendekiawan yang bermarkas di kampus, para birokrat, para sukarelawan dan

penggiat organisasi serta para wartawan. Dengan adanya perangkap kota inilah orang-orang kemudian enggan untuk berlama-lama di desa, dan walaupun mereka pergi ke desa, tak ubahnya seperti wisatawan pembangunan. Dengan segala macam prasangka “orang luar” terhadap orang desa, seringkali kemiskinan di perdesaan tidak benar-benar kelihatan. Dan para perencana program pengentasan kemiskinanpun seringkali gagal mengidentifikasi dengan benar realitas kemiskinan yang sesungguhnya tengah berlangsung.

Sejalan dengan Chambers, Anthlov (2002), dalam salah satu studinya di Jawa Barat mengungkapkan betapa dalam periode kekuasaan orde baru selama beberapa kurun waktu, Negara terlalu campur tangan dalam mengurus persoalan sehari-hari masyarakat desa, sehingga dengannya, masyarakat desa kehilangan bentuk-bentuk kemandirian yang sebelumnya pernah mereka miliki dan andalkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di masyarakat. Negara yang membangun system patronase kepemimpinan sampai di tingkat desa menjadi begitu hegemonik. Jika di level nasional pembangunan direncanakan dan dilaksanakan oleh segelintir orang yang oleh rezim penguasa orde baru dianggap sebagai kelompok potensial pendorong perubahan. Alih-alih menjalankan agenda pembangunan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, cara ini justru digunakan oleh elit-elit nasional untuk bersama-sama merampok Negara dengan membangun patronase sampai ke tingkat desa. Di desa pun demikian, hanya kelompok-kelompok keluarga elit desa saja yang dalam perjalanannya mendapatkan banyak keuntungan dari program pembangunan orde baru. Kelompok orang miskin di perdesaan pada dasarnya tidak tersentuh dan tetap saja menjadi kelompok yang termarginalkan. Dengan kata lain, ada proses peniruan atas apa yang dilakukan oleh elit di level nasional oleh elit desa untuk mempertahankan segala macam *priviledge* yang mereka dapatkan karena berada pada lingkaran kekuasaan. Para kapitalis desa pun demikian, ketimbang menginvestasikan modal untuk satu usaha produktif, mereka lebih memilih untuk menjaga hubungan dan jaringan sosial dengan kelompok penguasa agar bisa memperoleh remah-remah anggaran pembangunan. Contoh nyata dari penjelasan ini adalah pada saat dilakukannya program Revolusi Hijau di Indonesia, dimana hanya mereka-mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan saja yang mampu mendapatkan berbagai

macam fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sebagai manifestasi dari pembangunan nasional seperti akses terhadap kredit pertanian, bibit tanaman, pupuk serta saluran irigasi.

Dari perspektif yang cukup radikal, kiranya potret perlawanan petani di perdesaan selama beberapa kurun waktu digambarkan oleh Scott (2000) sebagai satu bentuk perlawanan sehari-hari terhadap situasi sosial yang mereka alami. Struktur patronase yang sangat ketat sehingga kelompok petani miskin di perdesaan Malaysia mengalami ketertindasan selama beberapa kurun waktu, bercampur dengan ketiadaan keberpihakan pemerintah terhadap mereka menciptakan situasi yang cukup unik. Dalam kasus ini tidak muncul kepemimpinan baru yang mampu mengkonsolidasikan perlawanan massif kaum tani kepada struktur yang menghegemoni mereka, hal ini tentu saja berbeda dengan di Indonesia pada masa 40-65 ketika Partai Komunis Indonesia mampu menjadi lokomotif gerakan perlawanan kaum tani. Namun demikian, kesimpulan yang diperoleh Scott bukanlah bahwa para petani miskin itu tidak melawan ataupun *nrimo* saja dengan situasi ketimpangan itu, justru perlawanan yang mereka berikan adalah perlawanan khas kaum tani, yakni perlawanan diam-diam. Dimana operasi-operasi yang kemudian mereka lakukan adalah tidak membuka *front* perlawanan secara massif melainkan dengan hal-hal sepele namun bagi para petani kecil dimaknai sebagai satu bentuk perlawanan terhadap penindasan.

Selain itu, Migdal (Migdal 1974) mengungkapkan betapa problem utama yang ada di perdesaan adalah ketegangan dan konflik yang muncul akibat adanya kontak budaya antara kebudayaan kota dan kebudayaan desa. Pada awalnya, masyarakat desa menerima gagasan perubahan versi kota dikarenakan adanya tawaran kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Mereka akan terbebas dari individu dan ikatan sosial lama yang selama ini membelenggu kebebasan mereka. Kemudian adanya harapan teratasinya kemiskinan yang selama ini mendera kehidupan mereka melalui pengenalan system pasar yang lebih modern. Namun faktanya tidak demikian, dalam kasus Migdal, para petani kecil di Amerika Latin tetap saja berada dalam situasi yang terhegemoni oleh kelompok penguasa lokal dan negara. Sejalan dengan itu Pearse (1975) dalam(Sutomo 1997) mengungkapkan bahwa

pada dasarnya masyarakat petani di perdesaan berada dalam situasi ketidakberdayaan yang terinstitusionalisasikan. Inilah yang dinamakan sebagai kemiskinan struktural. Kemiskinan yang membawa masyarakat petani ke dalam situasi ketegangan hubungan antara desa-kota.

Tidak bisa dipungkiri bahwa penelitian ini sendiri muncul sebagai satu gagasan dikarenakan dua hal mendasar, yang *pertama*, dari sisi peneliti, penelitian ini menyangkut aktivitas yang telah lama digeluti, yakni melakukan pendampingan atas satu komunitas masyarakat dan pemerintah desa di Bogor, Jawa Barat. Telah sekian lama saya bersama rekan-rekan melakukan program pendampingan, namun belum pernah dibuat satu dokumentasi yang cukup baik mengenai dinamika sosial-ekonomi-politik di desa tersebut. Kemudian aktivitas saya di dalam satu kelompok studi yang fokus terhadap kajian-kajian mengenai sosiologi perdesaan, memungkinkan saya untuk memperluas cakrawala akademis dalam melihat persoalan di perdesaan itu sendiri. Sementara yang *kedua*, dari sisi desa tempat penelitian ini dilakukan, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya kenapa bagi saya sendiri dan dalam konteks penelitian ini, desa ini menjadi begitu penting. Ketika pada tahun 1999, krisis moneter tengah terjadi di Indonesia, desa ini masih dalam situasi yang cukup memprihatinkan, penduduknya sebagian besar adalah kelompok masyarakat miskin yang terkena imbas langsung dari runtuhnya industry sector riil di perkotaan. Oleh karenanya dilakukan satu inisiatif dari satu lembaga pangan dunia untuk memberikan bantuan beras murah kepada warga di desa ini. Kemudian, beberapa tahun berikutnya, karena minimnya sarana sanitasi dan air bersih di desa ini, maka diberikanlah bantuan berupa sarana air bersih dan sanitasi bagi warga yang dananya berasal dari uang yang pernah mereka belanjakan untuk membeli beras murah beberapa tahun lalu. Selanjutnya desa ini semakin berkembang dan pada beberapa kesempatan desa ini mendapat pujian dari pihak kecamatan serta menjadi salah satu desa contoh di Kabupaten Bogor karena kemampuannya menjalin kerjasama dengan pihak luar desa tanpa terus mengandalkan bantuan dari pemerintah daerah. Yang tidak kalah penting adalah dijadikannya desa ini sebagai salah satu *site* belajar mahasiswa dan dosen sosiologi FISIP UI. Demikian ketertarikan untuk melakukan satu studi lapang di desa ini kemudian muncul pada diri saya. Penjelasan ini sekaligus menjawab

tantangan-tantangan intelektual yang seringkali dihadapkan kepada saya ketika muncul pertanyaan apa pentingnya desa ini dalam ranah pemikiran sosiologis, atau siapa yang akan tertarik dengan isu mengenai satu desa kecil di Bogor yang hampir bisa dikatakan tidak memiliki gejolak politik atau persoalan-persoalan sosial yang penting untuk dibicarakan.

Desa tempat penelitian saya memang bukan seperti desa-desa lain yang kerap dijadikan lokus-lokus studi lapang oleh para peneliti. Di desa ini memang tidak ada satu gerakan sosial masyarakat perdesaan yang menuntut pembagian atau redistribusi asset tanah kepada kaum miskin. Di desa ini juga tidak pernah terjadi proses *amok* yang oleh para peneliti dianggap model kepanikan khas orang desa. Pun di sini juga bukan desa yang secara sistem pemerintahan atau yang tata laksana pemerintahannya berjalan dengan baik, sehingga patut dijadikan sebagai *best practice* untuk direplikasi di desa-desa yang lain. Oleh karenanya, saya lebih senang mengutip apa yang dikatakan oleh Zigmunt Bauman, seorang sosiolog kontemporer, bahwa berpikir sosiologis adalah berpikir yang membebaskan, mencoba memahami dunia yang senantiasa terbuka bagi segala macam pemahaman dari sudut pandang yang lain. (Bauman and Malay 2001)

*"... we may conclude that thinking sociologically is a way of understanding the human world that also opens up the possibility of thinking about the same world in different ways."*¹

Saat ini Desa Cimandiri telah banyak berubah, makin banyak orang kota yang pindah dan tinggal disini, baik yang hanya ingin tinggal dan menetap, maupun mereka-mereka yang memiliki tujuan-tujuan ekonomi ataupun politik di desa ini. Gelombang demokratisasi yang melanda Indonesia pasca reformasi 98, tentu saja membawa angin perubahan yang cukup kuat di wilayah perdesaan. Tidak terkecuali di Cimandiri, menjelang pemilu 1999, banyak partai yang bermunculan, alhasil seperti apa yang terjadi di level nasional, di desa ini pemilihan umum dimenangkan oleh PDI Perjuangan, partai yang menjadi simbolisasi perjuangan rakyat miskin dan tertindasan. Pada pemilu 2004, situasi kembali berubah, meski semakin banyak partai yang berdiri di desa ini, pilihan masyarakat bergeser

¹ Bauman & Malay dalam *Thinking Sociologically*, Blackwell Publishing, 2001, (hal 5)

kepada partai baru yang sebelumnya tidak diperhitungkan sama sekali, yakni Partai Demokrat. Partai yang pada perkembangannya menjadi partai pemerintah pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menjamurnya partai-partai di Cimandiri, seperti halnya di desa-desa lain tidak senantiasa sejalan dengan harapan masyarakat akan perubahan taraf hidup mereka. Faktanya kelompok miskin di perdesaan tetap saja belum secara signifikan beranjak dari situasi kemiskinan itu. Meski beberapa orang tokoh masyarakat menjabat sebagai perwakilan partai di tingkat desa, tetapi ternyata partai tidak bisa dijadikan sandaran orang untuk mensejahterakan diri.

Pada awal riset saya ini dilakukan, tema besar dari penelitian ini adalah hubungan antara petani dan negara. Ada dorongan kuat dari diri saya untuk mengetahui secara pasti bagaimana pola hubungan antara petani dan negara yang saat ini berlangsung di tengah arus kuat demokratisasi dan desentralisasi. Namun di tengah perjalanan, pembahasan ini terkesan terlalu luas bagi saya, terdapat kesulitan-kesulitan bagi saya untuk bisa mengidentifikasi dengan pasti apa yang dimaksud dengan negara itu saat ini. Dalam perspektif Gramscian, negara begitu jelas dilihat sebagai sosok kuasa yang memiliki ciri-ciri tertentu, diantaranya menerapkan kekuasaan yang sifatnya koersif bagi rakyatnya melalui aparat koersif mereka seperti polisi ataupun militer yang dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dan masyarakat sipil dalam bentuk lembaga pendidikan serta lembaga hukum. (Bocock 2007) Disinilah kesulitan terbesar saya ketika harus menjelaskan siapa Negara itu. Meski dengan mudah orang bisa mengatakan bahwa pemerintah desa atau lembaga-lembaga formal yang ada di desa saat ini merupakan representasi dari negara, namun faktanya, tidak dapat lagi kita temukan aparat represif seperti halnya pada masa orde baru (lihat penjelasan Anthlov mengenai militer di perdesaan). Teramat sulit untuk secara deterministik menetapkan pihak atau institusi di desa sebagai representasi daripada negara. Dari sisi kekuasaanpun demikian, kekuasaan tidak lagi menjadi hegemoni negara melalui pemerintah desa ataupun partai penguasa. Kekuasaan sendiri seperti terbagi-bagi diantara orang-orang desa, ada yang cukup kuat, sedang ataupun sangat terbatas. Praktis tidak ada lagi kekuasaan yang paling dominan di sana. Hal itu tidak seperti kemiskinan,

karena meski kekuasaan itu tidak lagi hegemonik, persoalan kemiskinan tetap saja ada dan seolah terpisah dari fenomena kekuasaan yang terdistribusi itu.

Beranjak dari situasi itu, tema penelitian saya kemudian diperkecil hanya pada strategi-strategi orang miskin di perdesaan yang sebagian besar adalah buruh tani dalam menghadapi perubahan sosial-politik yang terjadi. Pada sisi ini, tentu saja pembahasan menjadi semakin spesifik karena, konsentrasi terbesar saya hanyalah pada strategi-strategi masyarakat petani untuk bertahan hidup, apakah terjadi perubahan yang mendasar serta bagaimana kaitannya dengan proses liberalisasi politik yang menjalar sampai ke depan pintu rumah orang desa.

Hal lain yang cukup mempengaruhi saya adalah satu studi etnografi di perdesaan Jawa Barat yang dilakukan oleh Hans Anthlov. Dalam studinya itu, banyak informasi mengenai dinamika sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat perdesaan sunda yang diangkat. Dalam studinya, Anthlov mengambil konteks patronase kepemimpinan lokal perdesaan ketika Indonesia masih dalam cengkraman rezim orde baru. Negara yang menjadi basis perhatian Anthlov menjadi begitu hegemonik dan menguasai hampir seluruh sendi-sendi kehidupan rakyat. Dengan menggunakan judul "Negara dalam Desa", Anthlov menentangakan kekuasaan absolut orde baru di tengah massa rakyat. Elit-elit desa lama yang merupakan keturunan dari para pendiri desa, pada perkembangannya selama orde baru berkuasa, dikooptasi oleh negara sehingga mereka dijadikan kaki tangan langsung dari kekuasaan korporatisme birokratis orde baru. Negara kemudian membangun satu struktur sosial-politik sampai pada level terendah di masyarakat. Substansi inilah yang pada prosesnya membawa saya pada pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai konteks kekinian dari penjelasan soal negara versi Anthlov.²

Dengan kata lain, dari sisi per-temaan thesis ini, saya dipengaruhi oleh satu keadaan dimana terjadi dialog antara realitas yang saya temui di lapangan, dengan kegairahan intelektual seorang peneliti asing terhadap keberadaan Negara di desa pada penghujung abad ke-20. Dari kondisi itulah penelitian ini kemudian

² Hans Anthlov, 2002, Negara Dalam Desa; Patronase Kepemimpinan Lokal

dilakukan secara perlahan dan penuh dengan kejutan-kejutan kecil yang tidak saya kira sebelumnya.

Pada saat saya terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang saya anggap penting untuk melengkapi serta menstrukturkan identifikasi saya atas relasi antara petani dengan negara di perdesaan, dua fenomena penting yang saya catat dalam perjalanannya. Meski berada di luar konteks penelitian saya, namun dua fenomena ini terus membayangi benak saya sebagai seorang peneliti ketika saya mulai mendekati realitas sosial yang ada. Keduanya adalah, krisis keuangan global yang tengah melanda dunia serta proses pilkada Kabupaten Bogor yang tengah menunggu putaran kedua. Untuk yang pertama, pada saat itu baru ramai dibicarakan dampak krisis terhadap pasar keuangan global, runtuhnya beberapa lembaga keuangan di Amerika dan Eropa, turunnya harga minyak mentah di dunia pada kisaran 50-60 US\$ serta pelemahan rupiah terhadap dolar yang berada di kisaran Rp. 10.000 – 12.000. Catatan Jan Breman dan Gunawan Wiradi mengenai krismon 98 di perdesaan Jawa menjadi pengingat bagi saya bahwa desa menjadi benteng terakhir dari orang-orang kota yang kehilangan penghidupannya.³ Profesi buruh tani memiliki kemungkinan semakin menggelembung jumlahnya karena pabrik-pabrik di kota banyak yang tutup. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat di perdesaan. Sedangkan yang *kedua* adalah, persoalan pilkada Kab. Bogor yang tidak rampung di putaran pertama. Dalam perjalanannya isu ini cukup menjadi wacana di kalangan warga, baik orang biasa maupun elit di desa ini. Dan dalam beberapa kesempatan, diskusi maupun wawancara yang saya lakukan pada prosesnya seringkali mengarah pada konstelasi menjelang pilkada putaran kedua. Bahkan saya kira pengaruh dari pilkada dalam pelaksanaan program-program di desa cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya isu-isu ataupun anggapan-anggapan di masyarakat

³ Jan Breman dan Gunawan Wiradi, *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa; Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad Ke-20*. Dalam catatan ini mereka mengunjungi dua desa di wilayah pesisir utara Jawa yang telah lama mereka kenal. Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia disusul ambruknya rezim otoritarian orde baru, dalam catatan mereka menimbulkan persoalan-persoalan ekonomi-politik yang cukup penting di kalangan masyarakat desa. Bagi kelompok masyarakat miskin, krismon berarti semakin sulitnya kehidupan mereka, sementara bagi kelompok orang kaya yang konon mengalami kerugian besar-besaran akibat krismon, dalam kenyataannya di desa tidak demikian, orang kaya memiliki banyak strategi alternative untuk tetap bertahan dalam gaya hidup mereka.

bahwa pilkada telah menyerap dana yang begitu besar sehingga rencana pembangunan UPTD Puskesmas di desa agak terhambat, serta tunjangan bagi para guru SD di Cimandiri dibagikan tidak tepat waktu.

1.2. Permasalahan Penelitian

Dari beberapa hasil penelitian mengenai dinamika sosial masyarakat perdesaan serta situasi sosial yang terjadi di lokasi penelitian, kiranya, bisa saya simpulkan bahwa kelompok bawah di perdesaan mengalami satu proses marginalisasi oleh kelompok elitnya. Kelompok elit perdesaan Jawa selama beberapa waktu mendominasi penguasaan asset ekonomi, jaringan politik serta hubungan dengan kelompok masyarakat lainnya. Sementara itu ketika terjadi perubahan situasi politik secara mendasar di tingkat nasional, desa pun mengalami gelombang perubahan besar-besaran selama beberapa kurun waktu, tentu saja ini mempengaruhi dinamika sosial-ekonomi perdesaan itu sendiri. Sedangkan kelompok masyarakat miskin meski secara politik mampu meningkatkan partisipasi politik mereka, namun pada kenyataannya mereka tidak juga mampu melepaskan diri dari situasi kemiskinan yang telah mengikat mereka selama beberapa kurun waktu, baik sebelum perubahan itu berlangsung, maupun setelah perubahan itu terjadi. Oleh karenanya, pokok permasalahan yang akan coba dijelaskan dalam penelitian ini adalah, bagaimana strategi kelompok masyarakat miskin untuk bertahan hidup dalam menghadapi perubahan sosial-politik masa kini yang tengah berlangsung di wilayah perdesaan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana strategi petani kecil dan buruh tani dalam mempertahankan hidup mereka pada saat perubahan sosial-politik kontemporer berlangsung di wilayah perdesaan ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini antara lain :

1. Menjelaskan bagaimana situasi kemiskinan di perdesaan, serta relasi sosial antara elit dan non elit sampai taraf tertentu mengalami situasi yang stagnan meski perubahan politik pasca reformasi telah berlangsung selama beberapa tahun.

2. Mengidentifikasi upaya-upaya, strategi-strategi serta kreativitas kelompok masyarakat miskin di perdesaan dalam mereposisi hubungan mereka dengan kelompok elit desa serta aparatus Negara.

1.5. Signifikansi Penelitian

Pada bagian latar belakang penelitian telah disinggung sedikit bagaimana penelitian ini memiliki keterkaitan yang sangat erat bagi diri peneliti. Oleh karenanya, yang paling penting bagi peneliti, penelitian ini memiliki signifikansi teknis dalam kerangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat perdesaan. Bagi peneliti yang aktif dalam kegiatan pendampingan masyarakat desa, kiranya penelitian ini bisa menjadi satu dasar pijakan untuk bisa memahami kompleksitas hubungan antarwarga desa. Sehingga dalam aktivitas advokasi masyarakat desa ke depannya, kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa dimaknai lebih baik dan bijaksana lagi.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki signifikansi teoritis, seperti adanya kebutuhan bagi sosiologi perdesaan di UI untuk bisa memproduksi ilmu pengetahuan dengan mengangkat pengalaman-pengalaman pemberdayaan masyarakat. Selain itu sebagai satu kajian sosial-politik, penelitian ini bisa meneruskan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang juga berbicara mengenai dinamika sosial politik perdesaan.

BAB II. TINJAUAN KONSEPTUAL PENELITIAN

Dari penjelasan beberapa peneliti terhadap perkembangan dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat perdesaan selama beberapa waktu, maka bisa kita tarik benang merah bahwa perilaku sekelompok elit masyarakat perdesaan terutama di Jawa senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan situasi suprastruktur desa. Mereka mampu dengan leluasa memasukkan kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompoknya ke dalam agenda-agenda besar perubahan di perdesaan. Lantas jika kelompok elit mampu mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai macam strategi ketika berhadapan dengan kekuatan supra desa, *bagaimana dengan kelompok masyarakat miskin atau non elitnya yang sebagian besar adalah buruh tani dan petani kecil? Adakah strategi yang dilakukan oleh mereka ketika proses perubahan itu berlangsung, terutama menyangkut hubungan mereka dengan kelompok elit desa serta representasi Negara di desa?* Untuk menguraikan hal itu, ada baiknya, saya coba untuk menjelaskan beberapa pandangan para sarjana terkait dengan konsep-konsep mengenai petani, elit desa serta negara berikut konsepsi teoritis mengenai hubungan diantara ketiganya.

2.1. Petani dan Kemiskinan Struktural

Kaum tani dalam perkembangannya, senantiasa mengalami posisi yang termarginalkan karena struktur sosial di masyarakat perdesaan yang di dominasi oleh para elit desa – penguasa dan pemilik tanah besar – yang senantiasa mampu memanfaatkan entitas negara sebagai sarana untuk melanggengkan bentuk-bentuk eksploitasi mereka kepada kaum tani. Dalam sejarahnya di masyarakat, petani adalah mereka-mereka yang sekian lama patuh pada kelas sosial lainnya, relasi seperti inilah yang kemudian mendorong petani untuk membatasi partisipasi mereka di desa.⁴ Hal ini didorong oleh kebijakan pertanahan negara sejak masa colonial sampai saat ini yang tidak pro terhadap kaum tani miskin.(Mustain 2007)⁵ Petani disini adalah yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *peasant* dan bukan *farmer*. Petani dalam artian mereka yang hidup sederhana sampai yang

⁴ Joel S. Migdal (1974) dalam *Peasant, Politics and Revolution*, hal-33

⁵ Mustain, *Petani Vs Negara*, 2007

menuju miskin, hidup dari bercocok tanam, dengan kepemilikan lahan yang sempit sampai tidak memiliki lahan sama sekali, serta tidak mendapatkan pendidikan yang memadai.

2.1.1. Petani Diantara Desa dan Kota

Dalam penjelasan klasiknya mengenai kaum tani atau petani, Migdal (1974) menjelaskan kapan, mengapa dan bagaimana kaum tani di Asia dan Amerika Latin mampu menjalin ikatan dengan dunia baru yang batasan-batasannya cukup jauh jika dibandingkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Penekanan penting yang digariskan oleh Migdal adalah kegagalan penjelasan mengenai kontak budaya atau *cultural contact* yang dialami oleh kaum tani. Kontak budaya sendiri diartikan oleh Migdal (1974) mencuplik (Patai 1947) dan (Foster, 1962) sebagai satu bentuk persinggungan antara kebudayaan masyarakat modern dengan budaya lama yang dimiliki oleh satu masyarakat. Dalam kaitan ini maka, kontak budaya yang terjadi dimaksudkan sebagai pertemuan antara budaya masyarakat kota yang cenderung bergaya modern dengan budaya orang desa yang lebih banyak didominasi oleh kaum tani. Pertemuan antara dua pola budaya ini kemudian memunculkan pola baru dalam struktur masyarakat perdesaan. Pola-pola baru itu diterima oleh masyarakat perdesaan, dikarenakan beberapa hal, yaitu : (1) keuntungan yang diakibatkan menerima pola baru itu jauh lebih besar ketimbang memakai pola-pola lama, kemudian (2) adanya kebebasan bagi individu dari belenggu-belenggu institusi yang menyulitkan mereka untuk memilih satu keputusan, dan yang terakhir adalah individu-individu yang memilih untuk menerapkan pola baru itu adalah individu yang rasional serta yang tidak mau menerima nilai-nilai modern bisa dikatakan sebagai individu yang salah atau tidak rasional.⁶ Foster mengingatkan bahwa semakin terbuka suatu masyarakat tradisional atas budaya modern, maka semakin besar perubahan itu bisa terjadi.⁷ Penjelasan lainnya, juga diberikan secara lebih lengkap oleh Daniel Lerner (1958) yang menjelaskan bahwa kontak adalah satu keharusan ketika perubahan itu diinginkan. Lerner, kemudian mengidentifikasi individu yang

⁶ Raphael Patai, *On Cultural Contact and Its Working in Modern Palestine* (1947) dalam Migdal (1974)

⁷ (Foster 1962) dalam Migdal (1974)

mau melakukan perubahan sebagai *mobile personality*, individu yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek baru yang ada di lingkungan mereka. Sehingga salah satu indikator dari kemajuan suatu masyarakat adalah kemampuan masyarakat itu untuk memproduksi individu-individu dengan *mobile personality*. Sementara dalam proses perubahan itu, media, teknologi, proses urbanisasi dan organisasi-organisasi menjadi alat yang sangat penting.

Selain menggambarkan perihal perubahan yang diakibatkan karena adanya kontak budaya, Migdal juga mengurai beberapa hal yang dia anggap sebagai kegagalan kontak budaya dalam mendorong berlangsungnya perubahan di pedesaan. Penjelasan mengenai para petani di Peru dan India mengetengahkan sulitnya kontak budaya mendorong masyarakat untuk meninggalkan pola-pola lama dan segera berpindah ke pola-pola budaya baru (Lihat Stein 1957, Gusfield, 1967 dan Whitaker 1967 dalam Migdal, 1974)⁸. Migdal menjelaskan bahwa, pada akhirnya, kontak budaya sebagai satu penjelasan perubahan sosial dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern mengalami kegagalan. Kegagalan ini dikarenakan, kontak budaya pada akhirnya sulit untuk memperhitungkan perbedaan antara konsep mobilisasi sosial dan modernisasi. Masyarakat pedesaan tidak senantiasa meninggalkan budaya-budaya lamanya setelah melakukan hubungan dengan budaya baru dipertanian. Salah satu contohnya adalah masih kuatnya gerakan mileniarisme di kalangan kaum tani pedesaan.

Selain persoalan kontak budaya, Migdal juga menjelaskan mengenai institusi sosial di kalangan masyarakat petani. Institusi sosial adalah satu factor yang dianggap cukup tepat untuk melihat proses perubahan sosial di pedesaan. Dalam rangkaian sejarahnya, institusi sosial di pedesaan telah menepatkan diri sebagai pembatas dalam interaksi dan kontak antara masyarakat petani di pedesaan dengan dunia luarnya. Meski demikian, Migdal sepakat dengan apa

⁸ Migdal, 1974 hal-10

yang dikemukakan oleh (Wolf 1966) bahwa kaum tani perdesaan tetaplah merupakan pihak yang terkungkung oleh struktur sosialnya.⁹

Meski dalam konteks Indonesia saat ini kita telah lepas dari bentuk-bentuk sentralisasi kekuasaan dan masuk ke dalam era desentralisasi, namun perlu dilihat kembali, apakah situasi keterkungkungan ini telah tergantikan dengan situasi lain yang lebih baik, atau justru sebaliknya, keterkungkungan itu tetap bertahan karena kemampuan kelompok penguasa untuk berkompromi dengan proses demokratisasi itu sendiri.

2.1.2. Dimensi Ekonomi-Politik Petani

Sejalan dengan gagasan Geertz mengenai petani,¹⁰ Migdal kemudian menjelaskan bahwa petani yang berada dalam kekuasaan tuan tanah yang berkolaborasi dengan negara, mengalami penderitaan dalam situasi sosial yang eksploitatif sehingga mereka berupaya untuk menghindari bentuk-bentuk partisipasi dalam lingkungan masyarakatnya (bandingkan dengan bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari versi Scottian). Secara ekonomi mereka cukup subsisten, mereka memproduksi makanan dan kebutuhan sehari-hari mereka, hanya membeli dari luar seperti minyak tanah dan garam. Situasi saat ini mungkin tidak seekstrim penjelasan Migdal, namun pola hidup kalangan petani miskin bisa jadi dalam situasi yang sama meski ada beberapa perkembangan dalam konsumsi atau relasi mereka dengan dunia luar. Tentunya, hal ini mesti dilihat kembali dalam realitas yang tengah berlangsung saat ini, dimana perubahan besar-besaran dalam sistem politik Indonesia, serta pengaruh desa yang berada tidak jauh dari kota memberikan dampak langsung bagi petani miskin di perdesaan.

⁹ Eric R. Wolf dalam *ibid* hal 15

¹⁰ Geertz (1963) menjelaskan kehidupan petani ke dalam tiga dimensi pokok, yaitu ekonomi-politik dan budaya. Secara ekonomi petani agak berkait dan terlibat dengan relasi uang dan pasar. Sementara secara politik, petani adalah mereka yang tersubordinasi dalam hirarki sosial dan relative dikuasai oleh Negara. Kondisi politik seperti ini kemudian menjadikan kaum tani sebagai pihak yang seringkali mendapat perlakuan semena-mena dari bekerjanya kekuasaan negara. Sedangkan secara budaya, petani adalah bagian dari masyarakat yang memiliki tradisi menulis, kritis dan memiliki keyakinan agama serta pemikiran filosofisnya sendiri. Selain itu tanah juga menjadi dimensi sosial tersendiri bagi kalangan petani.

Selanjutnya Migdal menjelaskan bahwa para petani miskin tidak seperti petani kaya yang mengabaikan orientasi ke dalam pada upayanya meraih pengakuan serta kesuksesan dalam sistem yang lebih luas, kelompok petani miskin di perdesaan memiliki respon yang berbeda atas pengaruh-pengaruh ataupun kontak-kontak dari luar. Para petani miskin oleh Migdal dikatakan, memiliki memiliki dua perangkat sebagai alasan untuk mengabaikan pola-pola lama di masyarakat, *pertama*, mereka telah begitu lama menyandarkan diri pada tatanan institusi sosial lama yang berfungsi melindungi dan melayani mereka. Kemudian yang *kedua*, mereka telah kekurangan sumberdaya untuk meningkatkan status mereka dalam sistem yang lebih luas. Ketika mereka memutuskan untuk tidak lagi melayani tuan tanah atau jika sebaliknya, mereka diberhentikan sebagai klien dari petani yang lebih kaya, maka tidak saja kelangkaan sumberdaya yang mereka hadapi, lebih jauh dari itu, dalam sistem sosial di masyarakat, mereka kehilangan perlindungan dan keamanan yang sebelumnya diperoleh. Dalam situasi itu, ketika mereka berhadapan dengan apa yang dinamakan sebagai pengaruh dari luar, mereka sama sekali sulit untuk melakukan mobilitas vertical, karena disamping sumberdaya yang tidak ada, mereka sama sekali tidak memiliki orientasi atas perubahan itu sendiri. Mereka akan merasa lemah, dunia di luar sistem pertanian mereka dipandang sebagai arena yang sangat rapuh dan tidak bersahabat. Dalam keadaan ini, mereka akan berupaya untuk membangun situasi manakala sistem perlindungan dari tuan tanah itu pernah menjamin hidup mereka. Beberapa petani kecil yang mengalami hal demikian, kemudian mencari bentuk baru sistem proteksi itu melalui kelompok kekerabatan kecil dan kelompok tetangga untuk melindungi diri mereka dari eksploitasi luar serta sebagai sarana bagi mereka untuk secara sosial bergerak dalam sistem sosial yang lebih luas.

Dalam partisipasi politik, seperti telah disebutkan sebelumnya, mengenai upaya mereka untuk menghindari aktivitas-aktivitas partisipasi dalam masyarakat, maka para petani miskin sekalipun mereka terlibat dalam satu organisasi, maka hal itu tidak lain dimotori oleh keinginan mereka memperoleh imbalan materi atau insentif yang ditawarkan pada individu atau keluarga agar bisa digunakan untuk membiayai kesulitan-kesulitan ekonomi

yang mereka hadapi. Politik bagi para petani, oleh Migdal digambarkan sebagai bagian dari dunia luar yang memiliki daya dorong kuat ke dalam dunia petani. Sehingga keikutsertaan kaum tani dalam politik lebih karena keinginan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan administrasi rumah tangga mereka, ketimbang adanya gagasan untuk sebuah perubahan kebijakan.¹¹ Disinilah problem terbesar kelas bawah perdesaan yang mayoritas adalah petani. Dengan sulitnya mengorganisir mereka ke dalam satu bentuk gerakan sosial yang efektif, upaya untuk mencapai situasi yang lebih baik menjadi problematik.

Berdasarkan pemaparan beberapa konsep diatas, maka dapat dikatakan bahwa petani pada dasarnya berada dalam satu situasi ketidakberdayaan yang terinstitusionalisasikan. Situasi ini oleh Andrew Pearse (1975) dalam Sutomo (1997) dikatakan sebagai kemiskinan struktural di kalangan petani. Selanjutnya, manusia petani terbawa dalam konflik dan tegangan hubungan desa-kota. Tiga hal yang menjadi identifikasi Pearse dalam melihat hal tersebut, yakni : (1) petani kecil merupakan kelompok marginal karena keikutsertaannya dalam system sosial telah meletakkan mereka sebagai elemen yang dibuat bergantung tak berdaya sepenuhnya (*a dependent powerless element*) (2) pilihan-pilihan petani ditentukan oleh pihak-pihak bukan petani dan yang ke (3) adalah petani terasing dari jaringan-jaringan informasi actual mengingat keterbatasan kemampuan kognitif mereka , system transportasi yang belum sempurna dan perbedaan kultur serta posisi inferior dalam interaksi pasar.¹²

Mengenai masuknya manusia petani ke dalam konflik dan ketegangan dalam hubungan desa-kota, kiranya hal ini ditegaskan kembali oleh George Rosen (Rosen 1975) bahwa ketergantungan antara masyarakat petani pada orang kota sangatlah kuat, oleh karena itu ketika kita mengamati desa, maka hal itu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kota sebagai pusat ekonomi yang mengendalikan arus barang yang keluar-masuk desa. Meski dalam memenuhi

¹¹ Ibid, hal 23

¹² Dalam Greg Sutomo, Kekalahan Manusia Petani; Dimensi Manusia dalam Pembangunan Pertanian, 1997

kebutuhan sehari-harinya orang kota sangat tergantung pada orang desa, namun manusia petani sangat bergantung pada system ekonomi pasar yang berada di kota.¹³

Sementara itu berbeda dengan partisipasi politik kelompok non elit masa kini, seorang peneliti perdesaan dari Indonesia, Kutut Suwondo (2003), menjelaskan perihal partisipasi politik kelompok non elit pasca reformasi. Dia menjelaskan dalam satu studinya di sebuah desa di Jawa Tengah, bahwa meskipun kelompok non elit di perdesaan masih memiliki rasa sungkan yang tinggi terhadap atasan atau penguasa, namun hal itu tidak menyurutkan minat mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di aras desa. Masyarakat desa telah terbiasa dengan *rational discourse* serta meminta pertanggung jawaban negara. Dinamika politik perdesaan setelah reformasi menunjukkan sisi yang positif dalam perkembangan demokrasi di perdesaan, hal ini bisa dilihat dari beberapa gejala diantaranya : adanya keberanian untuk menggugat dan mengganti kepala desa dan sekertaris desa yang diindikasi korup, kemudian mampu melakukan resistensi atas tekanan-tekanan yang diberikan oleh penguasa, serta adanya persaingan antarwarga baik yang masuk golongan elit maupun non elit untuk memperebutkan kekuasaan di desa maupun daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara warga desa dan pemimpinnya tidak lagi bersifat hirarkis, meskipun dalam menghadapi setiap persoalan, orang Jawa lebih menempatkan harmoni di depan ketimbang konflik.¹⁴

Sementara itu, peluang politik di perdesaan bisa dimaknai sangat positif bagi kelompok miskin untuk mendapatkan kesempatan dalam mencari peluang-peluang ekonomi jangka pendek guna mempertahankan perekonomian sehari-hari mereka.¹⁵ Situasi ini sepertinya mencerminkan konteks hubungan antara kelompok masyarakat miskin dan dinamika politik praktis Indonesia pada saat ini. Kelompok masyarakat entah miskin atau kaya, mampu memperoleh akses-

¹³ George Rosen, dalam *Peasant Society in Changing Economy*, 1975

¹⁴ Suwondo (2003), *Civil Society di Aras Lokal; Perkembangan Hubungan antara Rakyat dan Negara di Perdesaan Jawa*, 2003

¹⁵ James Scott, *Senjatanya Orang-Orang Kalah*, 2000

akses politik yang kemudian memungkinkan adanya aliran uang kepada mereka dari partai ataupun kelompok politik. Jika kita merujuk pada paparan Anthlov mengenai situasi perdesaan di masa orde baru, kiranya disinilah letak perbedaan antara Scott dan Anthlov dalam melihat kemampuan masyarakat desa merespon satu momentum politik. Dalam kasus Anthlov misalnya, momentum politik senantiasa menjadi domain elit desa untuk bermain dan mencari keuntungan. Kelompok orang miskin di perdesaan Jawa pada masa orde baru seringkali hanya menjadi penonton dari momentum politik itu, walaupun ada partisipasi politik, lebih karena adanya tekanan dari apparatus Negara, namun perlawanan yang diberikan dimanifestasikan secara langsung pada proses politiknya dengan memberikan sanksi bagi kekuatan politik yang digunakan sebagai kendaraan oleh elit desanya. Dengan kata lain, kelompok miskin sendiri merupakan agen aktif yang juga memiliki kuasa untuk menerapkan strategi-strategi dalam mendapatkan peluang serta kesempatan baru. Pergeseran kekuasaan yang terjadi di tengah masyarakat di perdesaan secara aktif mampu dimaknai oleh kelompok miskin. Dalam konteks penelitian ini, menjadi penting untuk melihat bagaimana kelompok masyarakat miskin di perdesaan memaknai potensi dan peluang ekonomis dalam momentum politik yang berlangsung di wilayahnya. Termasuk di dalamnya adalah hubungan yang terjalin antara masyarakat dengan aparat Negara yang menjangkau mereka. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah selain persoalan mendapatkan uang, *apakah mereka masih memiliki harapan-harapan lain yang sifatnya lebih menyangkut kepentingan jangka panjang mereka sebagai satu kelompok masyarakat yang termarjinalkan?*

2.2. Kelompok Elit di Desa

Pengertian mengenai kelompok elit dijelaskan oleh salah satunya Thomas Burton Bottomore, seorang sosiolog kiri yang banyak mengupas mengenai peranan elit dalam setiap proses perubahan di masyarakat. Pemikiran Bottomore (1993) mengenai elit dalam struktur sosial masyarakat banyak berangkat dari gagasan beberapa pemikir sosiologi politik seperti Moscha (1939), Schumpeter (1942) dan Pareto (1968) (dalam Keith Faulks, 1999). Mereka sepakat bahwa masyarakat pada dasarnya terbagi ke dalam kelas elit, sub elit serta non elit. Selanjutnya, ada

lima tipe ideal elit yang biasanya memiliki kemampuan untuk mengambil alih kekuasaan di dalam satu masyarakat industry, yakni : kelompok elit dinasti, kelas menengah, intelektual revolusioner, administrator colonial dan pemimpin nasionalis. Namun yang cukup dominan saat ini, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah kelas menengah, intelektual revolusioner serta pemimpin nasionalis. Dua yang pertama termasuk dikatakan oleh Bottomore, sebagai mereka yang memiliki peranan terbatas karena proses modernisasi itu sendiri mengedepankan gagasan kemajuan dalam bidang pendidikan, hukum dan pengadilan serta pembebasan atas belenggu kolonialisme, feodalisme serta tatanan lama yang cenderung tidak adil bagi kelas non elit.¹⁶

2.2.1. Relasi Dominasi Kelompok Elit di Perdesaan

Kelompok elit desa pada umumnya merupakan keturunan dari leluhur-leluhur desa sehingga mereka mewarisi bentuk-bentuk kekuasaan, baik yang sifatnya material seperti penguasaan atas tanah-tanah desa, ataupun yang sifatnya immaterial seperti warisan otoritas lokal dari orang tuanya. Mereka menguasai tanah dan sawah, mampu secara efektif mengoptimalkan program-program pemerintah di perdesaan, mengeksploitasi kelompok masyarakat miskin melalui berbagai macam hubungan-hubungan sosial dan ekonomi, serta mengkooptasi kekuasaan negara yang dioperasikan sampai ke tingkat desa.

Breman dan Wiradi, (2004:113) misalnya, mengemukakan bahwa kelompok elit desa bukan hanya mendominasi kepemilikan asset baik tanah maupun tenaga kerja, lebih daripada itu, mereka menguasai juga rantai produksi pertanian dengan mengambil peluang perdagangan sebagai usaha sampingan selain dari hasil sawah atau kebun. Untuk mempermudah urusan-urusan ekonomi itu, banyak dari mereka pada akhirnya mengamankan posisi dan jabatan pemerintahan di perdesaan seperti menjadi kepala desa, pamong desa dan bahkan ulama. Dalam studi yang lain, elit-elit perdesaan yang masih memiliki keterkaitan dengan para sesepuh dan pendiri desa di masa orde baru berkuasa memiliki *priviledge* dan keleluasaan untuk mengakses program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (Anthlov,2002).

¹⁶ T.B. Bottomore, *Elite and Society*, 1993

Dalam kasus revolusi hijau misalnya, keberhasilan peningkatan produksi pertanian padi yang mencapai dua sampai tiga kali lipat tidak serta merta memakmurkan masyarakat desa secara keseluruhan, dalam prosesnya, hanya para petani kaya, pemilik tanah besar dan para pejabat pemerintahan desa yang secara optimal bisa memanfaatkan kesempatan itu, karena selain persoalan kapasitas dan akses terhadap program, kondisi fisik dan lingkungan sawah seperti tingkat kesuburan dan akses irigasi sawah sangat menentukan. Sawah-sawah dengan tingkat kesuburan yang tinggi serta akses terhadap air secara terus menerus – pada kenyataannya varietas padi itu dikondisikan bisa tumbuh dengan baik hanya pada sawah yang terus menerus dialiri air – mayoritas dimiliki oleh para tuan tanah dan petani kaya (Husken, 1998:245). Husken juga menerangkan bahwa pembukaan ekonomi desa justru mengarah pada pembentukan hubungan perburuhan yang terbatas dan tatap muka, ketimbang satu hubungan yang murni kapitalistik antara buruh dan majikannya. Para tuan tanah di perdesaan Jawa, mempertahankan hubungannya dengan buruh-buruh mereka melalui ikatan-ikatan ekonomi dan kewajiban-kewajiban moral yang dipelihara melalui berbagai bentuk pertukaran serta menggunakan simbol-simbol hubungan kekerabatan sebagai salah satu strateginya. Sementara itu, Wasino (2008) mencatat bagaimana kepemilikan atas asset tanah di perdesaan Jawa pada masa Mangkunegaran (pertengahan abad 19) didominasi oleh kerabat keraton Mangkunegaran, yang kemudian dengan masuknya kolonialisme, membuka peluang bagi pihak keraton untuk mengakumulasi keuntungan melalui industri perkebunan tebu milik Belanda.

Meski konteks situasinya berbeda, Tsing (2005), dalam satu studi etnografi di Kalimantan, mengemukakan bahwa dalam perkembangannya semenjak masa kolonialisme sampai reformasi, konstruksi universal atas hutan dan segala isinya berada dalam kekuasaan Eropa. Para elit yang kemudian menggantikan kekuasaan kolonial di Indonesia, sampai saat ini pun masih terjebak dalam cara pandang itu. Terampasnya hutan oleh kelompok elit, pada kenyataannya telah memaksa para petani kecil untuk menyingkir dari hutan. Para petani kecil di pinggiran hutan di Kalimantan, dianggap oleh mereka sebagai warga

desa yang miskin dan aktif sebagai perusak hutan untuk melanjutkan hidup mereka yang serba terbatas dan kekurangan. Anggapan ini juga dimiliki oleh para pekerja HPH, HTI dan pegawai perkebunan.

2.2.2. Antara Patronase dan Eksploitasi Simbolis Kelompok Elit

Mengutip Bourdieu (1977) dalam (Anthlov 2002), Hans Anthlov sepakat dengan Husken, bahwa ketika sebuah hubungan tidak lagi bisa secara langsung dieksploitasi, maka hubungan itu harus disamarkan di dalam bentuk hubungan yang akrab, dan model yang biasa dipakai adalah hubungan antar kerabat. Pola-pola hubungan seperti inilah yang saat ini semakin banyak terjadi di perdesaan Jawa, mengandalkan keluarga atau kerabat untuk bekerja. Secara ringkas, sesungguhnya hubungan *patron-klien* di Jawa mencerminkan pola hubungan yang eksploitatif namun tersamarkan.

Dalam hubungannya dengan apparatus pemerintah, kelompok orang kaya di perdesaan India dalam satu situasi demokrasi yang terbuka memiliki kemampuan mengelola hubungan mereka dengan aparat kepolisian serta menguasai jaringan birokrasi pemerintah lokal, dengan ini mereka bisa mengisolasi, mengeksploitasi dan memperdaya masyarakat miskin di sekitar mereka (Jeffrey 2000).

Ada tiga pola relasi antara tuan tanah dan petani di perdesaan Brazil, yang dijelaskan oleh Migdal, yang *pertama*, seorang tuan tanah dengan beberapa orang buruh tani yang berada di bawah dominasinya, ditambah beberapa orang buruh tani yang lebih independen. Kemudian yang *kedua*, beberapa orang tuan tanah mendominasi seluruh buruh tani dan petani kecil dalam komunitas. Pada kondisi ini tidak ada satupun tuan tanah yang memiliki kemampuan untuk memonopoli sumberdaya yang ada. Sementara yang *ketiga*, relasinya adalah beberapa tuan tanah dengan sebagian kecil buruh tani di desa itu.¹⁷ Disamping persoalan ekonomi sehari-hari, para petani kaya yang mampu mengakumulasi sumberdaya, seringkali menggunakan sumberdayanya itu di luar desa untuk menguatkan status dan posisi sosial mereka di kalangan kelompok sosial lainnya. Cerita mengenai elit dalam masyarakat perdesaan, juga dikemukakan

¹⁷ Ibid hal-38

oleh Kartodirdjo (1981), bahwa dalam menghadapi proses modernisasi, pada kenyataannya, elit-elit tradisional cenderung berada pada posisi yang menentang perubahan itu terjadi. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan struktur lamanya ketimbang merombak tatanan yang sudah ada.¹⁸

Sebagai ilustrasi perbandingan, Scott (2000) dalam penjelasannya mengenai situasi desa di Malaysia, berbeda dengan apa yang berlangsung di Jawa, elit desa yang secara ekonomi memiliki kemampuan mengakumulasi modal dengan cara-cara yang dipandang tidak lazim oleh masyarakat, dalam kenyataannya mendapatkan satu sanksi sosial dari masyarakat dalam bentuk perlawanan yang halus.¹⁹ Meskipun dalam kenyataannya, elit desa tetap memegang kendali kekuasaan ekonomi di masyarakat. Namun situasi itu menjelaskan bahwa eksklusi sosial tidak senantiasa berhubungan dengan factor penguasaan sumberdaya. Eksklusi sosial secara simbolik bisa dialami oleh siapa saja – termasuk kelompok elit desa – yang dalam perilaku sehari-harinya mendapatkan penilaian negative dari masyarakat.

2.3. Tangan-Tangan Negara di Desa

Mewakili satu pandangan lama mengenai keberadaan negara di desa serta bagaimana posisi para petani dalam situasi pemerintahan yang demikian adalah Rosen (1975). Ia mengetengahkan bahwa dalam kaitannya hubungan antara perdesaan dan perkotaan dan dalam kerangka penguasaan aparat birokrasi di kota, maka pemerintah merupakan kekuatan aktif di masyarakat sementara kelompok petani merupakan kekuatan pasif. Di masa kolonialisme, penguasa dan pengadilan adalah cerminan dari sistem sosial di masyarakat, keduanya memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kelompok yang berada pada posisi puncak sistem masyarakat pertanian pada saat itu menjalankan kekuasaan yang didukung dan dikondisikan oleh pemerintah atau negara kolonial.

Dalam melihat bagaimana Negara beroperasi di desa, kiranya hasil studi Hans Anthlov mengenai perkembangan desa di Jawa Barat di penghujung abad ke-20

¹⁸ Dalam Kata Pengantarnya di "Elite dalam Perspektif Sejarah", 1981

¹⁹ Bandingkan dengan kajian Anthlov (2002) atau situasi masa kerajaan yang dijelaskan oleh Wasino (2008)

bisa menjadi satu gambaran bekerjanya kekuasaan yang bersifat simbolik. Dalam perspektif Foucaultian, Anthlov memaknai kekuasaan yang beroperasi di desa semakin efektif berjalan, ketika bentuk-bentuk kekuasaan itu tersamar dalam bentuk-bentuk perintah halus, yang terdengar lembut, tersamar, namun mampu mendisiplinkan dan menertibkan masyarakat untuk bisa bergotong royong, menjaga keamanan dan ketertiban di desa serta meningkatkan solidaritas keluarga. Dalam konteks orde baru, pemerintah Indonesia beroperasi di desa melalui penyerapan yang berhasil atas norma-norma masyarakat dan patriotisme, yang dinyatakan dalam bentuk selamatan, pertemuan-pertemuan masyarakat, peristiwa-peristiwa keagamaan, drama-drama populer dan lain sebagainya.²⁰ Dari sinilah praktek-praktek sosial masyarakat direproduksi oleh negara melalui aparat-aparatnya.

Berbeda dengan Anthlov, Suwondo (2003) menyatakan dalam satu studinya di sebuah desa di Jawa Tengah, bahwa pasca reformasi hubungan antara rakyat dan negara di aras lokal menjadi lebih bersifat seimbang inklusif dan konstruktif untuk membangun desa dan rakyat ke arah otonomi desa. Dalam hal ini, Suwondo memasukkan unsur *civil society* sebagai perangkat untuk menganalisa hubungan antara rakyat dan negara, beberapa factor yang kemudian dijadikan indikasi dari membaiknya hubungan itu antara lain : 1. Masyarakat desa yang selama ini hidup tertekan di bawah garis kemiskinan – sangat miskin sehingga kondisinya sudah tidak bisa lagi ditekan untuk lebih rendah lagi – secara perlahan mereka mencoba mengatur dirinya sendiri untuk bisa *survive* dalam situasi yang demikian. Salah satu kemajuannya menurut Suwondo adalah mulai pulihnya jaring pengaman lokal di tingkat masyarakat desa serta menguatnya rasa tolong menolong diantara warga. 2. Sistem politik lokal dinilai sangat fungsional, yang ditandai dengan lengkapnya kelembagaan politik di aras desa, seperti pemerintah desa, BPD dan parpol. Meski partai politik masih dirasakan sangat kurang peranannya kecuali pada saat pemilu atau pilkada, hal ini lebih dikarenakan sifat sentralisme partai yang sangat berbeda dengan otonomi BPD dan pemerintah desa. 3. Meski di aras nasional kepemimpinan elit dirasakan sangat memprihatinkan, tidak demikian dengan di aras lokal. Di desa, orang-orang masih cukup mudah mencari elit-elit

²⁰ Hans Anthlov, Negara dalam Desa; Patronase Kepemimpinan Lokal, 2002

yang bisa menjadi tauladan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 4. Partisipasi di aras desa semakin membaik, ditunjukkan dengan semakin banyak warga yang terlibat dalam perumusan keputusan-keputusan publik di level desa.

Dari ketiga gambaran mengenai konstruksi Negara di perdesaan, meskipun ketiganya mewakili konteks masyarakat yang berbeda – yang kedua di Jawa Barat sementara yang pertama dan ketiga di Jawa Tengah – namun dari sana kita bisa lihat bahwa relasi ekonomi-politik yang berlangsung di aras desa mengikuti pola-pola yang cenderung beroperasi di tingkat nasional. Dengan kata lain, ada tiga kemungkinan yang bisa kita ambil dari contoh tersebut, yang *pertama* ada kemungkinan para penguasa di tingkat desa dalam prosesnya terkooptasi langsung oleh kekuatan supra desa – dalam hal ini adalah Negara – sehingga mereka tunduk patuh terhadap kepentingan yang jauh lebih besar, kemudian yang *kedua*, dalam perkembangan situasi yang berbeda diatas, ada kecenderungan bahwa para penguasa di level desa mampu memanipulasi situasi untuk bisa memanfaatkan segala macam bentuk kekuasaan yang menjadi suprastruktur bagi mereka sehingga dengan kata lain mereka mampu melanggengkan kekuasaannya dengan menunggangi kekuasaan dan kepentingan yang jauh lebih besar, sedangkan yang *ketiga* adalah pemahaman yang tidak secara deterministik memisahkan dua kemungkinan sebelumnya, yakni pemahaman bahwa baik kekuasaan negara maupun kekuasaan kelompok penguasa desa sama-sama memiliki kemampuan responsive yang dinamis sehingga pada suatu saat mereka bisa saling menegasikan, namun di saat-saat tertentu mereka bisa saling bersinergi, dan tidak ada satupun bentuk dominasi yang final, keduanya terlibat dalam satu kontestasi. Namun demikian, kontestasi yang terjadi tetaplah mencerminkan satu bentuk dominasi atas keseluruhan sistem, yaitu kelompok petani miskin.

2.4. Struktur Sosial Masyarakat Perdesaan di Jawa Barat

2.4.1. Dari Menak ke Ulama-Jawara

Dalam melihat struktur sosial di perdesaan khususnya Jawa Barat. Maka ada baiknya kita menilik kembali sejarah panjang dominasi elit di tatar priangan.

Dalam Fauzi (2008)²¹ yang mengutip Lubis (2000), mitos mengenai Prabu Siliwangi menjadi awal betapa para menak²² Sunda mencoba mengukuhkan dominasinya melalui cerita-cerita rakyat yang memosisikan raja dan para keturunannya sebagai entitas yang mesti dihormati dan dihargai. Atau mengenai kolonialisme yang juga memberikan pengaruh besar terhadap kemiskinan yang berakar dari terampasnya hak-hak rakyat atas tanah dan pertaniannya.²³ Dalam menjelaskan perihal struktur sosial di masyarakat Sunda, maka konsep lama mengenai menak-cacah menjadi penting untuk dilihat. Konsep menak-cacah adalah konsep lama yang berakar pada kekuasaan kaum aristocrat masa lampau. Jika di Jawa dikenal dengan istilah gusti-kawulo, maka di Sunda lebih dikenal dengan sebutan menak-cacah. Satu konsep segregasi sosial yang lazim disebut sebagai relasi antara *patron* dan *klien*. Pada masyarakat Eropa sendiri, patronase dianggap bentuk relasi sosial kuno yang pernah berkembang di masa-masa awal Eropa modern dan menghasilkan satu sistem feodalisme kerajaan. Teorinya, dengan runtuhnya kekuasaan kerajaan di Eropa dan berganti dengan sistem kenegaraan, maka patronase juga semakin kehilangan kekuatan sampai pada hilang sama sekali (Mazlish, 2000). Namun tidak demikian dengan struktur sosial masyarakat Indonesia, karena patronase sampai hari ini masih bisa kita saksikan, tidak hanya di desa-desa ataupun pelosok-pelosok, melainkan dalam dunia politik kontemporer, sebagian besar actor-aktornya nyaman dengan pola hubungan seperti itu. Karena seperti halnya kaum tani di perdesaan, mereka menginginkan adanya jaminan keamanan dan kepastian walaupun secara simbolis mereka berada dalam satu situasi dominasi atau bahkan eksploitasi.

Selepas runtuhnya kekuasaan raja dan kaum aristocrat Jawa, kemudian muncullah kelompok elit lainnya, yakni pemimpin agama (ulama), seperti yang dijelaskan secara detail oleh Kartodirdjo (1973).

Messianic movements, the second category, were primarily a '... religious reaction without significant economic elements' (pp. 15-

²¹ Nanjeurkeun Obor Jang Nyageurkeun Panyakit Poho Sajarah, Sketsa Tiga Abad Politik Agraria di Tatar Priangan, (2008)

²² Menak adalah sebutan bagi kaum bangsawan di Sunda

²³ Ibid, hal - 4

16). Here Sartono stresses the emergence of a messiah with a prophetic message as a sufficient condition of rural revolt (pp. 16, 91, 104, 109) and, in addition, that the messianic tradition, intermixed with other elements in Javanese syncretic religion was 'structurally conducive' in bringing about peasant protest (p. 104). Yet implicit in his definition of messianism is its significant preoccupation with the real world, its opposition to the established order and its desire to reform that order. Messianism in fact addressed itself to socio-economic and political objectives (p. 68) and to oppression and hardship (p. 78) which resulted largely from Dutch colonial rule. Even messianic leaders tended to be members of the traditional elite whose privileges, status and influence over the rural population had been affected by the changes brought about by colonial domination. (King, 1975)²⁴

Bahwa dalam perkembangannya, ketika kaum colonial masuk ke Jawa untuk memulai proses kapitalisme modern, kelompok-kelompok ulama yang masuk dalam golongan elit di perdesaan, mengalami satu situasi yang tidak menguntungkan. Dimana *priviledges*, status dan pengaruh mereka di kalangan rakyat perdesaan terganggu akibat penguasa colonial yang mencoba memasukkan nilai-nilai modern melalui eksploitasi dan peminggiran peran kaum elit lama. Pada akhirnya situasi ini mendorong lahirnya satu bentuk perlawanan kaum tani yang dimotori oleh kaum agamawan. Namun demikian, lahirnya perlawanan kaum tani yang dimotori oleh kelompok agamawan dengan menggunakan pesan-pesan ke-Ilahian, dalam kenyataannya terkait erat dengan tujuan-tujuan ekonomi politik pemimpin agama tersebut. Dan tidak semata-mata persoalan spiritual. Penjelasan diatas kiranya bisa menggambarkan, mengapa di perdesaan Jawa Barat kaum ulama cukup mendapat posisi yang cukup kuat. Tidak terkecuali di Bogor.

Selain soal ulama, ada satu kelompok elit lainnya yang kemudian muncul, yakni kelompok Jawara. Jawara berasal dari kata juara, yang artinya kurang lebih adalah pemenang. Pemahaman mengenai jawara tentu saja terkait dengan kemampuan mereka untuk memenangkan satu pertarungan ataupun pertandingan. Dalam pandangan Bottomore, ada salah satu kelompok elit di negara-negara berkembang yang mesti dibahas secara terpisah, yaitu elit

²⁴ Victor T. King, (1975), Review atas Tulisan Sartono Kartodirdjo, "Protest Movement in Rural Java" (1973)

militer. Kiranya, peran Jawara pada zaman dahulu bisa disamakan dengan militer atau kelas ksatria pada masyarakat aristokrasi. Peranan militer yang dahulu merupakan bawahan dari raja, dalam konteks masyarakat perdesaan di Banten ataupun Sunda dipegang oleh kelompok Jawara ini.

2.4.2. Dinamika Relasi Patron-Klien di Perdesaan

Selama beberapa kurun waktu, suatu hubungan sosial tentu saja mengalami pasang surut atau perubahan dikarenakan berbagai hal. Hal ini bisa diakibatkan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan-hubungan itu, maupun akibat pengaruh dari struktur sosial yang lebih besar. Begitu juga dengan relasi patron-klien yang selama berabad-abad ada dalam masyarakat perdesaan. Jika pada masyarakat Eropa pergeseran kekuasaan dari kelompok aristokrat kepada kelompok borjuis meluruhkan ikatan patronase dan menggantikannya dengan koneksionisme, tidak seperti halnya di Indonesia ataupun Asia pada umumnya yang tipikal masyarakat agraris. Sisa-sisa dari sistem patronase masih tetap bertahan, kemungkinan besar hal ini seperti dikatakan oleh Anthlov bahwa negara memiliki andil dalam memperkuat sistem patronase itu. Hal ini terbukti ketika masa orde baru, negara membangun patronase sampai tingkat lokal. Begitu juga ketika masyarakat dunia memasuki era komunikasi dan informasi, yang kemudian menggantikan ikatan koneksionisme menjadi berjaringan (*networking*), pun demikian, patronase di Indonesia bukan semakin pudar, justru memiliki potensi untuk semakin menguat. Sesungguhnya pengaruh terbesar dari luar terhadap pasang surut sistem patronase telah berlangsung sejak masuknya kolonialisme di negara-negara dunia ketiga, seperti yang telah diungkapkan oleh Scott (1972) mengenai dampak kolonialisme terhadap sistem patronase di Asia

The impact of colonial change on patron-client relationship can be described under three headings (1) the process of sosial differentiation, (2) the growth of the colonial state, and most important (3) the commercialization of agriculture and the concentration of landownership.

Dari pemaparan Scott diatas, kiranya kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa pada masa kolonialisme hubungan patron-klien pada dasarnya mengalami penguatan dengan adanya proses difensiasi sosial di tengah masyarakat, yang

kemudian disertai dengan berkembangnya negara kolonial serta yang paling penting dari semua itu adalah komersialisasi sektor pertanian rakyat dan konsentrasi kepemilikan atas lahan pertanian. Ketiga hal diatas kemudian oleh Scott digambarkan sebagai pengaruh luar yang cukup mempengaruhi relasi patronase dengan para pemilik tanah sebagai pihak yang paling diuntungkan. Berikut tabel yang menggambarkan bagaimana para pemilik tanah diuntungkan dengan kebijakan pemerintah kolonial.

THE COMMERCIALIZATION OF AGRICULTURE AND THE BALANCE OF PATRON-CLIENT EXCHANGE

Nature of Change	Effect on Patron-Client Relations
a. 1. Growing inequality in landholding	Control of land becomes key basis of patronage; landholder's position strengthened in dealing with clients who seek access to narrowly-held land
2. Population growth	Landholder's position strengthened in bargaining with a growing peasantry seeking access to land
3. Fluctuations of producer and consumer prices under commercial agriculture	Landholder's position strengthened as peasants increasingly need credit, relief, marketing assistance, etc.
b. 4. Loss of "slack resources" (uncleared land, common pastorage, free fuel, etc.)	Weakening of alternative security mechanisms weakens peasant-client's bargaining position with elites
c. 5. Deterioration of Village Leveling mechanisms	Weakening of alternative security mechanism weakens peasant-client's bargaining position with elites
6. Colonial state protects property rights of land-owning classes	Landowner less in need of loyal local clientele; hence less incentive to maintain a balance of exchange that engenders legitimacy

Sumber, James Scott, 1972. *The Erosion of Patron-Client Bonds and Sosial Change in South East Asia*

Demikian pula dengan relasi *patron-klien* yang mendominasi struktur sosial lama di Jawa Barat telah menempatkan para elit dalam posisi yang senantiasa diuntungkan, sementara kelompok masyarakat miskin, seperti buruh tani berada pada posisi yang senantiasa dirugikan. Meski disana-sini terjadi pelemahan dari struktur itu akibat berbagai hal – terutama modernisasi – namun secara simbolis hal tersebut masih berlaku sampai sekarang. Pertanyaannya kemudian, jika memang terjadi pelemahan atas struktur sosial *patron-klien* itu, maka bagaimana kelompok elit menyiasati melemahnya

hubungan itu, dan bagaimana kelompok non elit menyiasati perubahan yang ada.

Untuk menguraikan pertanyaan itu, maka, perlu bagi kita untuk bisa melihat lebih dalam, bagaimana perilaku kaum elit perdesaan dalam menghadapi proses-proses perubahan struktur kekuasaan yang terjadi di luar desa. Secara garis besar tentunya bisa kita telusuri bagaimana kelompok elit perdesaan memanfaatkan setiap moment pengeralihan sumberdaya dan investasi di perdesaan, mulai pada masa pra kolonial, masa kolonial dan pasca kolonial. Dalam hal ini penting bagi kita untuk mendefinisikan negara sebagai satu struktur besar dari desa. Jika pada masa pra colonial negara adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, pada masa kolonial adalah pemerintah kolonial Belanda, sedangkan masa pasca kolonial adalah pemerintah Indonesia itu sendiri, yang dalam pembahasannya, entitas negara mengalami perubahan-perubahan. Dengan kata lain, pemaknaan masyarakat terhadap negara pada setiap periode kekuasaan terus menerus mengalami perubahan maupun redefinisi. Dalam konteks Indonesia, maka kajian-kajian mengenai dinamika negara beserta relasinya dengan rakyat pada umumnya menggunakan tiga periode besar, berdasarkan karakteristik rezim penguasanya, yakni masa orde lama, orde baru dan reformasi. Pada setiap masa itulah, definisi dan pemaknaan negara oleh kelompok elit perdesaan perlu untuk diketengahkan.

Sementara itu, untuk melihat representasi dari kehadiran negara di tengah masyarakat, ada beberapa tanda-tanda penting yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam menganalisa dinamika negara itu sendiri, diantaranya adalah : entitas dari aparatus negara yang hadir dalam kehidupan masyarakat, entitas institusi negara serta produk-produk hukum dan kebijakan yang mencerminkan pola-pola kontrol negara terhadap masyarakat. Dari ketiga tanda itu, maka dalam konteks riset ini, kita bisa memahami secara lebih detail, bagaiman masyarakat perdesaan – kelompok elit, kelompok miskin dan apparatus negara – memaknai kehadiran negara yang dimanifestasikan dengan relasi-relasi politik baru yang terbangun.

2.5. Kerangka Konseptual

Dari pemaparan beberapa kerangka konseptual mengenai kemiskinan, pandangan ekonomi-politik kaum tani, hubungan antar kelas di perdesaan dan pasang surut relasi patronase di kalangan petani, maka dapat diringkas sebagai berikut :

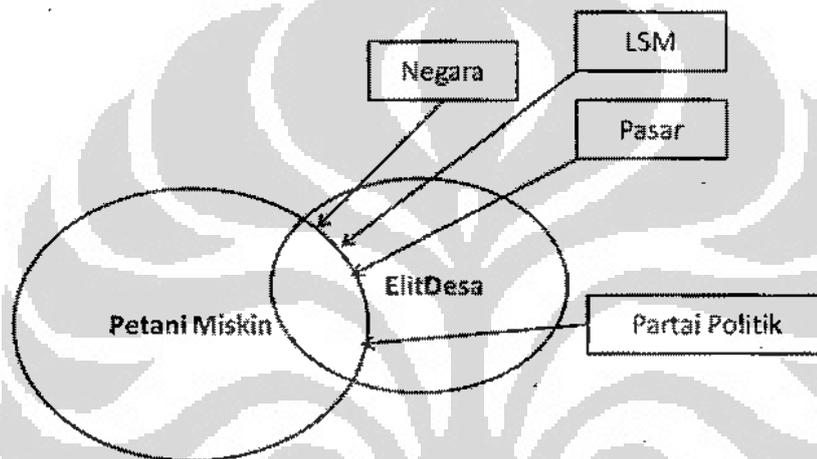
	Relasi Patronase	Kekuasaan Negara	Penyebab Kemiskinan	Strategi Kelompok Miskin
Anthlov	Kelompok elit desa memiliki kemampuan untuk memperkuat relasi yang timpang antara patron dan klien melalui peralatan negara.	Menjadikan elit desa sebagai klien dari sistem kekuasaan negara. Kekuasaan yang berjalan melalui <i>perintah halus</i>	Struktural, karena strategi pembangunan orde baru yang bias pemerataan	Mengandalkan jaringan keluarga dan kerabat
Migdal	Kontak budaya antara desa dan dunia luarnya mampu mempengaruhi bentuk-bentuk ikatan sosial lama yang ada di desa.	Negara gagal menggeser peran elit desa dan tuan tanah. Negara justru menerima banyak manfaat dan keuntungan dari hubungannya dengan para elit desa	Struktural, masalah ketimpangan kepemilikan tanah serta kesulitan para petani miskin mengakses sumberdaya.	Secara ekonomi mereka menerapkan <i>outward and inward strategy</i> Secara politik mereka berpartisipasi demi tujuan-tujuan pragmatis.
Scott	Dalam situasi yang serba simbolis. Pertukaran tidak diiringi oleh kepatuhan-kepatuhan yang sesungguhnya	Hegemoni yang dilakukan negara dan kelompok berkuasa gagal membangun konsensus kepentingan dengan para petani miskin.	Struktural, ketimpangan kepemilikan tanah.	Melakukan perlawanan dalam bentuk perlawanan sehari-hari terhadap negara dan kelompok orang kaya desa. Melakukan interpretasi terhadap gagasan-gagasan baru yang ditawarkan dengan membandingkan-nya pada nilai-nilai lama mereka
Chambers	Intervensi 'orang luar' desa seringkali terjebak dalam 'prasangka' yang menghalangi hubungan dengan kemiskinan desa pada umumnya, sehingga dalam beberapa hal kerap	Negara beserta perangkatnya lebih memposisikan diri sebagai 'orang luar' dalam melihat dan menyelesaikan kemiskinan di	Lebih disebabkan konsepsi-konsepsi yang bias dari kelompok 'orang luar' (birokrat, akademisi, aktivis) yang terlibat kemiskinan di desa.	Mengandalkan keluarga dan tetangga. Perlu ada intervensi yang tidak bias 'orang luar'

	memperkuat kekuasaan para patron.	desa		
Breman	Situasi ekonomi yang sulit, melemahkan struktur patronase karena kelompok 'orang kaya baru' lebih memilih untuk lari dari kewajiban-kewajiban sosial di masyarakat	Negara gagal melindungi kelompok masyarakat miskin melalui kebijakan-kebijakan yang menolak bentuk-bentuk subsidi bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari	Ketidakmampuan negara dalam melindungi kelompok masyarakat desa yang miskin melalui sistem pengaman sosial	<i>Inward & Outward Strategy</i>

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diperlukan satu kerangka konseptual yang bisa membantu mendefinisikan pemaknaan peneliti atas fenomena sosial yang ditemui dilapangan. Oleh karenanya, ada tiga hal pokok yang oleh peneliti akan dibuat definisi kerjanya, yakni :

1. Struktur produksi pertanian, adalah satu struktur relasi yang di dalamnya semua komponen terlibat dalam sistem produksi pertanian.
2. Kaum tani yang dimaksud disini adalah para petani yang masuk dalam golongan petani miskin di perdesaan. Mereka ini pada dasarnya tidak memiliki tanah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Mereka terdiri dari para petani lahan sempit dan buruh tani dan merupakan kelas bawah atau kelompok non elit di desa.
3. Kelompok elit perdesaan, adalah mereka-mereka yang masuk dalam golongan kelas atas, diantaranya para pemilik tanah dan penguasa politik serta pemerintahan di desa yang memiliki relasi erat dengan kelompok non elitnya.
4. Relasi antara kelompok elit dan non elit di perdesaan adalah relasi eksploitasi dengan dinamikanya, baik yang deterministik maupun yang simbolis

5. Relasi antara kelompok elit desa dan negara berada pada situasi yang juga dinamis, dimana keduanya memiliki kemampuan untuk saling mempengaruhi satu sama lain.
6. Relasi antara negara dengan kaum tani, seringkali adalah relasi dominatif yang senantiasa mengkondisikan agar struktur yang timpang itu terus berlangsung, pembiaran struktural oleh negara merupakan bentuk eksploitasi simbolis negara atas petani.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan, berangkat dari pemahaman kerangka konseptual yang telah dirumuskan diatas, peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif, yakni jenis etnografi. Keputusan untuk melakukan studi mini etnografi di desa ini dikarenakan peneliti telah memiliki hubungan dengan komunitas masyarakat disana selama beberapa tahun. Meskipun begitu kecenderungan subyektivitas peneliti mungkin akan jauh lebih besar karena relasi antara peneliti dan subyek penelitian sendiri sudah terbentuk sedemikian rupa. Oleh karenanya, dalam menggali data dan informasi, peneliti akan melakukan metode triangulasi diantara para informan, hal ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih seimbang, ketimbang peneliti mengandalkan informasi dari satu-dua orang informan kunci. Kiranya hambatan dalam berkomunikasi dengan informan bisa dikesampingkan karena proses *engagement*²⁵ yang telah dilampaui oleh peneliti.

Mengambil pendekatan kualitatif, kiranya secara teoritis dapat kita lihat dari penjelasan Robert M.Z. Lawang dalam studi doktoralnya di Cancar, Manggarai. Dalam menelaah stratifikasi sosial di masyarakat perdesaan Flores, ia menggunakan pendekatan kualitatif karena hanya dengan pendekatan kualitatif kenyataan subyektif bisa lebih tepat dilihat. Kenyataan subyektif yang ada dalam kehidupan sehari-hari masyarakat penting sekali untuk dilihat sebagai pokok permasalahan studi sosiologi. Menurut Robert Lawang, ada empat hal yang menjadi alasan kenapa kehidupan sehari-hari penting untuk sosiologi, *pertama*, kehidupan sehari-hari itu sangat riil, tidak dapat disangkal, dapat diamati secara langsung dalam interaksi sosial atau kegiatan orang-orang tertentu dalam satu kelompok sosial tertentu. *Kedua*, dalam tindakan atau interaksi sosial yang terjadi sehari-hari itu ada makna yang ingin dinyatakan oleh orang-orang yang mungkin

²⁵ Melia dan Dubois (1995) dalam Ashman dan Hull (1999) mengatakan bahwa membangun relasi adalah hal penting dalam mengembangkan satu pola kemitraan dengan mitra. Dengan kata lain untuk satu penelitian kualitatif juga menjadi penting untuk melakukan satu proses *engagement* atau pengikatan.

berulang lagi tindakan sosial semacam itu di masa yang akan datang. *Ketiga*, walaupun kehidupan sehari-hari itu bagi subyek atau actor yang terlibat di dalamnya dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja (*taken for granted*), namun bagi seorang peneliti sosial, hal itu sangatlah penting karena hanya dengan cara itulah masyarakat mempertahankan hubungan sosial dan kelompoknya. *Keempat*, sangat terkait dengan permasalahan penelitian, yakni mengenai stratifikasi sosial dalam masyarakat, hanya bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari dalam tindakan, percakapan dan apa yang sedang orang kerjakan serta gunakan.²⁶

Penjelasan mengenai studi etnografi diulas oleh salah satunya Clifford Geertz dalam *Interpretation of Culture* (1973). Dalam penjelasannya, Geertz merujuk pada terminology Gilbert Ryle mengenai *thick description*.

*"the "thick description" of what he is doing ("practicing a burlesque of a friend faking a wink to deceive an innocent into thinking a conspiracy is in motion") lies the object of ethnography: a stratified hierarchy of meaningful structures in terms of which twitches, winks, fake-winks, parodies, rehearsals of parodies are produced, perceived, and interpreted, and without which they would not (not even the zero-form twitches, which, as a cultural category, are as much non-winks as winks are non-twitches) in fact exist, no matter what anyone did or didn't do with his eyelids."*²⁷

Thick description atau deskripsi padat, adalah deskripsi atas perilaku dan tindakan seseorang yang disandarkan pada objek etnografi. Disini peneliti betul-betul harus memperhatikan gerak-gerik dari informan, bahkan sampai pada kedipan mata, colekan, guyonan, ungkapan yang sering diulang-ulang atau tingkah laku yang sekiranya kurang lazim dilakukan. Dari apa yang dilihat dan dirasakan itulah peneliti mesti melakukan interpretasi atas realitas yang ada di lapangan.

Salah satu contoh mengenai penelitian seperti ini, adalah seperti yang dilakukan oleh Migdal (1974), dalam melihat bagaimana sanksi sebagai salah satu mekanisme kontrol sosial diterapkan kepada para petani dalam bentuk-bentuk

²⁶Robert M.Z. Lawang dalam "Stratifikasi Sosial di Cancar Manggarai Flores Barat Tahun 1950-an dan 1980-an" FISIP UI Press, 2004

²⁷ Geertz, *Interpretation of Culture*, 1973 London: Hutchinson & CO Publisher LTD, hal-32

kecil yang sangat penting untuk diinterpretasi. Diantaranya dalam bentuk gosip, umpatan, kritik, cercaan, hinaan serta ejekan dan tertawaan. Kesemuanya itu merupakan beberapa bentuk kontrol sosial informal yang cukup penting, yang dengannya kekuasaan yang ada bisa dikelola dan dipertahankan. Hagen (1962), yang dikutip oleh Migdal (1974), menyatakan bahwa kontrol sosial informal biasanya dilakukan dengan mempermalukan seseorang, merupakan bentuk sanksi yang paling efektif. Dengan kata lain, satu penelitian sosial, khususnya yang menyangkut kalangan petani di perdesaan, mestilah mengamati secara cermat bentuk-bentuk hubungan sosial sehari-hari yang secara simbolis mencerminkan kontrol-kontrol sosial dari kelompok yang berkuasa.

3.1. Merencanakan Kebutuhan Informasi

Jenis informasi yang akan dikumpulkan disini terbagi menjadi dua, yakni informasi sekunder dan informasi primer. Informasi sekunder meliputi catatan-catatan, laporan-laporan ataupun segala literature, terutama yang terkait dengan konteks kesejarahan desa. Peneliti membutuhkan banyak berkas-berkas yang penting yang bisa memberikan penjelasan mengenai keberadaan kampung ini. Namun demikian peneliti juga akan mengeksplorasi informasi mengenai kesejarahan itu dari para informan lapangan, karena konteksnya adalah sejarah lokal, maka menjadi penting untuk menentukan pihak-pihak yang bisa dijadikan nara sumber informasi. Penentuan nara sumber akan menggunakan metode *snowballing*, dimana peneliti akan mengandalkan informan kunci pertama seperti kepala desa dan tokoh masyarakat untuk mengetahui pihak-pihak yang mengetahui benar sejarah dari adanya kampung ini. Geertz menjelaskan, bahwa, etnografi sendiri dikatakan sebagai tahapan-tahapan dalam menjelaskan hubungan diantara orang-orang, memilih informan, menulis ulang teks, mencari silsilah keluarga, membuat peta lapangan, membuat jurnal harian.

*... doing ethnography is establishing rapport, selecting informants, transcribing texts, taking genealogies, mapping fields, keeping a diary, and so on. But it is not these things, techniques and received procedures, that define the enterprise.*²⁸

²⁸ Ibid, hal-32

Berdasarkan kebutuhan informasi yang berangkat dari permasalahan serta kerangka teoritis dari penelitian ini, maka beberapa informasi yang akan diidentifikasi serta diinventarisasi, antara lain :

1. Informasi mengenai gambaran umum kondisi desa saat ini, yang berisikan:
 - a. Gambaran mengenai desa terkait infrastruktur serta sarana dan prasarana aksesibilitas dari dan ke desa, serta jaringan jalan di dalam desa.
 - b. Gambaran mengenai aktivitas ekonomi yang dominan di desa
 - c. Gambaran mengenai kondisi sanitasi masyarakat
 - d. Gambaran mengenai situasi perumahan dan permukiman penduduk
2. Informasi mengenai situasi sosial ekonomi keluarga buruh tani di perdesaan
 - a. Informasi mengenai kegiatan harian rumah tangga buruh tani
 - b. Informasi mengenai jaringan ekonomi rumah tangga buruh tani
 - c. Informasi mengenai sejarah dan silsilah keluarga buruh tani
 - d. Informasi mengenai kondisi rumah keluarga buruh tani
 - e. Informasi mengenai respon buruh tani terhadap program BLT dan konversi gas
 - f. Informasi mengenai partisipasi sosial-politik keluarga buruh tani
3. Informasi mengenai kehidupan keluarga petani penggarap di perdesaan
 - a. Informasi mengenai kegiatan harian rumah tangga petani penggarap
 - b. Informasi mengenai jaringan ekonomi rumah tangga petani penggarap
 - c. Informasi mengenai sejarah dan silsilah keluarga petani penggarap
 - d. Informasi mengenai kondisi rumah keluarga petani penggarap
 - e. Informasi mengenai respon petani penggarap terhadap program BLT dan konversi gas
 - f. Informasi mengenai partisipasi sosial-politik keluarga petani penggarap
4. Informasi mengenai struktur produksi pertanian masyarakat
5. Informasi mengenai elit desa dan kelompok keluarga pemilik tanah

3.2. *First Engagement*

Dalam mencari dan memperoleh informasi, peneliti tidak berpatokan pada rentang waktu dimana penelitian ini secara formal dimulai. Boleh dikatakan sejak awal peneliti masuk dan mengenal desa ini, sejak saat itulah informasi-informasi penting dalam penelitian ini didapatkan. Sehingga dalam beberapa kasus yang diceritakan di dalam tulisan ini, banyak informasi-informasi yang cukup sensitif ataupun sulit untuk dibayangkan bagaimana cara eksplorasinya, namun bisa tersajikan dengan cukup memadai.

Pertama kali peneliti berkenalan dengan masyarakat Cimandiri dimulai pada tahun 2005. Pada saat itu peneliti adalah anggota baru dalam Yayasan Kekal Indonesia. Sebuah lembaga yang telah berdiri sejak tahun 1999 bergiat di bidang pemberdayaan masyarakat. Lembaga ini sebelumnya berkantor di Jakarta selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2004. Selanjutnya kantor pindah dari Jakarta ke Bogor. Setelah pindah ke Bogor itulah, peneliti kemudian bergabung ke dalam organisasi ini. Pada tahun 2005, Yayasan Kekal melakukan satu program pembangunan masyarakat (*Community Development Program*) di Cimandiri, setelah sebelumnya selama kurun waktu beberapa tahun sebelum program ini dilakukan, masyarakat Cimandiri telah mendapatkan program lain, yakni program Operasi Pasar Swadaya Masyarakat (OPSM). Program OPSM adalah program bantuan kemanusiaan yang diprakarsai oleh UN-WFP yang diperuntukkan bagi kelompok termiskin dari masyarakat miskin yang terkena imbas krisis moneter 1997 baik di perdesaan maupun di perkotaan. Program ini pada dasarnya adalah bantuan pengadaan beras murah bagi keluarga-keluarga miskin. Pada saat itu, kisaran harga beras di pasaran adalah sekitar Rp. 2000 s/d Rp. 2500 per kg-nya. Sementara dengan program ini masyarakat bisa mendapatkan beras lebih murah yakni, Rp. 1000/kg. Pada saat itu, pemerintah Indonesia juga tengah mengujicoba program yang serupa namun nama dan mekanisme distribusinya saja yang berbeda. Jika program bantuan dari Yayasan Kekal adalah OPSM, sedangkan pemerintah sendiri adalah Raskin atau beras untuk rakyat miskin. Perbedaan yang mendasar adalah, apabila program Raskin yang digelontorkan oleh pemerintah menggunakan struktur birokrasi sebagai pelaksana program, sehingga dari mulai aparat pemerintah di tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai

tingkat desa dilibatkan secara aktif. Sedangkan OPSM yang diprakarsai oleh PBB, dijalankan dengan melibatkan organisasi non pemerintah yakni LSM. Di Indonesia ada sejumlah LSM yang terlibat di dalam program ini, baik LSM yang berskala lokal maupun nasional. Lantas untuk distribusi sampai ke level akar rumput, program OPSM ini menggunakan fasilitator dari masyarakat, sehingga di setiap kampung atau dusun senantiasa ada fasilitator lapangan yang membantu mendistribusikan beras kepada masyarakat. Para fasilitator ini disebut sebagai TPR (Tim Pendamping Rakyat). Hampir di setiap titik program OPSM ini, jajaran pemerintah sama sekali tidak dilibatkan. Dengan kata lain program ini memotong kerumitan birokratis yang sering kita jumpai jika berurusan dengan pemerintah. Selanjutnya sekitar tahun 2005, program OPSM dihentikan oleh PBB karena pemerintah beranggapan sudah bisa berjalan sendiri dengan program Raskin yang sama-sama mereka lakukan. Salah satu lembaga yang secara profesional melakukan penelitian untuk membandingkan efektifitas kedua program ini adalah SMERU. Wilayah-wilayah yang sebelumnya ada program OPSM, saat ini digantikan oleh program Raskin.

Kunjungan perdana peneliti ke Desa Cimandiri adalah dalam kerangka monitoring atas program pembangunan masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Kekal. Pada saat itu posisi peneliti dalam organisasi ini adalah Ketua Divisi Pengembangan Kelembagaan. Satu kompartemen dalam Yayasan Kekal yang memiliki fungsi pengembangan kelembagaan, termasuk di dalamnya adalah melakukan penelitian dan monitoring atas program yang pernah, tengah dan akan dilakukan oleh lembaga. Kesempatan melakukan monitoring CDP ini dimanfaatkan oleh peneliti untuk menemukaenali masyarakat desa Cimandiri.

Waktu itu ada satu kesempatan rapat koordinasi antara panitia pembangunan jalan setapak dan MCK umum dengan pendamping dari Yayasan Kekal. Dalam rapat yang dilakukan di satu rumah warga desa yang juga seorang guru SD di Cimandiri Ilir, peneliti mulai mempelajari bagaimana berkenalan dengan masyarakat – kelak rumah ini menjadi tempat persinggahan tetap peneliti maupun para penggiat dari Yayasan Kekal apabila mengunjungi desa ini. Selanjutnya fokus perhatian peneliti adalah dalam proyek-proyek intervensi sosial yang kemudian dikembangkan oleh

Yayasan Kekal, baik di desa Cimandiri maupun di desa-desa lainnya. Meskipun secara riil tidak ada program besar yang dilakukan setelah CDP selesai, Yayasan Kekal tidak berhenti melakukan intervensi sosial, melainkan terus melakukan *exercise* dalam kerangka pemberdayaan masyarakat seperti memberikan pelatihan dan pembentukan organisasi yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun, kemudian memberikan pelatihan kesehatan mandiri dan pembentukan kelompok yang kemudian bertanggung jawab terhadap persoalan kesehatan sehari-hari di kampung mereka, melakukan diskusi terkait program pembangunan desa di tingkat kecamatan serta menjembatani pihak kampus khususnya Universitas Indonesia dengan masyarakat desa dalam rangka studi Sosiologi Perdesaan.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa dalam satu penelitian kualitatif terutama dengan metode etnografi, tidak ada satu rentang waktu yang baku dalam menggali informasi atau data penelitian. Sesungguhnya data dan informasi bisa diperoleh dimana saja dan kapan saja. Ini yang saya katakan bahwa data di lapangan dalam satu studi etnografi pada dasarnya berserakan, tergantung bagaimana kita mampu membahasakan dan menyajikannya secara sistematis.

3.4. Analisa: Triangulasi dan Kekuasaan Sang Informan

Analisa informasi dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses pengumpulan informasi (*on going analysis*) dengan menggunakan teknik analisa informasi yang lazim berlaku dalam penelitian kualitatif. Proses analisa informasi dalam penelitian kualitatif mencakup pengujian (*examining*), pemilihan, kategorisasi, evaluasi, membandingkan, melakukan sintesa, dan merenungkan kembali informasi (*completing the coded informasi*) yang dilakukan secara siklikal untuk membangun inferensi-inferensi, menguji kembali inferensi dan kemudian menarik kembali kesimpulan (Neuman 1997). Dalam istilah Neuman metode analisis yang berlangsung siklikal memberi peluang untuk terus menerus melakukan pengujian konsep dengan informasi-informasi dan bukti secara berulang-ulang untuk menemukan inferensi dan teori baru di sebut *successive approximation*. Selain itu, karena proses pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan beberapa konsep yang ada sebelumnya tentang sejarah sosial dan bentuk-bentuk relasi kekuasaan, maka proses analisis informasi akan

dilakukan juga dengan menggunakan metode ilustratif (*illustrative method*) dalam pengertian yang longgar. Dengan metode ilustratif peneliti mencoba menerapkan teori kepada suatu *setting* sosial atau situasi historikal yang kongkrit, atau mengorganisasikan informasi berdasarkan basis teori utama (*lihat* Neuman, 1997).

Merujuk pada penjelasan Geertz mengenai *thick description*, maka dapat kita katakan bahwa riset kualitatif seperti ini, dalam pengertiannya adalah etnografi itu sendiri. Analisis dalam penelitian seperti ini lebih mengarah pada interpretasi akan sesuatu hal untuk mencari makna yang sesungguhnya. Dalam penjelasannya pun mestilah menguraikan ekspresi-ekspresi sosial yang ditemukan dalam ucapan-ucapan yang dipermukaan membingungkan.

*...and the analysis of it to be therefore not an experimental science in search of law but an interpretive one in search of meaning. It is explication I am after, construing sosial expressions on their surface enigmatical.*²⁹

Dengan kata lain peneliti mesti memahami betul subyek dalam penggalian informasi sehingga dapat dengan jelas diketahui bagaimana posisi subyek tersebut di masyarakat. Informasi-informasi seperti ini tidak bisa diperoleh hanya dengan mendatangi sekali atau dua kali informan. Lebih jauh adalah penggalian atas identitas informan menjadi sangat penting. Mengetahui *track record* informan bisa digunakan sebagai kerangka awal dalam memahami makna yang sesungguhnya dari informasi yang diberikan oleh informan.

Pertanyaan penting terkait dari analisa informasi adalah bagaimana metode triangulasi dilakukan ketika data-data yang ditemukan bersifat sensitif untuk ditanyakan kembali kepada informan. Disini peneliti menggunakan beberapa strategi untuk mengetahui kebenaran akan informasi yang diberikan. Contohnya adalah ketika seorang petani penggarap yang tengah merekonstruksi identitas barunya, ia seperti enggan untuk menjelaskan perihal sejarah keberadaan keluarganya di desa ini sehingga banyak informasi-informasi meragukan yang kemudian dimunculkan seolah-olah sejak awal dia merupakan warga asli desa ini. Informasi seperti ini kemudian oleh peneliti dilontarkan kembali kepada orang-

²⁹ Ibid, hal-33

orang yang kemudian bertemu dengan peneliti dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Bukan saja dalam kesempatan wawancara atau diskusi. Justru yang paling efektif adalah melontarkan informasi ini dalam forum-forum obrolan dengan warga desa. Biasanya warga lain akan memberikan respon yang beraneka ragam atas setiap informasi yang kita lontarkan mengenai tetangganya. Dari situ kemudian kita bisa mengetahui apakah informasi yang sebelumnya diterima adalah satu kebenaran atau hanya upaya untuk membelokkan persepsi peneliti terhadap subyek yang tengah diteliti.

Dari penjelasan itu kita bisa menarik satu kesimpulan kecil terkait metode triangulasi yang diterapkan dalam satu penelitian kualitatif, bahwa, ketika data dalam satu penelitian lapang kualitatif sifatnya seolah terserak dimana-mana, maka triangulasi tidak saja bisa dilakukan dengan melakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan informasi yang sedang digali, melainkan bisa dengan melontarkan informasi yang meragukan itu ke dalam pembicaraan-pembicaraan kecil antar warga desa. Namun demikian hal itu bukan tanpa syarat, karena kita mesti mampu melampaui terlebih dahulu kecanggungan-kecanggungan yang membatasi peneliti dengan subyek penelitian.

Selain itu kita juga bisa melihat bahwa informan dalam menyampaikan informasi yang terkait dengan dirinya atau orang lain, pada praktiknya tidak hanya sekadar memberikan informasi. Mereka juga berusaha untuk menggiring peneliti ke dalam satu realitas yang berusaha dikonstruksi olehnya. Dengan kata lain, informan juga memiliki kekuasaan atas informasi yang diberikan. Dibalik informasi itu, informan memiliki kebutuhan agar peneliti tidak mendapatkan satu kesimpulan yang negatif berkait dengan dirinya atau keluarganya. Bahkan dalam beberapa kesempatan, peneliti mendapati bagaimana para informan berusaha menggunakan peneliti sebagai satu medium untuk membangkitkan sentimen-sentimen kecil atas ketidaksukaan informan terhadap warga atau orang lain. Oleh karenanya dibutuhkan kehati-hatian dari peneliti untuk bisa menangkap fenomena apa yang tengah terjadi di masyarakat agar peneliti tidak terjebak dalam satu setting sosial

yang justru akan mengkerangkeng interpretasi peneliti atas realitas sosial yang tengah dilihat.³⁰

3.5. Memahami Bahasa Lokal

Dalam melakukan satu penelitian lapang yang menggunakan pendekatan kualitatif, bahasa menempati posisi yang paling penting. Dari mulai catatan lapangan atau jurnal harian, sampai analisis yang akan kita kembangkan dalam tulisan, bahasa menyerap pertemuan kita dengan informan (Spradley 2006)³¹. Pada penelitian ini, bahasa yang kerap digunakan oleh peneliti ketika berhubungan dengan informan dapat dikategorikan menjadi dua, yakni bahasa Indonesia sehari-hari dan bahasa Sunda Bogor. Ketika berhadapan dengan informan, bahasa Indonesia mendominasi percakapan atau diskusi. Namun dalam melihat fenomena keseharian orang-orang di kampung ini, bahasa Sunda menjadi faktor yang sangat penting, karena gosip-gosip sehari-hari masyarakat, cacian atau celaan yang memiliki pemaknaan tertentu dalam interaksi sosial di masyarakat lebih banyak menggunakan bahasa Sunda. Beruntung sekali peneliti memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa Sunda dengan cukup memadai. Meski peneliti bukan orang Sunda, namun tinggal dan menetap di Bogor selama 10 tahun lebih telah membantu memperlancar kemampuan bahasa Sunda peneliti.

Penemuan yang sangat penting yang terkait dengan bahasa adalah, diperolehnya catatan wawancara yang pernah dibuat oleh seorang mantan Jaksa di Kota Bogor. Catatan wawancara yang intinya berkisah mengenai silsilah keturunan satu keluarga besar di desa ini dalam penjelasannya ternyata menyimpan informasi-informasi penting mengenai masa lalu masyarakat desa. Catatan itu diketik rapi dengan menggunakan mesin ketik manual. Bahasa yang digunakan dalam mewawancarai dan menulis catatan itu adalah bahasa Sunda.

³⁰ Dalam satu penelitian mengenai potret otonomi desa yang dilakukan oleh peneliti di dataran tinggi Bandung, pernah satu ketika peneliti terjebak dalam apa yang dinamakan *kerangkeng interpretasi*. Dikarenakan peneliti tidak mengenal betul daerah yang diteliti, dan mendapatkan kontak-kontak informasi dari pihak ketiga. Upaya ini mesti disadari sejak awal dan dalam menyiasatinya peneliti mesti mencari kesempatan untuk bisa melepas belenggu yang berusaha dibangun oleh subyek dalam penelitian ini.

³¹ Bahasa lebih dari sekedar alat untuk mengkomunikasikan realitas. Bahasa merupakan alat untuk menyusun realitas. Bahasa yang berbeda akan menciptakan dan mengekspresikan realitas yang berbeda. Bahasa yang berbeda akan mengkategorikan pengalaman dalam cara yang berbeda. Bahasa yang berbeda memberi pola-pola alternatif untuk berpikir dan memahami. James P. Spradley. *Metode Etnografi*, Tiara Wacana, 2006

Oleh karena itu dalam mengajukan pertanyaan kepada para informan, peneliti kerap mencampur-campur bahasa yang digunakan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda. Harapan yang paling penting dari penggunaan bahasa Sunda oleh peneliti adalah semakin dekatnya hubungan antara peneliti dengan informan, sehingga kemungkinan peneliti untuk memperoleh informasi-informasi penting yang sensitif bisa lebih besar. Terkadang, informan yang memang sama sekali tidak kenal dengan peneliti, akan lebih mudah diwawancarai dan lebih terbuka ketika dia diajak berkomunikasi dengan bahasa sehari-harinya. Disini, bahasa bisa lebih mendekatkan peneliti kepada informan. Pada salah satu bahasan tesis ini, sedikit akan disinggung perihal stratifikasi bahasa dalam masyarakat sunda.

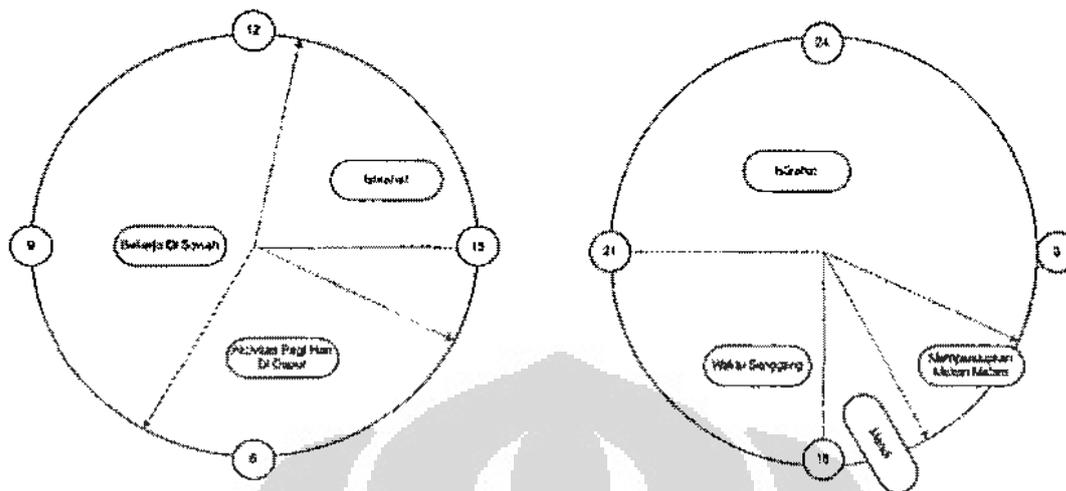
3.6. Memahami Kalender Harian Petani

Dalam mencari informasi terkait persoalan-persoalan yang dialami masyarakat, khususnya masyarakat petani, maka hal yang menurut saya penting adalah memahami secara benar siklus hidup para petani kecil yang cukup terjadwal, sehingga kita tidak menemui kesulitan untuk menelusuri informasi ataupun melakukan wawancara kepada mereka.

Pola hidup para petani kecil cukup teratur, berbeda dengan petani besar, tuan tanah serta para elit desa lain yang memiliki kesempatan, baik waktu, tenaga maupun pendanaan untuk melakukan aktivitas selain urusan sawah mereka. Para petani kecil ini mau tidak mau mesti mengatur hidupnya secara cermat karena kepastian akan hari esok mereka adalah kepastian bahwa mereka harus bekerja demi mendapatkan upah untuk membiayai kebutuhan harian mereka. Sekali mereka tidak bekerja, maka kepastian yang datang adalah kesulitan-kesulitan membiayai hidup mereka selama satu-dua hari ke depan. Kesulitan-kesulitan mendasar seperti tidak mampu membeli beras, membeli lauk pauk dan sayuran, membeli minyak tanah, memberi jajan anak-anaknya, menyicil hutang di warung dan kebutuhan-kebutuhan mendasar lainnya. Kita bisa membandingkan dengan para petani kaya pemilik tanah besar. Mereka kebanyakan adalah orang-orang yang karang sekali datang ke sawah apalagi bekerja di sawah mereka. Orang-orang seperti mereka lebih banyak menugaskan klien-kliennya untuk mengerjakan sawah, dan diakhir memiliki kekuasaan untuk menentukan berapa yang akan diperoleh oleh kliennya dan berapa yang akan diambil oleh dirinya

beserta keluarganya. Dengan situasi seperti ini, para petani kaya lebih memiliki kemampuan untuk menciptakan kesempatan baru ataupun memanfaatkan peluang-peluang ekonomi yang ada di hadapan mereka. Waktu luang mereka seringkali digunakan untuk kegiatan-kegiatan bisnis seperti membuka warung atau toko di pasar, ikut serta dalam rapat-rapat pembangunan di alai desa, menjadi pengurus partai politik atau menjadi tim sukses salah satu calon kepala daerah atau calon anggota legislative karena mereka dipandang memiliki banyak klien-klien yang setia.

Kenyataan bahwa para buruh tani harus hidup dengan siklus yang cukup tetap, saya jumpai di dalam penelitian ini. Oleh karenanya dalam menelusuri informasi hal yang menurut saya penting adalah menyesuaikan diri dengan subyek penelitian. Dalam konteks ini, kegiatan rutin para buruh tani tentu saja menjadi patokan bagi saya untuk bisa menghampiri dan berdiskusi dengan mereka. Jikalau ada keharusan bagi saya untuk ikut dalam aktivitas mereka, maka penting untuk saya pastikan kegiatan apa yang akan mereka lakukan di pagi hari, siang hari ataupun malam harinya. Dari sisi metodologi tentu saja penelitian mengenai kelompok petani miskin di perdesaan mensyaratkan waktu-waktu khusus untuk bisa berdiskusi dan berbicara dengan mereka. Masing-masing wilayah kemungkinan besar memiliki karakteristiknya sendiri. Antara wilayah pegunungan dengan wilayah pesisir tentu memiliki perbedaan dalam hal jadwal harian masyarakatnya. Jenis matapencapaian juga tentu saja berpengaruh. Petani pasti berbeda siklus hidupnya dengan nelayan. Siklus hidup yang cukup teratur pada kalangan petani ini kemudian saya sebut sebagai kalender harian buruh tani. Dari identifikasi ini saya bisa mengetahui waktu-waktu yang cukup luang bagi para petani untuk bisa saya ajak ngobrol dan berdiskusi, termasuk batasan-batasan waktu yang mesti saya ketahui ketika diskusi itu dilakukan. Batasan waktu ini penting mengingat kelompok petani kecil seperti ini sesungguhnya sangat cermat dalam menghitung pengeluaran tenaga. Kecermatan ini berangkat dari keterbatasan asupan kalori yang mereka bisa konsumsi, sehingga tenaga yang dikeluarkan harus betul-betul dihemat sedemikian rupa sehingga itu cukup sampai ada asupan kalori selanjutnya.



Gambar 2. Kalender Harian Buruh Tani

Berdasarkan bagan diatas, dapat kita ketahui bahwa aktivitas para petani kecil ini dimulai dari pukul empat dinihari. Mereka mulai dengan melakukan aktivitas di dapur memepersiapkan sarapan pagi, memasak nasi, memasak air panas, mencuci pakaian untuk buruh tani yang wanita serta mandi. Selanjutnya dari pukul tujuh pagi mereka mulai berangkat ke sawah untuk bekerja. Pekerjaan di sawah dilakukan sampai kira-kira pukul dua belas siang, atau istilah kampungnya, *sabedug*. Setelah itu masuk jam satu siang mereka istirahat sampai kira-kira jam tiga sore atau menjelang ashar. Kemudian setelah pukul tiga sore, mereka akan melakukan aktivitas seperti mencari atau mempersiapkan kayu bakar, belanja beberapa keperluan untuk makan malam seperti beras dan lauk-pauk serta memasak untuk makan malam. Sekitar jam lima sore adalah waktu bagi mereka untuk mandi dan bersih-bersih. Selanjutnya masuk pukul enam sore, setelah mereka selesai sholat maghrib, mereka masuk waktu senggang. Di waktu ini biasa mereka habiskan dengan berbincang-bincang bersama keluarga di dalam atau di teras rumah. Untuk anak-anak petani, waktu ini seringkali mereka gunakan untuk bermain bersama teman-temannya setelah sebentar mereka belajar. Kira-kira jam Sembilan atau sepuluh malam, mereka kemudian istirahat untuk bekerja lagi keesokan harinya.

Dari gambaran aktivitas rutin diatas, kiranya saya sebagai peneliti mesti memanfaatkan betul waktu-waktu yang saya kategorikan sebagai waktu senggang para petani. Waktu senggang itu, bisa di antara jam satu sampai jam tiga siang diaman mereka tengah beristirahat selesai bekerja di sawah, atau waktu senggang diatas jam enam malam. Di waktu-waktu ini percakapan dan diskusi bisa agak lebih tenang dan tidak mengganggu pekerjaan serta aktivitas mereka. Kalender harian ini pada dasarnya diperlukan juga bagi mereka-mereka yang memiliki keinginan untuk melakukan program-program pemberdayaan keluarga yang tidak mengganggu aktivitas keseharian para petani. Di waktu-waktu senggang itulah, kita bisa melakukan sosialisasi atas satu program, atau memberikan keterampilan kepada ibu-ibu dalam rangka menambah pendapatan keluarga.



BAB IV. DESA DAN SEJARAH SOSIALNYA

4.1. Akses Jalan dan Problem Angkot

Desa ini bernama Cimandiri. Menuju kesini bisa dicapai dengan angkutan umum ataupun kendaraan pribadi, karena jalan dari dan ke desa ini sudah sangat baik, diaspal halus meski tergolong sempit. Dari Kota Bogor menuju ke desa ini bisa lewat dua arah, yang pertama lewat Bubulak, sedang yang kedua lewat Ciomas. Lewat Bubulak jaraknya jauh lebih dekat namun waktu tempuhnya bisa sangat lama karena kemacetan yang bisa sangat parah. Sedangkan apabila lewat Ciomas, jaraknya lumayan agak jauh namun kita bisa lebih cepat dikarenakan potensi kemacetannya masih relative lebih kecil ketimbang jika kita lewat Bubulak. Angkutan kota berwarna biru muda tersedia dari semenjak pagi hari sekitar pukul 05.00 sampai pukul 21.00. Dari Bubulak ongkosnya Rp. 3500 sampai dimuka kantor desa, sedangkan jika dari arah Ciomas, perlu ditambah ojek sekitar Rp. 3000 dari pangkalan angkotnya. Pada pagi dan siang hari, kita tidak perlu khawatir kekurangan angkot, karena kapasitas muatan angkot di Bogor jauh berada diatas kapasitas penumpang yang ada, sehingga kebanyakan angkot kosong. Satu industri jasa yang berada di ambang kebangkrutan karena tata kelola pemerintah daerah dalam perizinan dan pembukaan trayek angkutan sangat buruk sekali. Korbannya tentu saja para sopir angkot yang semakin merasa kesulitan untuk membayar setoran kepada pemilik angkot karena selain harga BBM mahal, jumlah saingan yang tidak rasional serta penumpang yang sangat sedikit. Dan yang paling diuntungkan dalam struktur produksi bisnis transportasi angkot adalah *pertama*, para pemilik angkot yang tidak lain adalah elit-elit lama serta pensiunan birokrat dinas perhubungan, *kedua* oknum-oknum pemerintah daerah yang mendapat *fee* dari para pemilik angkot dan dealer mobil atas dibukanya izin dan trayek baru, *ketiga*, agen penjual serta lembaga keuangan penjamin kredit mobil yang hidup dari bunga kredit yang diangsur oleh pemilik angkot serta yang *terakhir* dan paling besar untungnya adalah perusahaan pembuat mobil yang digunakan untuk angkot, diantaranya adalah Suzuki.

Bagi Kota dan Kabupaten Bogor sendiri, angkutan kota merupakan pekerjaan rumah yang sampai sekarang tidak terselesaikan karena tidak pernah dipahami secara menyeluruh bagaimana struktur produksi system per-angkutan yang sangat timpang dan eksploitatif bagi orang-orang miskin yang bekerja menjadi sopir angkot. Hampir di setiap mulut jalan/gang di sepanjang jalan raya yang menghubungkan Kota dan Kabupaten Bogor, terdapat angkot yang *ngetem*. Situasi ini kemudian memperparah kondisi kemacetan yang hampir setiap saat terjadi. Tidak terkecuali di daerah Caringin, di mulut jalan menuju daerah Cimandiri. Disini banyak terdapat angkot yang *ngetem* untuk menunggu penumpang. Di titik inilah kemacetan panjang biasa terjadi, karena kendaraan yang ingin menuju atau keluar ke jalan itu menjadi terhambat.

Jauh dari lokasi itu, di pusat desa dekat masjid dan balai desa, juga banyak terdapat angkot yang *ngetem* menanti penumpang. Angkot yang *ngetem* di tempat ini jumlahnya cukup beragam. Di pagi hari biasanya sedikit angkot yang *ngetem* karena penumpang relatif banyak dengan frekuensi yang cukup tinggi. Para penumpang, adalah warga Cimandiri yang bertujuan ke pasar ataupun ke tempat bekerja mereka. Keramaian ini mulai berjalan sejak jam 4 pagi, namun, lewat jam 9 pagi penumpang telah berkurang sangat drastis, sehingga di jam-jam ini, para supir angkot yang telah keluar sejak pagi biasa *ngetem* atau mangkal di tempat ini -- salah satunya -- untuk beristirahat atau sarapan pagi. Hanya satu-dua angkot yang berjalan. Kondisi ini bisa berlangsung sampai tengah hari, sekitar jam 12 siang, situasi agak berubah, biasanya tidak banyak angkot yang *ngetem*, karena jam-jam ini adalah jam anak sekolah pulang. Sekitar jam dua sampai jam tiga, kembali para supir angkot yang biasanya sudah berganti (*aplusan*) memilih untuk *ngetem*. Menjelang sore, mereka kembali jalan, untuk mengangkut warga Cimandiri yang pulang dari bekerja. Sementara di malam hari sangat jarang angkot yang *ngetem* karena penumpang sudah sangat jarang. Hanya satu-dua angkot yang berjalan, itupun hanya sampai jam 10 malam, setelah itu akan sulit untuk mencari angkutan umum di tempat ini.



Gambar 3. Pangkalan Angkot

Persoalan angkot ini mengingatkan saya pada satu penjelasan klasik Geertz mengenai masyarakat petani di Indonesia. Dalam analisisnya yang cukup terkenal mengenai kemiskinan bersama (*shared poverty*) Geertz menjelaskan bahwa usaha tani yang bersifat involutif ditandai dengan tingkat produktivitas yang tidak menaik bahkan memiliki kecenderungan yang menurun telah berakibat pada pembagian rezeki yang semakin rendah kepada semua. Dengan kata lain, involusi pertanian telah menyebabkan kesulitan-kesulitan hidup yang dialami oleh para petani disebarluaskan oleh mereka sendiri kepada orang lain akibat adanya satu keyakinan atau tata nilai yang diyakini oleh masyarakat desa – terutama kaum abangan – dan diinternalisasikan dalam keluarga-keluarga petani. Sementara Sajogyo lebih melihat bahwa, dalam masyarakat desa itu tentu saja kadar atau kualitas kesulitannya tidak bisa disebar secara merata kepada seluruh petani. Dalam konteks petani perdesaan Indonesia, tentu saja kelompok petani miskinlah yang mengalami kesulitan paling besar. Proses membagi kemiskinan hanya dilakukan oleh kelompok petani miskin. Sedangkan mereka yang tergolong seagai petani kaya, tetap mampu mempertahankan kekayaannya dengan cara mengkapitalisasi ketiadaan alat produksi petani miskin di desa. Dari penjelasan itu, lantas dimana relevansinya dengan angkot yang saat ini menjamur di Bogor.

Saya kira, pola aplusan yang dilakukan oleh para sopir angkot sendiri bisa dikatakan sebagai satu strategi bagi orang miskin di Bogor untuk membagi pendapatan mereka kepada orang miskin yang lain. Seperti dijelaskan diatas, bahwa pihak yang mengambil keuntungan paling besar dalam industri per-angkotan berdasarkan stratifikasinya adalah perusahaan besar seperti SUZUKI.

Sementara yang berada pada lapisan paling bawah adalah supir-supir angkot yang tidak lain adalah orang desa atau orang kota yang tergolong miskin dan tidak memiliki alat produksi lain selain tenaga. Ketika kepemilikan motor semakin hari semakin murah dan cepat, banyak penumpang angkot beralih ke sepeda motor. Konsekuensinya adalah produktivitas supir angkot menjadi turun dikarenakan kekurangan penumpang. Sementara ketika lapangan pekerjaan semakin sulit, jumlah supir angkot semakin bertambah. Situasi yang menurut pendapat saya setali tiga uang dengan apa yang terjadi di ranah pertanian. Ketika produktivitas lahan pertanian tidak mengalami peningkatan, sementara jumlah buruh tani semakin hari semakin banyak, pendapatan yang relatif tetap itu kemudian dibagi kepada buruh tani yang lain sehingga pendapatan seorangnya menjadi berkurang. Disini bisa dikatakan, dalam kasus angkot di Bogor, polanya mengikuti involusi dalam masyarakat pertanian.

Untuk ukuran desa, aksesibilitas jalan disini cukup baik. Selain jalan kecamatan, jalan desa di tempat ini juga sangat memadai. Hampir seluruh jalan desa telah diaspal, meski beberapa ruas jalan desa banyak yang berlubang karena perawatannya kurang baik, hal ini seperti terlihat pada jalan desa di Cisepuhan dan Bukit Petir. Di wilayah ini jalan desa yang semula telah diaspal sudah mulai banyak yang berlubang karena tidak terawat dengan baik, begitu juga jalan lingkaran desa di wilayah Cimandiri Kulon yang melintasi perbatasan Desa Cimandiri dengan Sukadama telah cukup banyak lubangnya, padahal 2 tahun lalu masih cukup baik. Saat ini bahkan pemerintah desa tengah membangun jalan lingkaran yang menghubungkan Cimandiri Kulon dengan Bukit Petir. Jalan ini sebelumnya dibuka oleh desa atas partisipasi warga untuk bergotong royong, sementara untuk pengerasannya dilakukan baru pada dua tahun belakangan ini dengan menggunakan dana dari pemerintah daerah, melalui program Imbal Swadaya. Meski menurut pengakuan Pak Rokib, Lurah Cimandiri yang sekarang, program ini sedikit mengalami hambatan akibat belum selesainya pilkada Kab. Bogor dan berlanjut pada putaran kedua. Yang unik dari pembangunan jalan di daerah ini adalah bahwa beberapa jalan di desa ini dibuat dengan menggunakan dana-dana *privat* ataupun dana bantuan dari pihak luar. Contohnya saja jalan desa dari pusat desa (Cikampak) menuju Cimandiri Ilir, dibangun oleh seorang warga desa

Cimandiri yang tinggal di wilayah Bobojong Kampung Cimandiri Ilir. Dia adalah Arifin, seorang pendatang yang berprofesi sebagai pengusaha yang cukup berhasil, dia kemudian membiayai pengaspalan jalan sepanjang kurang lebih 800 meter. Soal Arifin sendiri ada beberapa hal yang cukup menarik, selain sebagai pengusaha, dia adalah pimpinan dari satu aliran agama Islam di kampung ini. Aliran yang dalam beberapa ritualnya memiliki perbedaan dengan agama induknya yakni Islam. Namun demikian, anehnya, di kampung atau desa ini, tidak pernah ada konflik ataupun ketegangan menyangkut keberadaan aliran ini. Arifin sendiri tinggal di kampung ini dengan membuat kompleks tempat tinggal sendiri bersama beberapa orang pengikutnya yang berasal dari berbagai wilayah seperti dari Jakarta atau Bandung. Dari pengamatan dan pembicaraan saya dengan masyarakat tidak ada keresahan-keresahan yang dirasakan oleh warga, padahal kampung ini mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Pusat dari aliran ini sendiri konon ada di Tanjung Priok, dipimpin oleh seorang ulama yang cukup terkenal. Namun demikian, selain pernah membangun jalan, Arifin juga rutin setiap tahun menyumbangkan puluhan ekor kambing untuk disembelih pada saat hari raya Idul Adha di masjid kampung. Dalam kaitan ini lagi-lagi saya teringat pada pengalaman Anthlov dalam melihat satu kelompok aliran agama yang ada di desa tempat dia melakukan penelitian, dia katakana bahwa afiliasi dan patronase keagamaan telah membuka jalan bagi terbentuknya pemukiman gabungan dari sejumlah keluarga yang bersekutu secara politik dan sepakat memisahkan diri dari tetangga-tetangga yang lain. Pemukiman seperti ini memiliki keyakinan politik serta aliran agama yang sama dan berinteraksi secara dekat.³²

Kemudian jalan lingkaran luar di wilayah Cimandiri Kulon yang melintasi perbatasan Cimandiri dan Sukadamai, diperkeras dengan menggunakan beton, melalui sumbangan seorang anggota DPRD dari Fraksi PPP, yang kebetulan saat ini ikut serta dalam pilkada menjadi calon bupati, yakni Rahmat Yasin. Yang lainnya, adalah jalan desa yang masih berupa jalan setapak, yang dibuat untuk membuka keterisolasian wilayah Cimandiri Udik, jalan ini yang semula adalah *galengan* sawah kini telah dibetonisasi dengan sangat baik menggunakan bantuan dana dari sebuah lembaga pangan dunia melalui satu organisasi non pemerintah,

³² Ibid – 217

Yayasan Kekal. Semua ini menunjukkan bahwa dalam perjalanannya, desa ini telah mengalami bentuk-bentuk intervensi pembangunan yang bukan saja berasal dari pemerintah tetapi juga dari pihak luar pemerintah. Dengan kata lain, disamping potensi lokal desa yang cukup besar, potensi yang berupa jaringan cukup memadai untuk dikembangkan.

4.2. Balai Desa dan Rumah Mantan Kepala Desa

Desa Cimandiri terletak di Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Dibelah oleh jalan kecamatan yang kondisinya masih cukup baik, Cimandiri berbatasan dengan Desa Sukadamai dan Kecamatan Ciomas. Pusat desa terletak di tepi jalan ini, tepatnya di Kampung Cikampak. Di pusat desa ini terdapat balai desa yang telah terbangun dengan baik, bahkan saat saya kembali ke tempat ini, di dekat balai desa sedang dibangun sarana kesehatan berupa puskesmas pembantu untuk desa. Nantinya puskesmas ini akan melayani warga Cimandiri yang sebelumnya harus ke Ciberang untuk memeriksa kesehatannya atau paling tidak berobat ke bidan desa yang telah lama ada di sini. Bangunan balai desa terdiri dari ruangan untuk kepala desa, ruangan sekretaris desa, para kaur (kepala urusan) serta aula untuk pertemuan warga di bagian belakang. Balai desa juga telah dilengkapi dengan kamar mandi. Untuk ukuran desa, balai desa di Cimandiri sudah cukup representatif. Berbeda dengan 4-5 tahun yang lalu, balai desa di tempat ini masih sangat sederhana, bangunan lama yang langit-langitnya tidak memiliki eternit, langsung terlihat genting dengan kayu-kayu yang malang melintang di mana-mana, terkesan kusam.

Soal balai desa sebetulnya memiliki sejarah tersendiri. Berdasarkan pengakuan dan keterangan seorang informan, balai desa Cimandiri baru ada ketika masa kepemimpinan Lurah Amir. Di tahun 1986 berdasarkan catatan Ahmadi³³, Lurah Amir adalah lurah yang ke-11. Lurah-lurah sebelumnya berkantor di rumah masing-masing. Dari sisi tempat bertugas, terlihat perbedaan peranan dan fungsi dari kepala desa dibandingkan dengan birokrat pemerintahan yang lain, seperti camat atau bupati. Kepala desa yang berkantor di rumah, selain menunjukkan

³³ Mantan Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan (Kaur Ekbang) pada masa kepemimpinan Lurah Herman sampai Lurah Rokib. Mundur dari jabatan tersebut dikarenakan adanya tawaran bekerja di Jakarta. Ahmadi memiliki beberapa dokumentasi – catatan wawancara dan foto-foto lama – penting terkait kesejarahan Cimandiri.

ketiadaan sarana penunjang pekerjaan, sekaligus memperlihatkan bahwa kerja kepala desa tidak terbatas, artinya dia bisa bekerja kapan saja dan masyarakat bisa menghubungi dia kapan saja. Tidak ada batasan waktu bagi kepala desa dalam urusan melayani masyarakat. Disini juga terlihat bahwa ada relasi yang lebih cair antara pemimpin dan yang dipimpin. Masyarakat bisa setiap saat meminta kepada kepala desa untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Coba kita bandingkan dengan camat atau bupati misalnya.

Lokasi kantor desa atau balai desa tepat berada di pusat desa. Fenomena lain yang cukup menarik adalah ketika saya mengetahui bahwa tepat di belakang balai desa terdapat rumah mantan kepala desa. Lurah Herman, kepala desa yang ke 15, menjabat sebagai lurah pada periode 1999-2004, dia adalah kepala desa Cimandiri sebelum Lurah Rokib – kepala desa yang sekarang. Bangunan yang tergolong cukup baik untuk ukuran desa itu berdiri tepat di belakang balai desa, bercat kuning, dengan tegel lantai berwarna merah hati, memiliki teras di depannya. Berdasarkan keterangan dari beberapa orang warga, rumah ini adalah memang milik Pak Herman. Rumah ini dibangun ketika dia menjabat sebagai kepala desa.



Gambar 4. Balai Desa

Sebelum menjadi kepala desa, Pak Herman adalah sekretaris desa. Dia menjadi staf desa semenjak kepemimpinan Lurah Amir. Jika ditilik dari factor kesejarahan dan keturunan, maka Pak Herman termasuk salah seorang keturunan elit lama desa. Berdasarkan pengakuannya dan keterangan dari beberapa orang informan plus catatan kecil yang dibuat oleh Ahmadi, Pak Herman adalah cucu dari Irin Ailah, seorang kepala desa pada masa kolonial. Pak Herman sendiri telah empat kali mencalonkan diri sebagai kepala desa, baru pada pilkades 1999, pasca

reformasi, dia mampu memenangi pertarungan dan menjadi kepala desa sampai tahun 2004. Meskipun posisi rumahnya tepat dibelakang kantor desa, namun demikian tidak ada kontroversi atas fenomena itu, wargapun cukup percaya dan tidak mempermasalahkan keberadaan rumahnya.

4.3. Perumahan dan Permukiman Penduduk

Selain balai desa, di pusat desa juga terdapat masjid desa yang kondisinya cukup baik. Kemudian beberapa warung kelontong, warung nasi, warung bakso, kios penjual *voucher* pulsa *handphone*, serta bengkel las. Di pusat desa ini juga sekaligus dipakai sebagai pangkalan angkot terakhir dari terminal Bubulak atau Laladon. Beberapa tukang ojek juga ada yang *mangkal* di tempat ini, mereka menyediakan jasa antar ke tempat-tempat yang tidak dimasuki oleh angkot, seperti ke arah Kampung Cimandiri Kulon, Cimandiri Ilir, Bukit Petir dan Cisepuhan. Tentu saja pada prosesnya kelompok yang mampu membuka usaha di tempat ini adalah mereka yang tinggal dekat dengan pusat desa, terutama di Kampung Cikampak. Kondisi perumahan di tempat ini sudah sangat berkembang. Di pinggir jalan banyak terdapat rumah-rumah lama yang kondisinya cukup baik, sudah dibangun dengan tembok, bukan lagi bilik. Baik yang ukurannya kecil maupun besar, mereka telah membangunnya dengan semen dan batu. Letak rumah kelihatan sangat rapat satu sama lain, bahkan cenderung tidak ada ruang diantara rumah. Areal yang dijadikan sebagai wilayah permukiman dari pinggir jalan kira-kira sampai 30 meter ke arah dalam, selanjutnya adalah kebun dan sawah. Kondisi rapatnya rumah warga ini banyak disebabkan oleh struktur genealogis masyarakatnya. Mereka yang tinggal berdekatan biasanya masih ada hubungan famili satu sama lain. Tanah tempat mereka mendirikan bangunan tempat tinggal kebanyakan adalah tanah warisan turun temurun dari orang tuanya sehingga lokasinya cenderung berdekatan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 7327 jiwa, serta luasan areal 246,380 Ha, dimana 183,160 Ha adalah lahan persawahan dan 63,220 Ha adalah lahan darat, kiranya Cimandiri termasuk desa yang cukup padat penduduknya.

Di pusat desa lebih banyak rumah yang terbuat dari tembok, sangat jarang dijumpai rumah yang terbuat dari bilik. Tetapi jika kita mulai agak masuk ke dalam, maka masih banyak kita menjumpai rumah-rumah yang terbuat dari bilik

bambu, ataupun yang setengah permanen, setengah masih bilik. Memang rumah-rumah yang terbuat dari bilik bambu tidak ada yang letaknya di pinggir jalan desa, kita mesti agak lebih dalam menjauh dari jalan desa, baru rumah-rumah itu bisa kelihatan. Kondisinya pun tidak sama, ada rumah bilik yang masih dalam kondisi baik, sementara ada juga yang kondisinya sudah sangat buruk, reyot dan menyedihkan. Mengenai letaknya, tidak jauh berbeda dengan yang berada di dekat pusat desa. Rumah-rumah saling berdekatan dan mengelompok, masing-masing kelompok dipisahkan oleh sawah atau ladang. Sangat jarang sekali rumah yang sekaligus berada di areal sawah atau ladangnya. Kebanyakan dari warga memiliki sawah atau ladang jauh dari rumahnya. Mengenai keberadaan rumah-rumah bilik yang rusak atau reot, ingatan saya kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Robert Chambers dalam salah satu bukunya yang berbicara soal kemiskinan di perdesaan. Mencari atau meneliti isu kemiskinan di perdesaan, seringkali para peneliti atau perencana pembangunan terjebak dalam prasangka-prasangka yang kadang menyesatkan, yaitu, prasangka kota.³⁴ Oleh karenanya, penting untuk para peneliti ataupun perencana pembangunan desa untuk masuk ke wilayah-wilayah yang seringkali luput dari penglihatan.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, masyarakat biasa mengandalkan warung-warung kecil yang berada hampir di setiap kelompok pemukiman. Tukang sayur keliling juga setiap pagi mendatangi rumah-rumah penduduk untuk menjual barang dagangannya. Si Tukang Sayur sendiri bukanlah orang luar desa, dia masih warga Cimandiri yang setiap pagi belanja sayuran di Pasar Caringin, Darmaga, untuk kemudian menjajakan keliling kampung. Hanya mereka yang memiliki warung atau berdagang makanan saja yang setiap hari mesti pergi ke pasar. Bagi masyarakat biasa, pergi ke pasar setiap hari bukanlah satu pilihan, karena meski hanya dengan ongkos Rp. 4000 mereka bisa berangkat-pulang pasar, namun jika belanjanya tidak banyak, bagi mereka itu kurang efisien. Dengan kata

³⁴ Dalam penjelasan Chambers di bukunya *Pembangunan Desa; Mulai Dari Belakang*, kiranya soal prasangka keruangan para peneliti ataupun perencana pembangunan desa menjadi penting untuk diperhatikan. Chambers menekankan betapa prasangka-prasangka itu bisa menghindari orang-orang luar desa dari realitas kemiskinan yang sesungguhnya. Dia mengatakan bahwa seringkali "pengetahuan tentang kondisi daerah pedesaan diperoleh dari atas kendaraan". Artinya para peneliti ataupun perencana pembangunan seringkali enggan memasuki wilayah-wilayah yang tidak memiliki akses jalan yang baik sehingga kelompok warga miskin yang biasanya berada di areal-areal yang sulit diakses jalan luput dari penglihatannya.

lain, untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat, sesungguhnya tidak ada hambatan fasilitas karena lokasi pasar sangat dekat.

4.4. Proyek Sanitasi dan Air Bersih Desa

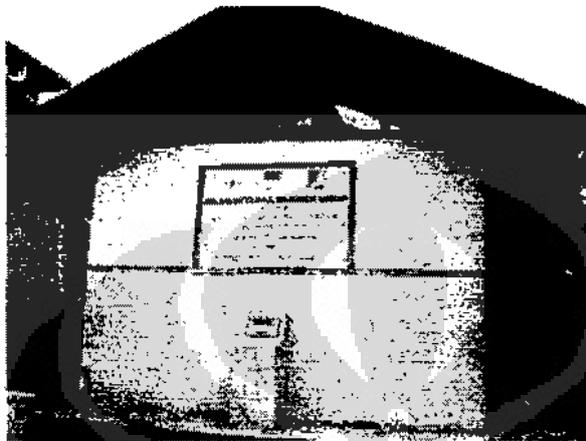
Desa Cimandiri sendiri memiliki beberapa kampung atau dusun, diantaranya, Kampung Cikampak yang letaknya persis di tengah kampung, di pinggir jalan kecamatan. Kemudian kearah barat ada dua kampung yang lain, yaitu, Cimandiri Ilir dan Cimandiri Kulon. Di arah sebaliknya, sebelah timur dari pusat desa, terdapat Kampung Cisepuhan. Sedangkan kearah selatan terdapat Kampung Bukit Petir. Topografi wilayah desa Cimandiri cukup bergelombang. Sebagian besar wilayahnya adalah areal persawahan aktif yang banyak ditanami padi dan palawija seperti jagung, kacang panjang, ubi jalar, ubi kayu, bengkuang, kacang tanah dan terong. Seperti wilayah Bogor pada umumnya, dengan curah hujan yang tinggi serta banyaknya wilayah berlembah, di desa ini banyak terdapat mata air yang cukup baik kualitasnya. Kebutuhan air bersih di masyarakat banyak dipenuhi dari sumber-sumber mata air yang ada di hampir setiap kampung. Kecuali wilayah Cikampak, mereka telah difasilitasi dengan air dari PDAM Kab. Bogor. Untuk masuknya fasilitas air PAM ini ada kisah tersendiri yang diceritakan oleh Ahmadi. Pada masa kepemimpinan Lurah Herman (1999-2004), pihak PDAM Kab. Bogor yang salah satu mata airnya terdapat di desa tetangga berencana mengalirkan air ke wilayah Darmaga, tentu saja hal ini mengharuskan PDAM untuk membangun saluran pipa primer yang melewati wilayah Desa Cimandiri. Persisnya, rencana mereka menggunakan jalur jalan kecamatan untuk meletakkan pipa saluran. Kesempatan ini kemudian digunakan oleh Lurah Herman untuk meminta PDAM membuat pipa distribusi kepada warga di Cikampak, termasuk balai desa serta rumah Lurah Herman yang berada persis di belakang balai desa.

Singkatnya, PDAM menyetujui untuk membuat saluran distribusi ke rumah-rumah di Cikampak, dengan syarat pipa distribusi sekunder dan tersier mestilah dibeli oleh masyarakat. Untuk selanjutnya, masyarakat hanya diberikan beban membayar Rp. 10.000 sebulan dengan pemakaian yang bebas. Uang itu tidak dibayarkan langsung oleh masyarakat ke PDAM, melainkan mekanismenya

dikumpulkan terlebih dahulu di setiap RT, kemudian diserahkan kepada Ketua RW baru dibayarkan ke PDAM. Sejak saat itu, seluruh warga Cikampak baik yang kaya ataupun miskin mendapatkan air bersih dari PDAM. Namun ini tidak berjalan dengan baik. Pada perkembangannya, fasilitas PDAM ini agak bermasalah, ada persoalan mengenai tidak dibayarkannya uang iuran warga yang telah terkumpul selama hampir 6 bulan. Pernah satu bulan warga distop tidak mendapat pasokan air dari PDAM, kemudian setelah warga melayangkan protes, barulah mereka mengetahui duduk perkaranya, bahwa uang yang terkumpul ternyata tidak disetor selama beberapa bulan. Persoalan ini kemudian telah dibahas sampai tingkat desa. Solusinya kemudian, bagi masyarakat yang ingin tetap mendapatkan air bersih dari PDAM, haruslah memasang meteran di rumahnya sehingga memudahkan pencatatan. Bagi yang tidak mau memasang meteran konsekuensinya mereka tidak akan dialiri air bersih lagi. Oleh karena itu, hanya warga yang tergolong kaya saja yang mampu memasang meteran yang harga pasangannya mencapai ratusan ribu rupiah, sementara warga yang tergolong miskin tidak mampu memasang dan terancam tidak mendapat air bersih lagi.

Untuk sarana sanitasi, di desa ini masyarakatnya masih banyak yang menggunakan *susunan*³⁵ untuk melakukan aktivitas mandi cuci dan kakus. Pada beberapa lokasi mata air, biasanya mereka membuat semacam bilik sederhana yang digunakan untuk menutupi aktivitas mandi mereka. Bilik bisa terbuat dari karung goni, karung plastic, terpal parasut atau bahan lain seadanya. Namun pada beberapa lokasi, telah dibangun sarana mandi cuci kakus umum, seperti di Cikampak, yang dibangun oleh pemerintah desa melalui swadaya masyarakat, kemudian di Cimandiri Ilir dan Cimandiri Udik sebagai bantuan dari lembaga swadaya masyarakat. Sebagian kecil masyarakat yang tergolong ekonomi menengah keatas telah memiliki sarana kamar mandi sendiri di rumahnya dengan memanfaatkan pompa listrik ataupun pompa tangan. Meski begitu terkadang mereka masih juga memanfaatkan fasilitas umum terutama untuk kegiatan mencuci di pagi hari.

³⁵ Semacam saluran air tersier yang lebarnya kira-kira satu meter dan dialiri air dari sungai yang bermula di bagian selatan desa, tepatnya di Kampung Bukit Pinang.



Gambar 5. Salah Satu MCK Umum di Cimandiri

4.5. Perkembangan Ekonomi dan Industri Desa

Selain sawah serta ladang, masyarakat disini juga banyak yang memelihara ikan, baik untuk kebutuhan pribadi rumah tangga ataupun untuk kepentingan usaha/bisnis. Dengan sumber air yang cukup melimpah, tidak sulit bagi warga untuk memiliki *balong* (kolam) ikan. Ikan yang banyak dipelihara oleh penduduk adalah jenis ikan mas, mujair, gurame, nila ataupun lele. Di desa ini juga terdapat beberapa industri, baik yang skala kecil rumah tangga ataupun industry skala menengah yang dimiliki oleh perorangan. Industri rumah tangga yang cukup banyak adalah pembuatan sepatu dan sandal kulit. Lokasinya mengelompok di wilayah Kampung Cisepuhan. Warga disini banyak yang memiliki keahlian membuat sepatu dan sandal kulit. Industri berbasis rumah tangga ini biasanya menerima pesanan dari toko-toko sepatu di Pasar Anyar, Bogor, ataupun Tanah Abang, Jakarta. Jika kita ingin memesan sepatu atau sandal dengan model tertentu, maka kita tinggal membawa contoh gambar model sepatu/sandal yang kita inginkan, ketika harga telah disepakati, biasanya dalam waktu seminggu pesanan kita sudah jadi. Kita bisa memesan dari satuan sampai yang jumlahnya partai besar. Industri kerajinan sepatu di wilayah Cisepuhan cukup tersohor untuk cakupan Jabotabek, orang biasa menyebutnya sepatu Ciomas. Dikatakan demikian

karena Ciomas adalah kecamatan di Kab.Bogor yang memang menjadi sentra industri kerajinan kulit untuk dibuat sepatu, sandal, bola, tas dan kerajinan kulit lainnya. Sangat kebetulan wilayah Kec. Ciomas berbatasan dengan wilayah Kampung Cisepuhan. Sehingga meski masuk ke dalam wilayah Cimandiri, Kec. Dramaga, namun Cisepuhan lebih dikenal sebagai daerah Ciomas. Dari industri ini banyak terserap tenaga kerja lokal di Cimandiri.

Industri di Desa Cimandiri tidak terbatas pada industri kulit saja. Ada satu lagi industri yang cukup besar dan menyerap tenaga kerja cukup banyak disini, yakni industri *cangro*. Istilah *cangro* artinya kacang di-*jero*, atau kacang di dalam, bahasa campuran Indonesia dan sunda. Kalau dulu kita kenal istilah *sukro* atau *suuk* di *jero*, yang artinya tetap sama, *suuk* artinya kacang, *jero* artinya dalam, sekarang jadi *cangro*. Lokasinya tepat di tepi jalan kecamatan, tetapi kira-kira 2 km sebelum sampai ke pusat desa Cimandiri. Pabrik *cangro* ini menggunakan bangunan bekas klinik, yang kemudian sempat berganti menjadi toko swalayan, lantas terakhir dijadikan pabrik oleh si pemilik bangunan. Mengenai industri ini keterangan dari beberapa orang informan, menyatakan bahwa industri *cangro* ini telah lama berdiri. Bahkan saya sendiri cukup kaget ketika diceritakan bahwa bangunan bekas klinik itu telah menjadi pabrik kira-kira 7 tahun yang lalu. Dari luar bangunan itu sama sekali tidak menunjukkan adanya kegiatan produksi skala besar karena terlihat sepi, tapi pada pagi dan sore hari ketika buruh-buruh pabrik mulai kerja atau ketika mereka pulang, barulah terlihat betapa bangunan yang masih menyisakan tulisan KLINIK di atasnya, merupakan pabrik pembuatan makanan yang cukup besar. Pabrik itu sendiri menyerap hampir 50 orang tenaga kerja, yang 80%-nya adalah orang lokal desa. Di sekeliling lokasi pabrik adalah sawah dan ladang penduduk, tidak ada aktivitas ekonomi penunjang produksi seperti rumah makan atau penjual makanan bagi para buruh pabrik layaknya pabrik-pabrik yang lain. Berdasarkan keterangan penduduk dan mantan pekerja di pabrik itu, pengusaha dan pemilik pabrik telah menyediakan tempat makan khusus bagi para buruh pabrik, mereka bisa membeli makan di tempat itu karena memang tidak pilihan lain bagi para buruh untuk makan. Termasuk juga toko untuk berbelanja keperluan sehari-hari para buruh, disediakan oleh pemilik pabrik di dalam areal pabrik tersebut. Dengan alasan memudahkan para buruh untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, pemilik pabrik memperoleh tambahan pendapatan bukan hanya dari tenaga para buruh, melainkan juga dari uang yang diperoleh para buruh itu sendiri.

4.6. Sejarah Politik Desa

Sejarah pergolakan politik di desa ini tak ubahnya sejarah pergolakan politik di tanah air. Pada masa kolonialisme, beberapa orang tokoh ulama kelahiran desa ini tercatat pernah ikut serta dalam perang melawan Belanda bersama Pangeran Diponegoro. Selanjutnya masa revolusi pasca kemerdekaan, di desa ini juga terpengaruh oleh gerakan-gerakan politik nasional. Kepala desa pada masa-masa baru merdeka, terbagi menjadi dua, ada kepala desa republik dan ada kepala desa NICA. Julukan seperti itulah yang muncul di desa ketika negara menghadapi satu proses transisi kekuasaan dari kolonialisme ke republik. Persaingan diantara elit desa untuk memperebutkan kedudukan terkait dengan pergantian pemerintahan di tingkat pusat juga cukup mewarnai dinamika politik desa. Namun demikian tidak ada catatan yang lengkap perihal pemilu pertama di desa ini.

Kekuatan-kekuatan politik di tingkat pusat pada tahun 50-60an termanifestasikan oleh pengikut-pengikut mereka di tingkat desa. Sebut saja kekuatan kelompok PKI dan PSI yang diwakili oleh organisasi-organisasi petani seperti BTI (Buruh Tani Indonesia) dan GTI (Gerakan Tani Indonesia). Pada saat itu, organisasi-organisasi cukup marak, contohnya untuk buruh pekerja kereta api di stasiun bogor misalnya, terbelah menjadi dua. SBKA (Serikat Buruh Kereta Api) yang berhaluan sosialis kiri dan PBKA (Persatuan Buruh Kereta Api) yang berhaluan sosialis kanan.

Salah satu kampung di desa ini, yakni Cisepuhan, menjadi basis dari kekuatan kelompok kiri, yakni PKI. Saat orde baru berkuasa, ratusan orang dicituk oleh aparat karena diduga terlibat dengan jaringan PKI. Beberapa orang tidak diketahui dimana rimbanya, sedangkan sebagian kecil dari mereka kemudian dilepaskan oleh pemerintah dari tahanan. Proses politik inilah yang dikemudian hari seperti menyurutkan aktivitas organisasi petani di desa ini. Kampung Cikampak merupakan basis dari kekuatan sosialis kanan, yaitu PSI. Beberapa orang tua di kampung ini, sampai awal tahun 90-an masih suka memajang foto Syahrir di

rumah mereka, selain foto Presiden Suharto.³⁶ Setelah orde baru berkuasa, selanjutnya pemerintahan desa dipegang oleh mantan tentara. Kepala desa yang baru diangkat pada masa orde baru ini memiliki tugas untuk menggalang solidaritas warga demi pembangunan plus mengawasi para mantan aktivis-aktivis BTI. Lurah Ardo, sang kepala desa pada masa orde baru, sangat disegani oleh seluruh warga Cimandiri. Meskipun banyak orang tidak pernah merasakan kepemimpinannya karena belum lahir atau karena belum tinggal di Cimandiri pada saat itu, namun hal ini tidak menyurutkan pujian orang-orang terhadap kehebatannya sebagai kepala desa. Julukannya, persis seperti julukan Pak Harto pada waktu itu, Lurah Pembangunan. Julukan ini muncul karena pada saat kepemimpinannya, ia aktif melakukan program-program pembangunan seperti pembangunan beberapa jalan tembus desa, perkerasan jalan-jalan utama desa, pembangunan gotong royong sarana air bersih dan kamar mandi umum, serta mampu menjaga stabilitas keamanan di desa ini. Beberapa orang informan yang sempat saya temui, meski mereka tidak pernah mengalami bagaimana rasanya dipimpin oleh Lurah Ardo, namun mereka cukup kagum mendengar cerita dari mulut ke mulut. Bahkan tidak ada seorang pun dari enam orang lurah penggantinya yang mampu menyaingi kehebatannya dalam mengayomi masyarakat.



Gambar 6. Lurah Pembangunan (Dalam Lingkaran Putih)

Sumber foto : Dokumentasi pribadi Andi Jaya

³⁶ Sudargan, 1988

Pada masa orde baru berkuasa, mutlak daerah ini dikuasai oleh Golkar dalam beberapa kali pemilu. Namun pada saat pemilu 1999, pasca tumbanganya rezim otoritarian orde baru, PDIP menjadi pemenang mutlak di desa ini, sama dengan yang terjadi di tingkat nasional. Sementara pada pemilu 2004, Partai Demokrat menggeser partai-partai lainnya.

Sebagai satu desa yang masuk kategori miskin, sesungguhnya Cimandiri memiliki kelebihan dengan terdapatnya sarana pendidikan sampai sekolah dasar sebanyak tiga unit. Sekolah dasar ini didirikan pada masa orde baru. Melalui program wajib belajar 6 tahunnya, orde baru membangun sekolah-sekolah dasar di perdesaan Indonesia. Sekolah-sekolah itu antara lain : SDN Cilubang 02 Cimandiri Ilir, SDN Cilubang 05 Cisepuhan dan SDN Cilubang 06 Bukit Petir. Yang cukup mengherankan adalah nama-nama sekolah itu senantiasa memakai kata Cilubang di depannya. Padahal sangat jelas bahwa nama desa dan nama kampung dimana sekolah itu berdiri tidak ada yang menggunakan nama Cilubang. Lantas, apa hubungan Cilubang dengan desa dan kampung-kampung disini.?

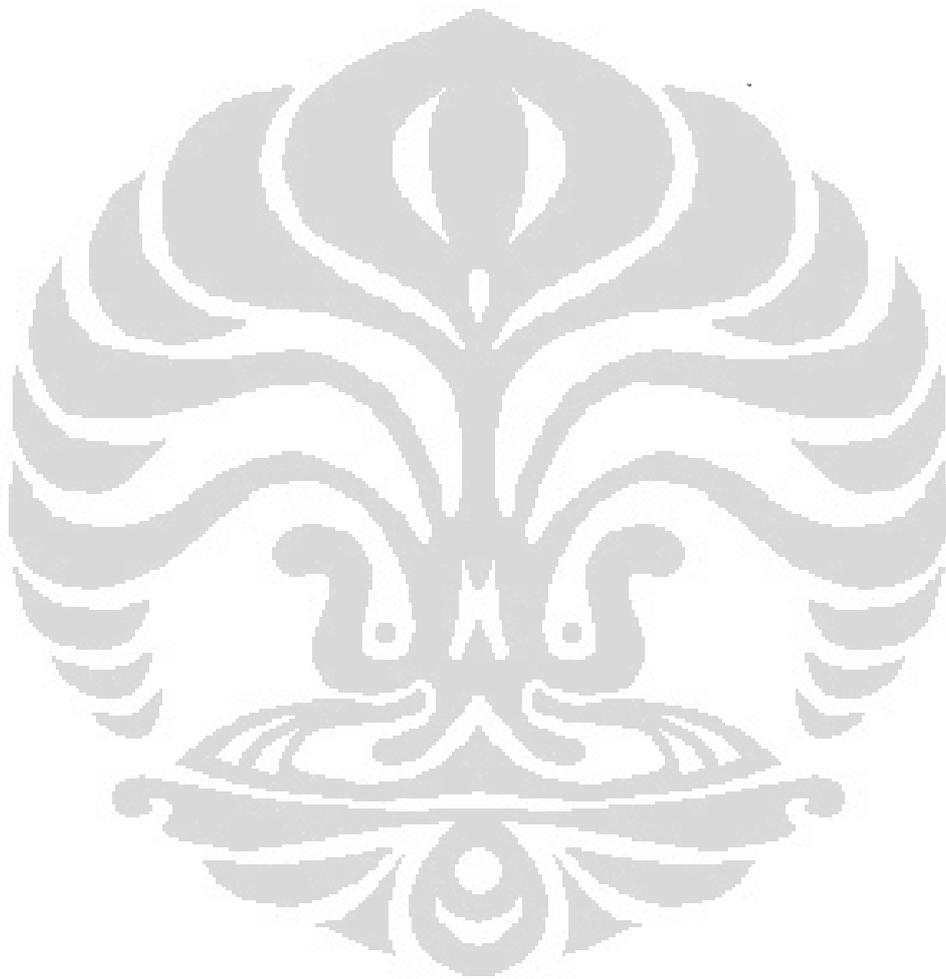
Cilubang sendiri saat ini adalah nama satu kampung kecil di sebelah tenggara Cimandiri. Jaraknya kurang lebih sekitar 3 kilo meter dari pusat desa. Kampung Cilubang sendiri masuk ke dalam Kecamatan Ciomas, sementara Desa Cimandiri masuk Kecamatan Dramaga. Namun demikian, perlu diketahui bahwa Cimandiri sebelumnya memang masuk Kecamatan Ciomas dan bukan Dramaga. Baru pada sekitar tahun 80-an, Cimandiri dimasukkan ke dalam Kecamatan Dramaga. Dari catatan Ahmadi mengenai lurah-lurah yang pernah menjabat di wilayah ini, maka sebagian besar, hampir 70% nya merupakan orang Cilubang. Cimandiri adalah desa pemekaran. Sebelumnya desa disini bernama Desa Cilubang, baru pada masa pemerintahan Lurah Amir, Desa Cilubang dimekarkan menjadi dua, yakni Cimandiri dan Sukadamai. Hal ini terjadi atas usulan seorang mantan pejuang Siliwangi, yakni Pak Agus. Berdasarkan hal tersebut, maka teranglah kenapa di desa ini, sekolah-sekolah menggunakan nama Cilubang. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah nasional tidak saja menerapkan penyeragaman atas bentuk, model dan pola pemerintahan desa di seluruh Indonesia berdasarkan UU No. 5/79,

melainkan juga mencoba untuk memutus perkembangan sejarah yang telah menyertai perkembangan desa ini sejak seratus tahun yang lalu.³⁷

Selain persoalan nama, perihal sekolah-sekolah di desa ini tentu saja tidak terlepas dari perkembangan struktur sosial-politik yang menyertainya. Mengingat sekolah adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah nasional atas struktur sosial di masyarakat di bidang pendidikan, hal ini tentu saja tidak luput dari dinamika sosial-politik yang menyertainya. Satu cerita yang cukup menarik adalah tanah-tanah dimana sekolah-sekolah ini berdiri merupakan tanah wakaf para tuan tanah. Contohnya, adalah SDN Cilubang 02 Cimandiri Ilir, tanah dimana sekolah ini berdiri adalah tanah yang dahulunya dimiliki oleh keluarga H. Udin (nama samaran), anak dari elit lama desa. Sementara tanah SDN Cilubang 05 Cisepuhan adalah tanah wakaf yang dahulunya dimiliki oleh H. Entong (nama samaran). Kedua orang itu dalam sejarahnya dikenal sebagai aktivis dari organisasi Buruh Tani Indonesia (BTI). Organisasi *underbouw* PKI. Mereka berdua pada masa setelah Gestapu termasuk orang-orang yang dianggap terlibat dalam pemberontakan PKI. Negara melalui aparatnya, terutama pemerintah desa dan babinsa lantas mengambil tindakan untuk menyiduk mereka. Masa ini adalah masa dimana Lurah Ardo menjadi kepala desa, sebagai seorang pensiunan tentara, Lurah Ardo tentu saja memiliki kemampuan dan kekuasaan untuk bisa menyeret seseorang ke dalam penjara atas tuduhan berkhianat pada negara. Namun dalam kenyataannya, hal itu tidak diberlakukan pada semua orang yang diduga terlibat. Untuk para haji yang kebetulan menjadi tuan tanah di desa ini, ada kebijakan khusus yang kemudian diterapkan. Kebijakan itu dikeluarkan demi melindungi mereka dari jerat hukum karena terlibat dalam organisasi BTI. Atau dengan kata lain ada kompensasi atau pertukaran atas tidak dihukumnya mereka, yakni menyerahkan sebagian kecil tanah mereka kepada negara untuk digunakan sebagai sekolah. Dengan kompensasi inilah H. Udin kemudian tidak jadi ditangkap dan dipenjarakan. Namun, H. Entong bernasib lain, meski keluarganya

³⁷³⁷ Mengenai cerita asal muasal nama desa dan nama beberapa kampung di desa ini, dari beberapa informasi yang beredar, nama-nama desa sangat erat kaitannya dengan sejarah masa lalu desa ini. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa 65 "berdarah" cukup membekas bagi sebagian kalangan di desa ini. Manifestasi dari bagaimana pemerintah orde baru berusaha untuk menegaskan kekuasaan atas desa ini adalah dengan mengubah nama-nama kampung sesuai dengan kejadian yang pernah terjadi pada masa itu.

telah menyerahkan tanah kepada negara, ia tetap saja dikirim ke Pulau Buru sampai pertengahan 80-an.



BAB V. STRATEGI PETANI DALAM BERTAHAN HIDUP DITENGAH PERUBAHAN SOSIAL POLITIK KONTEMPORER

Salah satu pembahasan yang paling penting dari struktur sosial kaum tani di perdesaan adalah fenomena produksi pertaniannya. Dalam studi-studi terdahulu yang membahas mengenai petani dan hubungannya dengan negara atau kaum elit desa, maka struktur produksi pertanian menjadi manifestasi dari struktur sosial sebenarnya. Biasanya dalam satu desa yang daya eksploitasi tanahnya untuk produksi komoditas pertanian sangat tinggi, ditempat itu pula eksploitasi terhadap manusianya, terutama kelompok buruh tani dan petani kecil sangat luar biasa. Sementara, di desa yang tingkat eksploitasi atau pemanfaatan tanah untuk komoditas pertaniannya tergolong sedikit atau sedang, maka kecenderungannya eksploitasi terhadap manusianya juga tidak terlampau hebat, pun jikalau ada, bentuk-bentuk eksploitasinya sangat samar berada di balik hubungan-hubungan sosial yang seolah-olah baik, sopan dan setara.

Kajian Breman (2004) mengenai satu desa di Cirebon misalnya, dikatakan bahwa desa yang telah terimbas pengaruh kota, mengalami apa yang dinamakan sebagai marginalisasi sektor pertanian di perdesaan. Dengan analisa *push and pull factor*, dia menjelaskan bahwa dalam desa yang seperti ini terjadi migrasi tenaga kerja di perkotaan, berkurangnya lahan pertanian untuk dijadikan tempat permukiman serta terserapnya tenaga kerja perdesaan ke dalam sektor industri perdesaan. Breman juga mengutip Hugo (1985:62; 1990:231), perihal revolusi kolt, atau pengaruh dari masuknya kendaraan-kendaraan kecil ke pelosok-pelosok desa terpencil untuk mengangkut orang-orang ke luar dari desa mencari peluang di tempat lain. Atau studi Anthlov (2002) di Bandung, yang melihat eksploitasi antara majikan dan buruh dalam bentuk-bentuk yang simbolik. Bandingkan misalnya dengan para petani di dataran tinggi Bandung yang menjadi sentra sayur

mayur.³⁸ Selain itu, perkembangan dalam aktivitas ekonomi non-pertanian yang semakin beragam telah menciptakan peluang dan kesempatan baru bagi para petani baik yang besar dan yang kecil untuk memperoleh pendapatan selain dari sektor pertanian (Hart 1988).

Melihat Desa Cimandiri, kiranya kita bisa menyaksikan bahwa desa tersebut berada dalam situasi yang tidak secara mutlak menggambarkan bentuk desa lama di wilayah tatar Sunda. Kita tidak menemukan adanya hamparan sawah yang tidak terputus mengelilingi desa, permukiman penduduk yang dipisahkan dengan pekarangan-pekarangan luas. Bahkan pada beberapa kampung rumah-rumah penduduk saling berdempetan satu sama lain. Meskipun begitu, tetap saja tidak menghilangkan ciri genealogis pemilikinya. Pada beberapa bagian jika kita mencoba menelusuri kehidupan masyarakat, memang masih banyak kita lihat nilai-nilai lama yang mencirikan kebudayaan masyarakat desa, seperti sebagian besar petani baik yang memiliki lahan besar maupun kecil yang masih menggunakan jasa pemilik kerbau untuk membajak sawahnya. Proses *ngeluku* ini masih dilakukan oleh sebagian besar petani di sini, dengan ongkos *ngeluku* per hari Rp. 50.000, mereka enggan untuk menggunakan traktor, karena topografi di daerah ini yang memang berbukit-bukit, akan sulit untuk menggunakan traktor di wilayah-wilayah yang memiliki kelerengan yang cukup curam. Selain soal sistem produksi pertanian, di desa ini beberapa orang warga juga masih sangat percaya kepada dukun beranak untuk melahirkan bayinya, meski telah ada bidan desa yang setiap saat siap membantu orang yang mau melahirkan. Saat ini saja tercatat masih ada 3 orang dukun beranak di Cimandiri. Kemudian masyarakatnya sangat guyub dan toleran satu sama lain, serta masih seringnya dilakukan ritual selamatan jika ada warga yang memiliki hajat atau keinginan, seperti, menikah, sembuh dari sakit, khitanan, sedekah bumi dan sebagainya.

Namun demikian, di sisi lain, ciri-ciri lama masyarakat desa itu berada dalam ruang dan waktu yang sama dengan ciri-ciri modern masyarakat kota, seperti beberapa orang warga yang mengandalkan sektor industri dan jasa di kota Bogor

³⁸ Penjelasan mengenai ini ada di dalam laporan studi lapang mengenai otonomi desa yang dibuat oleh peneliti bersama Kelompok Studi Sosiologi Perdesaan FISIP UI bersama Yayasan Tifa (belum diterbitkan).

dan Jakarta. Mereka menjadi warga kommuter yang setiap hari mesti melakukan perjalanan pulang pergi. Belum lagi jumlah penduduk yang sangat besar yang berprofesi sebagai pedagang di pasar-pasar di Jakarta dan Bogor. Di desa itu juga telah berdiri satu pabrik makanan ringan skala menengah yang banyak menyerap tenaga kerja dari desa itu.

Kita juga bisa melihat imbas dari revolusi hijau di desa ini dalam hal penggunaan pupuk buatan, bibit padi dan palawija yang diproduksi oleh pabrik-pabrik pemuliaan besar. Penggunaan telepon genggam pun sudah sangat marak, bukan saja oleh kalangan dewasa, namun kelompok ABG pun sudah banyak yang menggunakan telepon genggam, bahkan belum lama berselang ketika peneliti berada disana, telah dibuka dua kios isi ulang pulsa telepon genggam di pusat desa. Hampir setiap sore kios isi ulang telepon genggam ini ramai dikunjungi anak-anak ABG untuk sekedar *nongkrong* dan bersenda gurau disana.

Dengan kata lain, Cimandiri merupakan desa yang memiliki dua wajah sekaligus, tradisionalisme khas warga desa plus modernisme kota yang masuk melalui sarana komunikasi dan informasi yang semakin canggih. Dalam kesehariannya, dua hal itu bertemu, *blended* sehingga sulit dilihat batasan yang jelas diantara keduanya. Hal ini pada akhirnya banyak mempengaruhi pola pikir masyarakat desa, terutama dalam bidang produksi pertanian.

5.1. Dinamika Sosial-Politik Kontemporer di Perdesaan

Selama kurun waktu sepuluh tahun setelah reformasi berjalan, di tingkat nasional kita bisa saksikan terjadinya pergeseran-pergeseran besar dalam ranah politik. Sirkulasi elit politik cukup banyak mewarnai dinamika sosial-politik kontemporer. Salah satu manifestasinya adalah demokrasi dan desentralisasi yang merambat sampai ke tingkat daerah. Bahkan yang paling mutakhir adalah dorongan untuk memberlakukan otonomi bukan lagi di level kabupaten, melainkan sampai ke tingkatan desa. Otonomi desa menjadi satu isu yang cukup krusial untuk menggambarkan banyaknya pihak yang menginginkan optimalisasi atas desentralisasi. Argumen-argumen mendasar dari kelompok-kelompok yang mendukung diberlakukannya otonomi desa antara lain adalah : 1) belum optimalnya desentralisasi sampai tingkat kabupaten dalam mewujudkan agenda

kesejahteraan rakyat, 2) pandangan bahwa elit di tingkat kabupaten pada prakteknya telah membajak proses desentralisasi yang telah dilakukan selama sepuluh tahun terakhir, sehingga, mesti ada mekanisme untuk melepaskan cengkeraman kekuasaan elit di tingkat kabupaten namun tidak mengarah pada bentuk sentralisasi, dan 3) efisiensi pengelolaan wilayah akan lebih efisien jika dilakukan dalam cakupan wilayah yang lebih kecil seperti desa. Langkah untuk menerapkan otonomi desa salah satunya adalah menerapkan apa yang dinamakan sebagai pengalokasian dana pembangunan desa, atau istilahnya ADD (Alokasi Dana Desa).

Beberapa kabupaten di Indonesia telah melakukan upaya seperti disebutkan diatas, yakni memberikan dana khusus kepada desa melalui APBD. Meski belum ada riset yang secara khusus melihat seberapa efektif dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa, namun upaya itu mendapat sambutan yang cukup beragam dari berbagai kalangan. Dari yang menilainya positif sampai yang negatif.

Perubahan mendasar yang terjadi di desa-desa setelah reformasi berlangsung berada pada level mikro, meso sampai makro. Akibat pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999, muncul organisasi-organisasi tingkat desa yang telah merubah struktur kekuasaan yang semula di dominasi oleh kepala desa. Jika dimasa orde baru kepala desa menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah lokal. Setelah reformasi situasi itu berubah. Kebijakan itu praktis telah memutus system patronase negara yang telah terbangun sedemikian lama. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah kepala desa menjadi lebih independen, otonom atau justru mencari bentuk patronase lain selain negara dalam arti pemerintah pusat ?

5.1.1. Pergeseran Relasi Politik Tingkat Desa

Dalam kasus Cimandiri, tentu saja ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mencoba mengurai pertanyaan diatas. Pada pilkades tahun 1999, Pak Herman berhasil menjadi kepala desa sampai tahun 2004. Setelah itu, digantikan oleh Rokib yang memenangin pilkades tahun 2004. Rokib pada perjalanannya kemudian menjadi kepala desa pertama dari Kampung Cimandiri

Kulon. Kampung yang selama desa ini berdiri tidak pernah melahirkan kepala desa.

Rokib masih bisa dikategorikan sebagai orang muda. Usianya baru menginjak 40-an. Perawakannya tegap, berkumis lebat dan sorot matanya masih tajam. Maklum saja karena menurut pengakuannya sendiri, dia adalah mantan preman pasar. Bahkan saat ini dia masih berstatus sebagai kepala pasar secara informal di Pasar Anyar. Semenjak muda Rokib telah aktif di organisasi kepemudaan MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong). Organisasi *underbouw* Partai Golkar yang ketika orde baru tumbang kemudian mendirikan partai sendiri diluar partai Golkar.³⁹ Ketika reformasi bergulir dan MKGR memutuskan untuk memisahkan diri dengan induknya, yakni Partai Golkar. Tak terkecuali Rokib yang telah lama aktif di MKGR Kab. Bogor itu. Meski dia mengaku cukup dekat dengan beberapa orang tokoh Golkar di Bogor, namun secara politik bisa dikatakan bahwa ia tidak lagi memiliki ikatan dengan Golkar. Dengan kata lain, reformasi telah mendorong Rokib untuk bisa menjadi lebih independen dan melepaskan diri dari relasi patronase politik dengan Golkar.

Dinamika politik yang terjadi di lingkup nasional ini kemudian menginspirasi dirinya untuk bisa membangun satu kekuatan politik sendiri di tingkat desa. Meskipun secara ekonomi sesungguhnya tindakannya menjadi sangat rasional, mengingat ia juga memiliki posisi yang strategis di pasar. Meski faktor utama untuk mendapatkan posisi sebagai kepala pasar adalah karena kemampuan dirinya sendiri. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perlu dukungan politik untuk bisa terus memegang kekuasaan di pasar. Bahkan Golkar sebagai satu organisasi politik yang bercirikan transaksionalisme, pernah memiliki organisasi sayap khusus orang-orang pasar. Organisasi ini menaungi kelompok-kelompok pedagang kecil, tukang parkir dan buruh angkut

³⁹ Sejak berdirinya, tahun 1960, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) hanya berbentuk organisasi massa. Pada tahun 1964, MKGR turut membidani kelahiran Golkar. Tidak heran, sejak awal MKGR merupakan salah satu dari pilar-pilar Golkar. Kala itu, dalam komitmennya, MKGR melaksanakan fungsi-fungsi nonpolitik seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial. Namun pada perjalanan selanjutnya, menurut MKGR, apa yang dilakukan Golkar tidak lagi seirama dengan kehendak mayoritas rakyat. Maka, MKGR pun melepaskan diri dari Golkar dan berjuang sendiri dalam bentuk parpol.

di pasar, dan Rokib menjabat sebagai pimpinan di wilayah Pasar Anyar. Situasi ini kemudian mendorong dirinya untuk juga mencari bentuk-bentuk dukungan politik yang memungkinkan baginya untuk mempertahankan kekuasaannya di pasar.

Telah saya sebutkan sebelumnya di muka bahwa pada saat penelitian ini dilakukan, dua fenomena besar yang menjadi perhatian saya, yaitu, krisis financial global dan pemilihan kepala daerah Kab. Bogor. Soal yang terakhir ini menjadi penting diperhatikan mengingat representasi kekuatan politik di tingkat kabupaten tercermin di dalam relasi sosial-politik sehari-hari di perdesaan. Di Cimandiri misalnya, kekuatan politik terpecah menjadi beberapa faksi, meskipun pada saat pilkada putaran kedua faksi-faksi itu mengerucut hanya menjadi dua, yaitu faksi RAHMAN (Rahmat Yasin & Karyawan Faturahman) dan faksi NUSAE (Nungki & Endang Kosasih). Untuk yang pertama di dukung oleh PPP dan PDIP, sementara untuk yang kedua didukung oleh Golakr, PKS, Partai Demokrat, PKB dan beberapa partai lainnya. Dalam konteks ini, Cimandiri kemudian terbelah menjadi dua kelompok pendukung. Kelompok pertama, pendukung RAHMAN secara informal dipimpin langsung oleh Kepala Desa Rokib. Sementara kelompok kedua, pendukung NUSAE dimotori oleh kepala desa Cimandiri yang lama, yakni Herman. Rokib yang merupakan kader dari MKGR, dalam praktiknya justru mendukung calon dari PPP dan PDIP ketimbang calon dari Golkar sendiri.

Kondisi ini tentu bukan kebetulan terjadi, karena relasi yang terbangun antara Rokib dengan calon Bupati yang kemudian terpilih telah berlangsung cukup lama. Rahmat Yasin yang sebelumnya menjadi anggota DPRD Kab. Bogor, merupakan anggota masyarakat di Kec. Dramaga, satu kecamatan dengan Cimandiri. Dan sejak lama Rahmat Yasin telah melakukan investasi politik di Kec. Dramaga termasuk di Desa Cimandiri. Dari keterangan Kepala Desa Rokib dan beberapa orang warga, pada tahun 2004 Rahmat Yasin pernah berjasa membangun Cimandiri dengan membiayai pembuatan jalan lingkar desa yang menghubungkan Cimandiri dengan desa tetangganya. Kebenaran atas klaim ini sulit dibuktikan, apakah betul Rahmat Yasin membiayai dengan

koceknya sendiri atau dia hanya memperjuangkan hal ini dalam APBD Kab. Bogor. Tetapi yang jelas jasanya diketahui hampir orang satu desa. Oleh karenanya, tidak aneh apabila kelak dikemudian hari dukungan dari desa ini turut membantu memenangkan dirinya sebagai Bupati Bogor.

Selanjutnya mari kita tengok Jali, seorang petugas keamanan kampung yang sehari-harinya bekerja sebagai petani penggarap di desa ini. Sebagai anggota hansip desa yang telah mengabdikan selama puluhan tahun di desa ini, Jali cukup populer dan terkenal. Selama beberapa kurun waktu, pada masa orde baru berkuasa, Jali tentu saja seperti halnya aparat desa yang lain, menjadi kepanjangan tangan dari penguasa orde baru. Lantas bagaimana setelah reformasi bergulir dan seperti halnya Lurah Rokib, Jali pun mendapatkan peluang-peluang ekonomi baru.

Jabatan Jali sebagai hansip di desa telah membuka peluang baginya untuk bisa berhubungan dengan orang-orang luar. Meski dia tidak terhitung sebagai keturunan elit desa ataupun penguasa tanah di desa ini, identitasnya sebagai mantan jawara sudah cukup untuk membuat orang menghargai dirinya walau terkadang dibalik itu orang seringkali mencibir atau mengolok-olok dirinya. Hal ini cukup mampu dilihat oleh Jali sebagai peluang untuk bisa mendapatkan kesempatan terkait urusan ekonomi keluarganya. Saat ini Jali menggarap lahan yang masuk sebagai lahan kas desa seluas 2300 meter persegi. Letaknya tidak jauh dari rumahnya, di bawah lembah kecil, jarak dari desa pun kurang lebih 2 kilo meter. Hak garap ini diberikan kepadanya sebagai imbal jasa atas jabatan dia sebagai hansip di desa. Dengan hak garap yang dimilikinya itu, Jali mendapatkan penghasilan yang relatif tetap ketimbang menjadi buruh tani harian. Sebagian kecil hasil lahan garapan itu dia berikan kepada kepala desa. Karena di desa ini kepala desa tidak mendapatkan gaji dari pemerintah daerah. Meski demikian hasil garapannya masih dirasakan kurang untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Oleh karena itu, meskipun ia telah memiliki tanah sebagai lahan garapan yang bisa ditanami dan hasilnya dia ambil langsung, tidak jarang Jali ikut dalam kerja-kerja di sawah orang. Hak garap ini akan terus dipegang oleh Jali sampai dia pensiun sebagai hansip desa. Kecil

kemungkinan hak garap ini akan turun kepada anaknya mengingat tidak ada satupun anaknya yang bekerja di kantor desa. Selain itu sangat sulit untuk memberikan tanah ini sebagai tanda mata kepada Jali karena luasan tanah pertanian di desa ini sudah cukup sempit, dan luasan 2300 meter persegi sebagai tanah kas desa tergolong kecil.

Perubahan mendasar yang pertama kali terjadi pada Jali adalah pada saat Yayasan Kekal melakukan satu bentuk intervensi sosial di masyarakat. Karena prinsip dasar dari program itu adalah partisipasi warga dan peniadaan hambatan-hambatan birokrasi di pemerintahan seketika Jali mendapatkan peluang-peluang baru dalam hidupnya. Jali kemudian terlibat dalam proses pembangunan menjadi salah satu anggota panitia lokal. Jabatan yang bagi kita mungkin terkesan sangat biasa, namun bagi warga Cimandiri Udik, itu adalah prestise yang cukup luar biasa. Hanya dengan terlibat pada kegiatan-kegiatan publik, seseorang bisa dianggap berpengaruh dan memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain.

Dilibatkannya Jali bukan karena alasan yang tidak jelas. Sejak semula diantara warga Kampung Cimandiri Udik, dia termasuk seseorang yang berani berbicara dan memiliki pengaruh kuat untuk bisa memobilisasi warga. Program yang berjalan selama beberapa bulan itu dalam pelaksanaannya banyak mendorong dinamika sosial di Cimandiri pada umumnya. Dan bagi Jali, tidak pernah terbayang dampak yang kemudian muncul akibat dari proyek itu.

Kampung Udik sendiri sangat tepat jika dikatakan sebagai tipikal kampung klasik, letaknya terpencil dikelilingi hamparan sawah dan pepohonan, rumah-rumahnya berdekatan satu sama lain dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, serta struktur genealogis masyarakatnya sangat nampak, karena sebagian besar adalah kerabat atau anak-anak Jali. Sebelum program ini dilakukan, bisa dikatakan bahwa Kampung Udik benar-benar dalam situasi terisolasi karena tidak ada jalan yang representatif dari dan ke kampung ini. Meski populasi di kampung ini tidak lebih dari 20 KK, namun akses jalan sangat diperlukan oleh warga mengingat mereka juga memiliki anak-anak usia sekolah yang setiap hari mesti berangkat. Selain itu di belakang kampung inipun terdapat

pemakaman umum warga Cimandiri. Dengan ketiadaan akses jalan ke kampung ini, sulit bagi warga untuk menguburkan jenazahnya. Satu-satunya akses ke kampung ini hanyalah jalan setapak di sawah atau yang biasa disebut oleh warga sebagai galengan sawah. Selain persoalan aksesibilitas, di kampung ini warganya masih menggunakan air *susukan* untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Tidak ada warga yang mempunyai sarana mandi cuci kakus yang representatif. Untuk keperluan air minum, mereka mesti menuruni lembah yang jaraknya tidak kurang dari 500 meter untuk mengambil air di sebuah mata air.

Program yang dinamakan pembangunan masyarakat (*community development program*) ini adalah satu program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Yayasan Kekal dengan dukungan United Nation World Food Program (UNWFP) kemudian memberikan bantuan kemanusiaan berupa pembangunan jalan setapak menembus kampung ini dan pembangunan sarana MCK untuk warga. Pada proses pembangunannya, Jali kemudian menjadi orang yang dianggap mewakili atau merepresentasikan warga masyarakat di sini. Seketika statusnya dalam system sosial di Udik menjadi semakin kuat, apalagi ketika dia merelakan sebidang tanahnya yang berada persis di depan rumahnya dia wakafkan untuk membangun sarana MCK itu. Singkat kata, dari program itu kemudian, Cimandiri UDik menjadi lebih terbuka. Jali yang semula tidak dikenal oleh orang luar desa, saat ini telah mampu menjalin relasi dengan orang-orang di luar desa. Bahkan dalam beberapa kesempatan, kunjungan-kunjungan dari jaringan Yayasan Kekal ke Cimandiri senantiasa disempatkan untuk sekedar singgah ke tempat Jali. Lantas dari sisi relasi politik, apa yang kemudian bisa dikatakan berubah dari sisi Jali?

Pada saat pilkades Cimandiri 2004, Jali berada pada posisi mendukung Rokib. Dia tidak lagi patuh kepada kepala desa yang lama, yakni Herman. Bahkan pada beberapa kesempatan setelah Herman lengser dari jabatannya, Jali kerap mengaku sedang tersangkut konflik dengan Herman. Konflik yang bermula dari proses jual beli tanah di daerah Cikampak. Dia mengaku jika Herman telah membohongi dirinya dalam kasus jual beli tanah dengan orang luar desa. Padahal jual beli tanah itu pada awalnya melibatkan dia secara langsung. Tetapi

di saat akhir, Herman membajak prose situ dan ia hanya diberi sedikit komisi yang menurutnya tidak pantas. Begitulah Jali yang kemudian menjadi pengikut setia kepala desa yang sekarang, yakni Rokib.

Dari pembangunan jalan setapak dan MCK umum itu kemudian Jali mampu membangun komunikasi dengan orang-orang dari luar desa ini. Yang paling jelas adalah ketika pada tahun 2006 berdiri mushalla kecil di depan rumah Jali, persis diantara MCK dan rumahnya. Mushalla ini didirikan atas bantuan seorang aktivis Partai Amanat Nasional di Bogor. Jali beranggapan bahwa siapapun yang ingin membantu kampungnya akan diterima dengan tangan terbuka, tidak peduli orang atau kelompok itu memiliki kepentingan apa. Sampai pada titik ini, Jali kembali memperkuat kedudukan sosial di tengah masyarakat. Lantas ketika pilkada Kab. Bogor berlangsung, Jali kemudian ikut serta dalam tim sukses RAHMAN, seperti apa yang dilakukan oleh sang kepala desa. Dia ikut melakukan kampanye di Bogor meski menurut keterangannya ongkos yang dia terima untuk kampanye tergolong sangat kurang. Beruntung ada Lurah Rokib yang secara diam-diam banyak membantu kemenangan pasangan RAHMAN di Cimandiri dan Dramaga.

Lain Jali dan Rokib, lain lagi cerita tentang Ahmadi. Ahmadi pernah bekerja di kantor desa selama beberapa tahun. Semasa kepemimpinan Lurah Herman, Ahmadi aktif sebagai salah seorang kaur (kepala urusan) di kantor desa. Meski tugas pasti dari jabatan itu tidak jelas, namun Ahmadi dikenal telaten dalam mengurus arsip-arsip penting di kantor desa. Beberapa arsip dan catatan di desa ini saya dapatkan dari Ahmadi. Sosok Ahmadi bertubuh tinggi, kurus dengan kulit putih. Tutar bahasanya juga cukup halus sehingga saya yang hanya mengandalkan bahasa sunda sehari-hari menjadi agak kesulitan untuk berbicara dengan bahasa sunda.

Ahmadi adalah putra dari seorang ketua RT di Kampung Cikampak. Kakeknya pernah menjabat sebagai kepala desa sekitar tahun 40-an. Selanjutnya tidak ada lagi keturunannya yang menjadi kepala desa di Cimandiri. Pada masa kepemimpinan Lurah Rokib, Ahmadi pernah bertahan dalam posisinya sebagai kaur. Selama kurang lebih empat tahun sudah dia menjadi staf dari Lurah

Rokib. Ditahun ke-empat inilah dia memutuskan untuk tidak lagi bekerja di kantor desa. Keputusan ini dia ambil karena dia menganggap bekerja di desa tidak lagi bisa diandalkan untuk menghidupi keluarganya. Oleh karena itu ia memutuskan untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Dia kemudian bekerja di salah satu hotel internasional di Jakarta. Namun itupun tidak berlangsung lama karena dalam perjalanannya dia merasa tidak kerasan untuk bekerja di sana. Alasan utama yang dia kemukakan tidak lain adalah karena di hotel itu terlalu banyak aktivitas yang menurutnya masuk kategori maksiat. Keberatan inilah yang kemudian dijadikan alasan olehnya untuk berhenti dari pekerjaan itu. Di bulan ke empat dia bekerja, kemudian ia memutuskan untuk berhenti.

Dari sisi afiliasi politik, Ahmadi adalah salah seorang kader muda dari partai Golkar. Sejak muda ia telah aktif di partai tersebut. Bahkan untuk ukuran kecamatan, ia cukup dikenal oleh para petinggi Golkar. Beberapa kali ia diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk generasi muda. Dari pengakuannya pun ia katakan bahwa Golkar telah memberikan banyak hal bagi dirinya. Selama beberapa kurun waktu dia mendapatkan banyak fasilitas dari Golkar. Ia mengaku tidak akan pernah bisa keluar dari partai Golkar karena Golkar telah banyak memberikan bukti baginya. Sampai saat ini dia masih aktif di partai itu. Bahkan dalam dua kali pilkada, yaitu pilkada Gubernur Jawa Barat dan pilkada Bupati Bogor dia menjadi koordinator tim sukses calon-calon dari Golkar. Baginya Golkar adalah pilihan dan idiologi politik.

Dari paparan diatas kiranya bisa kita lihat bahwa, elit-elit desa yang semula dalam kacamata Anthlov menjadi klien-klien dari Negara, yang dalam hal ini adalah Golkar. Seketika mengalami perubahan akibat adanya gelombang besar reformasi. Apa yang dilakukan Rokib mungkin tidak akan realistis untuk dilakukan pada masa orde baru. Tetapi hal ini menjadi mungkin dilakukan pada saat reformasi. Artinya, reformasi sesungguhnya memberikan pefuang untuk terbebasnya desa dari kungkungan struktur supra desa yang lebih besar. Reformasi membuka kesempatan bagi para elit desa untuk bisa menjadi lebih independen dan terputus dari rantai patronase negara yang selama ini

mengungkung mereka. Namun dari contoh kasus Cimandiri, kiranya secara sosiologis bisa kita lihat bahwa kecenderungan untuk seseorang berada dalam struktur yang timpang sesungguhnya bukan hanya karena adanya tekanan atau dominasi yang kuat dari suprastruktur. Dalam konteks ini, relasi patronase itu muncul bukan saja karena ada situasi yang memaksa seseorang untuk dikuasai. Kecenderungan ketimpangan sendiri seolah dicari dan berusaha didapatkan kembali oleh para elit di desa dengan memposisikan diri sebagai klien dari kekuasaan yang ada di atasnya. Jika pada masa orde baru adalah negara dalam artian Golkar, maka pada masa kini, patron mereka adalah penguasa-penguasa di tingkat kabupaten. Pada titik ini bisa dikatakan bahwa terjadinya dominasi sesungguhnya merupakan relasi aktif antara kedua struktur itu sendiri. Menjadi kelompok yang bebas sesungguhnya tidak senantiasa diinginkan oleh seseorang mengingat ada hal-hal yang tidak bisa secara otonom bisa mereka peroleh. Dalam kasus ini tentu saja kepentingan ekonomi Rokib di pasar, serta peluang desa yang dipimpinya memperoleh dana-dana pembangunan menjadi relevan dilihat sebagai faktor yang penting untuk dipertukarkan dengan dukungan politik warga desanya terhadap seseorang. Inilah bentuk relasi patronase kontemporer yang dibangun oleh Rokib.

5.1.2. Dinamika Relasi Sosial Buruh Tani

Dalam beberapa kurun waktu persoalan kemiskinan di pedesaan Jawa terkait erat dengan masalah kepemilikan tanah. Pedesaan Jawa selama beberapa kurun waktu telah menjadi "bagian integral dari sistem produksi kapitalisme" (Knight, 1982; Rutgers, 1947; dalam Husken, 1988). Interpretasi Marxisme klasik – terutama yang dirumuskan Lenin (1899) bertolak dari pemisahan yang berjalan secara berlanjut dan polarisasi di kalangan petani, yang akhirnya sampai pada hilangnya golongan petani kecil yang mandiri: "...suatu proses yang khas untuk ekonomi kapitalis yang akhirnya menghilangkan golongan petani menengah dan memperkuat posisi golongan yang ekstrem yaitu golongan borjuasi pedesaan dan petani miskin (Husken, 1988:52).

Untuk kasus Cimandiri misalnya, kelompok masyarakat yang mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian mereka terbagi menjadi beberapa kelompok, yang pertama, kelompok buruh tani atau yang kerap disebut

sebagai kuli sawah. Mereka adalah kelompok yang relatif paling miskin diantara kelompok masyarakat petani lainnya. Selanjutnya ada petani kecil, petani penggarap, pengumpul dan tengkulak serta petani besar. Namun pada dasarnya, para petani itu terbagi menjadi dua golongan besar, mereka yang menguasai tanah dan mereka yang tidak memiliki tanah sama sekali. Dalam konteks ini mereka menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses kapitalisme pasar itu sendiri.

Kelompok yang berada pada posisi yang paling bawah dalam struktur sosial-ekonomi masyarakat di perdesaan adalah keluarga-keluarga buruh tani. Mereka adalah kelompok masyarakat yang sedari awal tidak memiliki asset selain peralatan tani yang sederhana, yang oleh Migdal (1974) dikatakan memiliki relasi *matuh* terhadap kelas sosial lainnya, memiliki respon-respon yang khas atas pengaruh dari luar desa, tidak memiliki orientasi yang jelas atas perubahan, partisipasi politiknya didasari oleh semangat pragmatisme dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya (lihat juga Scott, 2000). Untuk menjelaskan persoalan ini baiknya kita lihat satu per satu bagaimana situasi keluarga buruh tani perdesaan saat ini.

Buruh tani atau yang kerap dipanggil kuli sawah oleh masyarakat, saat ini dapat digolongkan menjadi dua tipe berdasarkan relasi sosial mereka dalam bekerja di sawah, yakni, buruh tani yang memiliki patron tetap dan yang tidak memiliki patron tetap atau serabutan. Dalam penelitian ini, saya kemudian membandingkan dua keluarga buruh tani di Desa Cimandiri, tepatnya di Kampung Cimandiri Ilir, yang memiliki pola kerja berbeda.

Patronase buruh tani di perdesaan merupakan warisan lama dari sistem pertanian tradisional. Dalam konteks masyarakat Eropa, patronase sendiri merupakan satu bentuk ikatan sosial lama yang hidup dan berkembang di masa feodalisme zaman kerajaan. Namun dengan adanya proses modernisasi, dimana kekuatan kerajaan semakin hari semakin pudar, berganti dengan bentuk kekuasaan negara, idealnya sistem patronase semakin melemah dan ditinggalkan oleh banyak orang (Mazlish 2000). Akan tetapi situasi ini belum

tentu berjalan secara deterministik di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Patronase yang merupakan warisan dari masa aristokrasi, dalam prosesnya dikembangkan kembali oleh kelompok elit di desa demi kepentingan mereka. Biagioli (1993:15) dalam Mazlish (2000) mengatakan bahwa patronase sendiri adalah satu upaya sistematis yang merupakan hirarki dan identitas sosio-kultural yang dibangun dan dikelola dalam rangka meng-*exercise* kekuasaan.

Contoh keluarga buruh tani adalah Dedih dan Ukas, mereka adalah sepasang suami istri, yang laki-laki berusia sekitar 60 tahun lebih sementara istrinya lebih muda 10 tahun, sekitar 50-an tahun lebih.⁴⁰ Perawakan Dedih telah terlihat cukup tua, berbadan kurus serta keriput-keriput di wajahnya nampak terlihat dengan jelas. Sementara Ukas, istrinya, terlihat lebih muda dan agak gemuk. Yang cukup mencolok dalam kesehariannya Ukas mengenakan perhiasan gelang emas, cincin emas serta kalung dan anting emas. Rumah mereka sendiri berada di pinggir jalan, tidak jauh dari rumah keluarga H. Udin, hanya berjarak sekitar beberapa meter saja, bentuk rumah sudah permanen, ditembok, tetapi tidak di cat, di depannya ada teras tanpa kursi yang sering digunakan untuk menyimpan hasil kebun seperti pisang yang akan dijual oleh Dedih. Rumah itu terdiri dari tiga kamar tidur, ruang tamu sekaligus ruang keluarga dan dapur serta kamar kecil yang cukup bersih.

Mereka adalah keluarga buruh tani yang telah puluhan tahun menjadi klien dari seorang pemilik tanah di kampung itu. Sebut saja mereka bekerja pada Haji Udin, yang merupakan anak dari H. Yusuf, sesepuh desa yang memiliki lahan cukup besar yang selanjutnya diwariskan kepada anak-anaknya. Pekerjaan sebagai buruh tani ini merupakan pekerjaan yang diwariskan secara turun temurun dari orang tua Dedih. Orang tua Dedih sekarang masih ada namun sakit-sakitan sehingga sudah tidak mampu lagi untuk bekerja di sawah. Selama ini, orang tua Dedih bekerja pada H. Yusuf, ayah dari H. Udin. Keluarga orang tua Dedih pada mulanya memang telah *matuh* pada H. Yusuf, sehingga pada kesempatan-kesempatan bekerja di sawah, orang tua Dedih

⁴⁰ Pada saat mereka ditanya mengenai usia, kebanyakan buruh tani yang sudah cukup tua tidak bisa mengingat dengan jelas berapa usia mereka.

seringkali mengajak Dedih kecil untuk ikut membantu bekerja di sawah. Selanjutnya ketika H. Yusuf wafat, sebagian besar tanahnya diwariskan kepada tiga orang anaknya, yakni H. Sodik, H. Udin dan H. Somad. Kepada ketiga anaknya inilah usaha pertanian keluarga diteruskan meski saat ini konsentrasi kepemilikan tanah telah terpecah. Dampaknya kemudian, anak-anak almarhum H. Yusuf tentu saja memerlukan tenaga kerja untuk emnggarpa lahan-lahan mereka, alhasil, H. Udin meminta Dedih untuk bekerja padanya. Dalam prosesnya kemudian, Dedih mengajak istri dan anaknya untuk bekerja dan *matuh* pada keluarga H. Udin.

Selama beberapa waktu, Dedih dan keluarga – istri, anak dan kakak perempuan Dedih – bekerja sebagai kuli sawah di lahan milik H. Udin. Dari sana mereka bisa mendapatkan bagi hasil atas panen padi sebesar 1 banding 5, 1 untuk mereka, 4 untuk H. Udin. Pembagian hasil dari bertanam padi ini tidak mengalami perubahan semenjak zaman dahulu. Hanya saja jika dahulu menggunakan sistem pocong karena tanaman padi yang memang jenis tinggi, saat ini telah diganti dengan sistem kilo, karena sabit telah menggantikan ketam sebagai alat panen.

Tetap langgengnya mekanisme sistem bagi hasil bagi masyarakat miskin diperdesaan, mengutip Husken (1988) adalah karena dalam situasi yang sangat sulit seperti ketiadaan lahan dan potensi tenaga kerja yang berlebih, mereka mendapat jaminan akan pekerjaan yang tetap dan dalam waktu-waktu sulit mereka setiap waktu dapat mengharapkan pertolongan dan bantuan dari majikan pemilik tanah mereka. Sementara bagi si pemilik tanah, mekanisme ini sangat menguntungkan apabila dibandingkan dengan upah harian, apalagi ketika varietas padi sekarang mesti ditanam dengan persyaratan-persyaratan yang lebih berat, seperti, mesti ditanam dengan baris yang lurus dan mesti lebih sering disiangi karena lebih cepat menumbuhkan gulma. Selain itu, dengan mekanisme ini, para pemilik tanah memiliki waktu luang yang lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang lain, seperti berpolitik, berdagang dan istirahat. Relasi ekonomi seperti ini juga seringkali dimanfaatkan oleh para pemilik tanah untuk memobilisasi para buruh dalam urusan politiknya.

Seluruh hasil dari bertanam padi digunakan untuk keperluan sehari-hari mereka, dan tidak untuk dijual. Selain itu, Dedih juga diberikan kepercayaan untuk menggarap lahan kecil di sekitar sawah H. Udin yang tidak ditanami padi. Dedih kemudian menanaminya dengan pisang. Secara rutin, hasil panen pisang dia jual untuk menambah pemasukan.

Untuk pekerjaan lain seperti bertanam non-padi, Dedih biasa memperoleh upah Rp. 20.000 *sa-bedug*, sedangkan istri atau kakak perempuannya mendapatkan Rp. 10.000 *sa-bedug*. Tentu saja upah ini tidak begitu saja mencapai tingkat seperti itu. Menurut pengakuan Dedih, ia sempat merasakan upah kuli sawah Rp. 7.500 *sa-bedug* sedangkan istrinya sempat merasakan upah Rp. 2.500 *sa-bedug*. Dedih tidak pernah diberikan upah atas pekerjaan-pekerjaan tambahan baik di rumah ataupun di luar rumah yang dibebankan kepadanya, namun diakhir masa panen, H. Udin biasa menambahkan bagiannya sebagai bentuk kompensasi atas pekerjaan-pekerjaan tambahan yang pernah dilakukan Dedih. Hal ini dimaknai oleh Dedih sebagai satu bentuk kemurahan hati H. Udin terhadap dirinya.

Dedih merasa nyaman bisa bekerja pada H. Udin, meskipun ketika saya tanyakan mengapa jumlah bagi hasil tidak pernah mengalami kenaikan, mereka dengan sedikit kesal mengatakan tidak tahu dan bahwa hal itu sudah dari sananya seperti itu, mereka tidak berhak untuk protes. Tetapi jika urusannya adalah upah harian, mereka bisa meminta untuk dinaikkan, dengan alasan-alasan pada umumnya, seperti, kenaikan harga BBM yang mendorong harga-harga kebutuhan pokok naik semua. Sepanjang hidupnya, Dedih dan keluarga tidak pernah bekerja kepada orang lain, kecuali H. Udin. Hal ini dilakukan sebagai bentuk *matuh* kepada H. Udin sehingga setiap saat tenaganya dibutuhkan oleh H. Udin ia selalu siap. Ia tidak ingin mengecewakan H. Udin yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya.

Menjadi klien dari seorang pemilik tanah di desa, cukup bisa diandalkan oleh Dedih dan keluarga. Bagi Dedih, keluarga H. Udin sendiri seperti dikatakan oleh Migdal (1974) merupakan satu institusi sosial yang memiliki fungsi perlindungan dan keamanan bagi keluarganya yang tidak memiliki alat

produksi lain selain peralatan pertanian yang sederhana. Namun, saat ini situasi keamanan dan kenyamanan yang mereka miliki tidak lagi bisa diperoleh karena pada bulan Juli tahun 2008, H. Udin meninggal dunia. Dengan wafatnya H. Udin, otomatis tanah-tanahnya diwariskan kepada anak-anaknya yang berjumlah 6 orang. Hanya sedikit tanah yang disisakan untuk istrinya. Situasi tidak seperti beberapa tahun lalu dimana Dedih bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang diwariskan dari orang tuanya. Saat ini tidak ada satupun anak H. Udin yang mau mempekerjakan dirinya sebagai kuli di sawah mereka. Hal ini cukup membuat Dedih dan keluarganya kecewa, karena walau bagaimanapun, relasi *matuh*-nya dia selama ini seperti tidak dihargai sama sekali oleh anak-anak H. Udin. Padahal seperti dia katakan, bahwa anak-anak H. Udin sesungguhnya dibesarkan oleh dirinya, karena dialah yang memberikan makan kepada anak-anak H. Udin selama ia bekerja di sawah orang tuanya. Dia mengeluh, telah beberapa bulan ini dia hanya mendapatkan pekerjaan dua kali bedug di ladang orang. Dedih menunjukkan bahwa pekerjaannya selama ini menjadi muruh dari majikannya, sesungguhnya memiliki arti lebih bagi anak-anak sang majikan. Dia merasa bahwa pada dasarnya, dengans segala pengorbanannya selama ini, dia juga memiliki andil terhadap hidup anak-anak majikannya. Hanya karena jerih payahnya lah anak-anak H. Yusuf bisa makan dan tumbuh menjadi seperti sekarang ini.

Saat ini tentu saja Dedih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dari orang lain, apakah pekerjaan bertanam padi di sawah dengan sistem *ngepak*. Ataupun pekerjaan di ladang sebagai buruh harian dengan upah harian. Padahal situasi di Desa Cimandiri saat ini masih bisa dikatakan kekurangan pekerja buruh harian, seperti pengakuan keluarga buruh tani dan petani penggarap yang lain. Akhirnya, Dedih mencari jalan keluar dengan memberanikan diri untuk bekerja kepada orang di luar desanya. Kabar terakhir yang saya dengar, dia bekerja sampai ke luar kecamatan. Pekerjaan yang sama, menjadi buruh tani untuk seorang pemilik tanah di daerah Batu Hulung. Rupanya kesempatan untuk bekerja kepada orang lain di desa ini sudah tertutup baginya. Ketika saya tanyakan perihal kesulitan yang dialami Dedih

kepada salah seorang pengumpul di Cimandiri Ilir, pengumpul itu hanya mengatakan bahwa Dedih selama ini tidak mau bekerja pada orang lain meskipun dia ditawari. Dia cukup mengandalkan H. Udin yang selama beberapa kurun waktu menjadi majikan tetapnya. Sekarang, tidak seorang pun pemilik sawah atau pengumpul mau mempekerjakan dia. Bahkan dalam beberapa hal Dedih dianggap ingin menyaingi para pengumpul di desa ini dengan mencoba menjadi tengkulak pisang. Dalam salah satu pergunjungan yang dilakukan oleh dua orang tengkulak kecil di satu sore, mereka mengatakan bahwa Dedih tidak layak menjadi seorang tengkulak karena dia tidak memahami etika diantara tengkulak. Mereka mengatakan bahwa diantara tengkulak semestinya mengerti untuk tidak mengambil untung terlalu besar.

Dari sisi politik, keluarga Dedih tidak bisa disamakan dengan dua contoh keluarga sebelumnya. Keluarga ini termasuk yang tidak antusias terhadap urusan politik. Bagi mereka kebutuhan yang paling penting adalah mendapatkan pekerjaan untuk bisa menggarap sawah, apakah dengan sistem *ngepak* atau dengan sistem upah harian. Bagi mereka politik tidak akan bisa diandalkan, karena politik tidak akan pernah bisa merubah hidup mereka. Biasanya dalam menentukan pilihan politik pada saat pemilu-pemilu sebelumnya, mereka senantiasa mengikuti arahan yang diberikan oleh H. Udin, memilih Golkar. Seperti yang telah diceritakan di muka bahwa H. Udin termasuk orang yang pernah aktif di organisasi BTI. Pasca 65 praktis H. Udin tidak lagi bisa secara bebas ikut serta dalam proses politik di desa ini. Ia cukup berkonsentrasi untuk mengerjakan sawahnya berikut beberapa usaha di luar sektor pertanian seperti penyewaan alat-alat pesta yang saat ini sudah tidak ada lagi, bangkrut karena pengelolaan yang kurang baik dari anak-anaknya. Dalam konteks hubungan antara Dedih dengan sang majikan, maka pilihan politik menjadi tidak penting, yang jauh lebih penting adalah kepastian dan keamanan yang dia bisa dapatkan dari H. Udin. Ketika H. Udin wafat dan dinamika politik Indonesia kemudian berkejolak di tahun 98, Dedih menemukan situasi yang menurutnya sama sekali baru. Hidup tanpa ada sandaran yang pasti, tentu sangat sulit dihadapi oleh orang yang selama puluhan tahun bekerja dan menjadi abdi dari salah seorang tuan tanah di

kampungnya. Ketidakmampuan untuk mengembangkan jaringan sosial menjadi faktor utama mengapa Dedih dan keluarga sulit mendapatkan pekerjaan di desa ini, padahal di satu sisi desa ini masih membutuhkan banyak tenaga kerja untuk mengerjakan sawah dan ladang penduduk. Kondisi yang sebaliknya dialami oleh pasangan keluarga buruh tani yang lain, yang akan saya ceritakan selanjutnya.

Keluarga buruh tani itu adalah keluarga Romli dan Encu. Seperti halnya keluarga Dedih, mereka adalah sepasang suami istri yang sepanjang hidupnya tanpa pernah libur – kecuali sakit – bekerja sebagai kuli sawah di Cimandiri. Encu berusia 56 tahun, sementara Romli sepuluh tahun lebih tua dari Encu, 66 tahun. Tidak ada kata libur bagi mereka karena dengan libur berarti mereka akan kehilangan pendapatan hari itu, mereka akan kesulitan untuk membeli makanan ataupun keperluan harian lainnya. Tidak ada terminologi perlindungan dan keamanan bagi kelompok buruh tani seperti mereka. Yang senantiasa ada merupakan segala bentuk ketidakpastian. Kepastian yang ada hanyalah kesulitan hidup yang setiap hari mereka terima. Buruh tani seperti ini, digambarkan oleh Migdal (1974), sebagai kelompok yang telah kehilangan bentuk patronasinya, mereka kemudian mengandalkan kelompok keluarga atau kekerabatan kecil untuk mencoba membangkitkan sistem keamanan dan perlindungan yang sebelumnya mereka miliki dalam menghadapi bentuk-bentuk pengaruh dari luar.

Dalam kasus suami istri Romli dan Encu misalnya, seperti kebanyakan buruh tani serabutan lainnya, mereka merupakan pendatang di desa ini. Romli berasal dari daerah Ciomas, kurang lebih 5 kilometer dari Cimandiri, sementara Encu berasal dari Karawang. Mereka pindah ke Cimandiri sekitar 25 tahun yang lalu (kira-kira tahun 80-an). Sebelum tinggal di Cimandiri Ilir, mereka pernah tinggal di Cimandiri Udik selama beberapa tahun, tetapi karena mereka merasa lokasi itu masih sangat sepi, mereka memutuskan untuk pindah dan tinggal di Ilir. Bagi mereka berdua, perkawinan ini adalah perkawinan kedua mereka. Romli sebelumnya pernah menikah tanpa dikaruniai anak, sementara Encu merupakan janda beranak dua. Dari perkawinan ini mereka

dianugerahi 8 orang anak. Saat ini hanya tinggal 2 orang yang masih tinggal bersama, lainnya telah berkeluarga dan tinggal terpisah dari mereka. Anak terkecilnya berusia kira-kira 9 tahun, sementara kakak laki-lakinya berusia antara 13-15 tahun.

Selama beberapa kurun waktu pasangan suami istri itu mengandalkan tenaga mereka untuk bekerja mendapatkan uang sebagai buruh tani serabutan. Ketika mereka memiliki anakpun, anak mereka dilibatkan untuk bekerja sebagai buruh tani agar bisa menambah pemasukan bagi keluarga. Setelah anak-anak mereka dewasa dan berkeluarga, mereka kembali bekerja berdua untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Namun sejak beberapa bulan yang lalu, Romli tidak mampu lagi untuk bekerja di sawah, saat ini dia mengalami permasalahan pada saluran kemihnya. Untuk buang air kecil saja dia mesti menggunakan selang yang disambungkan dari saluran kandung kemihnya, ditempelkan di kaki kanannya. Alhasil, Encu sang istri, saat ini menjadi andalan bagi keluarga tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, karena yang bisa dilakukan Romli sekarang hanya sekedar berjalan-jalan di sekitar rumahnya, lebih jauh dari itu, atau jikalau mesti bekerja macul di sawah, dia sudah tidak mampu lagi. Peran kepala keluarga yang sebelumnya dipegang oleh Romli, saat ini berpindah ke tangan Encu. Selain urusan-urusan domestik di dalam rumah, dia juga mesti bekerja setiap hari dari pagi sampai siang di sawah. Selain itu, untuk undangan-undangan hajatan atau rapat-rapat di RT, Encu seringkali menggantikan peran suaminya, itu pun jika acaranya ada dalam waktu-waktu senggangnya. Dengan kata lain, Encu sekarang menjadi kepala rumah tangga.

Satu hal yang cukup disyukuri oleh Encu adalah tidak pernah putusnya orang menawarkan pekerjaan kepadanya. Hampir setiap hari ada saja orang yang memintanya untuk bekerja, dan dia termasuk orang yang tidak pernah mengecewakan orang lain dalam bekerja di sawah. Tidak pernah ia menolak tawaran bekerja selain jika dirinya sakit. Hal ini juga yang pada kesehariannya mampu mengatasi problem keuangan rumah tangganya. Keluarga Encu dan Romli memang selama ini tidak pernah memilih-milih dalam bekerja. Meski

mereka tidak memiliki patron kultural, namun mereka cukup jeli untuk menangkap potensi pekerjaan yang besar karena jumlah buruh tani di desa ini semakin hari semakin sedikit. Saat ini saja selain bekerja dengan sistem *ngepak* kepada seorang pemilik sawah kecil dari Cimandiri Kulon, dia juga menjadi buruh harian pada sawah-sawah yang dimiliki oleh orang lain, termasuk kepada para tengkulak kecil seperti Obar yang sering kali menyewa lahan atau mendapat hak garap dari pemilik lahan. Upah harian yang diperoleh Encu biasanya berkisar antara Rp. 12.000 sampai dengan Rp. 15.000 *sa-bedug*. Sebelumnya dengan masih bekerjanya sang suami, pendapatan mereka per hari berkisar diantara Rp. 30.000 sampai dengan Rp. 40.000, dengan kisaran upah harian buruh laki-laki sebesar Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 25.000 *sa-bedug*. Pendapatan sebesar itu biasa mereka gunakan untuk dibelanjakan keperluan sehari-hari seperti beras dua liter – dimasak satu liter pagi dan satu liter sore – plus lauk-pauk dan uang jajan anak. Hanya sekitar Rp. 5000 sampai Rp. 10.000 dia bisa simpan untuk keperluan lainnya yang mendadak.

Kondisi yang saya ceritakan diatas adalah ketika suami istri itu masih sanggup untuk bekerja. Sekarang situasinya jauh berbeda, karena hanya tinggal Encu yang bekerja, pendapatan keluarga mereka turun drastis. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga pun mereka merasa sangat kekurangan.



Gambar 7. Buruh Tani Perempuan

Dalam mengatasi problem keuangan rumah tangga ini mereka melakukan dua strategi, yang pertama lebih kepada manajemen keuangan rumah tangga atau saya sebut sebagai *inward strategy* atau cara ke dalam, serta yang kedua mengkapitalisasi jaringan keluarga dan kekerabatan atau saya sebut sebagai *outward strategy* atau cara keluar. Cara yang *pertama*, yakni cara ke dalam adalah dengan tidak mengambil langsung upah harian mereka, tetapi diakumulasikan dulu sampai seminggu. Hal ini dilakukan agar uang itu cukup untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya untuk waktu seminggu. Jika diambil setiap hari mereka justru khawatir tidak mampu membeli kebutuhan mereka karena selalu habis setiap harinya. Contohnya, ketika mereka bekerja kepada Obar, sang tengkulak kecil. Meski tidak setiap hari mereka bekerja pada Obar, tetapi pendapatan harian mereka bisa mereka simpan di Obar sampai kira-kira cukup untuk mereka ambil dan belanjakan. Ketika mereka mesti menebus beras raskin yang disediakan oleh pemerintah melalui pemerintah desa, misalnya, dengan harga beras sekilo Rp. 2000, mereka mendapat jatah 5 liter untuk satu keluarga, oleh karenanya mereka mesti menyimpan dahulu pendapatan harian mereka, baru kemudian mereka ambil setelah jumlahnya cukup untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain.

Sedangkan cara *kedua* adalah cara keluar, dimana mereka berupaya untuk memfungsikan jaringan kekerabatan dan keluarga mereka untuk menanggulangi persoalan-persoalan yang lebih besar seperti apabila ada yang sakit. Dalam soal ini, ketika Romli sakit dan perlu dioperasi misalnya, mereka kemudian memanggil anak-anaknya ke rumah dan meminta bantuan keuangan guna operasi sang ayah. Cara ini dikatakan sebagai satu upaya kelompok buruh tani untuk membangun sistem proteksi sendiri untuk melindungi diri mereka dari eksploitasi luar serta sebagai sarana bagi mereka untuk secara sosial bergerak dalam system sosial yang lebih luas (Migdal:1974).



Gambar 8. Seorang Buruh Tani di Depan Rumahnya

Pekerjaan sebagai buruh harian, tidak hanya ia lakukan di sekitar kampung atau dalam desa, pada beberapa kesempatan Encu dan Romli pernah bekerja ke lokasi yang cukup jauh, yakni Cimahpar. Setiap hari mereka dijemput oleh pemborong untuk bekerja di Cimahpar sebagai buruh tani untuk menyiapkan tanaman lidah mertua yang akan ditanam. Dalam sejam ia memperoleh Rp. 15.000, dan dia bekerja selama satu minggu. Pekerjaan seperti ini bagi dirinya dianggap berkah yang tak ternilai harganya. Selain itu, dia juga pernah bekerja pada satu perusahaan pembibitan di desa ini, yang mempekerjakannya sebagai buruh untuk memasukkan bibit ke dalam polibag. Untuk satu bibit yang dia siapkan ia memperoleh Rp. 1500, dengan produktivitas 25-30 bibit setiap hari, ia bisa membawa uang ke rumah lebih besar ketimbang menjadi kuli sawah harian di kampungnya. Meski pekerjaan-pekerjaan itu masih dalam lingkup sektor pertanian, namun dalam konteks ini mereka bisa memperoleh hasil yang lebih besar karena hubungan kerjanya lebih profesional ketimbang kuli sawah. Encu pun menyukai pekerjaan seperti ini, karena selain hasilnya lebih besar dari bekerja sebagai kuli sawah, jika ia sakit sehingga tidak masuk kerja pun, ia tetap memperoleh gaji.

Dari sisi tempat tinggal, rumah mereka sudah termasuk permanen, di tembok tapi tidak di plester dengan halus. Di depan rumah tidak ada teras dalam artian bagian dari rumah, hanya sebuah balai bambu diletakkan untuk mereka duduk-duduk pada sore hari. Rumah dengan ukuran kurang lebih 50 meter persegi itu

terdiri dari ruang tamu sekaligus ruang keluarga, dua kamar tidur, dapur dan kamar mandi. Lantainya hanya diplester biasa tidak dikeramik, di ruang depan itu terhampar tikar.

Untuk kebutuhan lainnya seperti lauk pauk, sayuran, serta garam atau ikan asin, keluarga ini mengandalkan tukang sayur yang lewat atau warung-warung kecil yang berada di sekitar tempat tinggal mereka. Pergi ke pasar bagi mereka merupakan satu hal yang cukup langka. Biasanya mereka ke pasar untuk keperluan yang sangat istimewa sekali, bahkan dalam setahun mereka bisa hanya satu kali ke pasar, yakni, menjelang lebaran.

5.1.3. Dinamika Strategi Kelompok Petani Penggarap

Para petani penggarap biasanya berasal dari kelompok buruh tani yang tidak memiliki tanah atau asset lainnya, sebelumnya mereka termasuk kelompok yang bergantung penuh pada sistem produksi pertanian yang didominasi oleh para pemilik tanah di desa. Terbukanya ruang komunikasi untuk berhubungan dengan dunia luar memungkinkan mereka untuk bisa mengambil kesempatan menjadi buruh tani. Kesempatan tersebut biasa diperoleh melalui jalur kekerabatan dengan keluarga mereka yang tinggal di perkotaan ataupun melalui kedekatan mereka dengan para elit desa. Dengan kata lain, terbukanya suatu masyarakat perdesaan terhadap pengaruh dan intervensi dari luar (kota) memungkinkan terbukanya kesempatan dan peluang baru bagi kelompok buruh tani ataupun petani kecil untuk melakukan mobilitas vertikal, ataupun mereposisi hubungan sosial mereka di dalam struktur sosialnya.

Dalam penjelasan Hiroyoshi Kano (1977) dapat kita telaah sejarah yang menyertai munculnya sistem penggarapan di Jawa dipengaruhi oleh sistem tanam paksa yang digunakan oleh pihak kolonial. Dalam sistem tanam paksa ini munculnya pihak penggarap adalah dikarenakan kebutuhan tenaga kerja yang tinggi pada saat itu. Para penggarap biasanya adalah kelompok pendatang. Untuk diterima secara resmi sebagai warga desa, mereka mestilah melakukan wajib kerja di tanah-tanah komunal. Di tanah komunal ini kemudian, mereka secara bergiliran menunaikan kewajibannya untuk bekerja. Dalam jangka waktu tertentu, tanah komunal itu kemudian dibagikan kepada

para pekerjanya, namun tanah itu tidak serta merta dimiliki oleh para penggarap. Tetap saja mereka hanya diberikan hak garap tanpa boleh menjual apalagi menjadikan tanah itu sebagai modal. Sistem penggarap ini pada masa-masa awal kemerdekaan RI menjadi polemik yang cukup hangat dibicarakan dalam rangka menyusun Undang Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960. Sistem panggarap, adalah satu sistem yang bila dilembagakan akan berarti bahwa tak seorang atau keluarga pun yang dapat memiliki tanah kecuali bila mereka menggarapnya sendiri (Lyon 2008) dalam Tjondronegoro dan Wiradi (2008). Cerita masa lalu mengenai petani penggarap kiranya menjadi cerminan betapa problem pemilikan tanah dan tenaga kerja menjadi basis penting struktur produksi pertanian di Jawa. Oleh karena itu, pertanyaan yang cukup relevan pada saat ini, bagaimana situasi petani penggarap ketika perubahan sosial-politik di perdesaan berjalan cepat seperti sekarang ?

Dalam kasus Cimandiri, ada dua keluarga petani penggarap yang menjadi perhatian peneliti. Keluarga petani penggarap yang pertama adalah Jali, sementara yang kedua adalah keluarga Engkon atau Umi. Jali, sosok yang telah saya ceritakan sedikit diatas. Seorang ayah dengan 11 orang anak, dia kebetulan menantu dari Romli dan Encu – keluarga buruh tani yang telah saya ceritakan juga sebelumnya. Jali sendiri telah lama menjalani hidupnya sebagai buruh tani, selain sebagai buruh tani, pada masa pemerintahan Lurah Amir, dia diangkat menjadi anggota hansip di desa. Pada saat itu sekitar tahun 80-an, orde baru masih begitu kuat mencengkeram desa-desa di Indonesia. Satu hal kenapa pemerintah desa pada waktu itu mengangkatnya sebagai keamanan desa atau hansip (pertahanan sipil) adalah karena kemampuannya dalam ilmu bela diri cukup diakui oleh masyarakat. Selain itu, kampung dimana ia tinggal, Cimandiri Udik, adalah kampung yang memiliki stereotip sebagai kampung tempat mangkalnya orang-orang jahat seperti pencuri, perampok dan pemabuk. Lokasinya pun sangat terpencil dan sulit diakses karena ketiadaan jalan menuju ke kampung itu. Oleh karenanya untuk menjaga keamanan kampung, dipakailah orang-orang seperti Jali sebagai keamanan desa.

Sosok Jali saat ini jauh berbeda dengan Jali beberapa tahun lalu. Jika sebelumnya Jali dikenal sebagai seorang jawara kampung, tukang mabuk, suka berjoget di atas panggung dengan biduan-biduan orkes dangdut serta sering menampung orang-orang dari luar desa yang tidak jelas asal usulnya. Saat ini telah terjadi perubahan total pada dirinya. Dia telah merubah identitasnya menjadi seorang sesepuh kampung, pemimpin kelompok majelis taklim, dan menganggap dirinya sebagai "orang pintar". Perubahan ini akan menjadi bahasan selanjutnya dari tulisan saya.

Saat ini Jali tinggal bersama seorang istri yang usianya terpaut cukup jauh, sekitar 15 tahun lebih muda dari Jali. Dengan 11 orang anak hasil perkawinannya dengan dua orang istri, dia cukup jumawa untuk mengatakan bahwa laki-laki itu mestilah mendominasi hubungan suami istri, dan istri mestilah patuh dan tunduk pada suami. Kelihatan sekali betapa dalam rumah tangga perdesaan seperti Jali, posisi suami menjadi sangat superior terhadap istrinya. Mereka tinggal di kampung Cimandiri Udik, kampung yang saat ini sudah terbuka dengan adanya akses jalan setapak dari dan keluar kampung itu. Penduduk di Udik tidaklah banyak, sekitar 20 kepala keluarga. Meski letak Udik cukup terpisah dengan kampung lainnya, namun secara administratif mereka masih satu RT dengan Cimandiri Ilir. Meski Jali bukanlah termasuk orang-orang pertama yang mendiami Kampung Udik, namun saat ini bisa dikatakan bahwa dia adalah tokoh penting di Udik, karena berbagai hal yang antara lain : keberadaan rumah tempat dia tinggal yang letaknya di ujung jalan setapak, terletak di paling selatan dari kampung kecil itu. Tepat dibelakang rumahnya terhampar tempat pemakaman umum, yang dalam perkembangannya nanti, tempat pemakaman umum itu sangat berarti bagi upaya reposisi Jali dalam membentuk identitas barunya. Rumahnya semi permanen, bagian depan sudah ditembok, meski dengan plesteran yang kasar. Selanjutnya, ruang tidurnya ada tiga buah, ruang tamu plus ruang keluarga yang dilengkapi dengan televisi, serta perangkat *sound system* seperti *amplifier* dan penguat suara. Namun selama saya disana, televisi itu tidak pernah dinyalakan, kemungkinan besar memang sudah rusak. Bagian belakang rumahnya adalah dapur dengan tungku masak serta seperangkat kompor dan

tabung gas 3 Kg pembagian pemerintah. Disamping rumahnya terlihat tumpukan kayu bakar yang senantiasa tersedia. Peralatan tani seperti cangkul dan arit diletakkan disamping rumahnya. Rumah-rumah tetangganya di Udik tidak jauh berbeda bahkan sebagian besar masih menggunakan bilik bambu.

Sebagai seorang hansip, tentu saja Jali memiliki kenalan dengan orang-orang dari luar desa. Namun salah satu hal yang paling memungkinkan baginya untuk banyak memiliki kenalan dari luar desa adalah dengan seringnya ia mengajak orang dari luar desa untuk tinggal bersamanya di rumah. Menurut pengakuannya, jika dia menemui orang yang sedang mengalami kesulitan, maka sudah kewajiban baginya untuk menolong orang itu. Tetapi alih-alih mengajak orang untuk tinggal dan menetap dirumahnya, Jali seringkali melibatkan orang-orang seperti ini untuk ikut bekerja menggarap sawahnya atau menggarap sawah milik orang. Telah banyak ia membawa orang ke rumahnya. Menampung orang itu untuk beberapa saat kemudian memberi orang itu pekerjaan sebagai buruh tani di sekitar kampung Cimandiri. Tidak jarang ia mengawinkan orang-orang itu dengan keluarganya ataupun tetangganya.

Dari apa yang dilakukannya, ia mampu memperluas jaringan kekerabatannya sampai ke luar desa. Bahkan tidak jarang dari kota-kota besar seperti Jakarta atau Bandung. Apa yang ia lakukan sebenarnya sangat rasional untuk tujuan memperoleh peluang yang lebih luas dalam hal ekonomi. Kasus yang bisa dijadikan sebagai contoh betapa Jali memperoleh banyak keuntungan akibat apa yang dia lakukannya itu adalah, seringnya orang-orang dari kota datang ke tempatnya untuk sekedar main ataupun sampai ke urusan-urusan yang sifatnya lebih serius. Orang-orang yang datang untuk urusan main misalnya, seringkali membawa berbagai macam kebutuhan pokok untuk dirinya. Bahkan ada juga yang kerap meninggalkan uang untuk sekedar membeli rokok ataupun lainnya. Yang lebih serius seringkali datang untuk urusan-urusan bisnis seperti keperluan untuk mencari tanah untuk investasi. Dengan kesempatan yang lebih terbuka ini, keberadaan Jali semakin diperhitungkan oleh masyarakat sekitar Cimandiri. Untuk urusan lahan garap, telah disebutkan sebelumnya

bahwa ia memperoleh lahan milik desa seluas kurang lebih 200 meter. Lahan itu dikelola sendiri olehnya.

Coba bandingkan dengan sosok petani penggarap yang lain, yakni Rohimah.. Rohimah adalah seorang janda beranak lima. Sebelum menjadi petani penggarap, Rohimah adalah seorang buruh tani tidak tetap. Ketika suaminya masih ada, ekonomi keluarga ditopang oleh pekerjaan suaminya yang juga tidak tetap, serabutan namun bukan di sektor pertanian. Ketika suaminya wafat, praktis, Rohimah menjadi tulang punggung keluarga. Saat ini dari kelima orang anaknya, hanya satu yang masih tinggal satu rumah dengannya, Komar, anak bungsunya itu. Anak-anaknya yang lain sudah berkeluarga dan tinggal terpisah dengannya, 2 orang berkeluarga dan tinggal di Ilir, sementara 1 orang di Kalimantan dan 1 orang lagi di Serpong. Anaknya yang bungsupun sudah memiliki pekerjaan sebagai seorang tenaga pemasaran dari salah satu bank di Bogor. Rohimah sudah terlihat sepuh, padahal usianya baru 56 tahun. Mungkin karena begitu lama ia seorang diri menanggung beban keluarga tanpa suami sehingga terlihat lebih tua dari usianya. Dia sendiri lahir di Cimandiri Ilir, masa kecilnya dihabiskan di Bogor dan Jakarta. Sekolahnya hanya sampai SD, karena ketika SD ayahnya meninggal. Dia urung melanjutkan sekolah karena ketiadaan biaya. Dari enam bersaudara ia anak nomor empat. Menikahi suaminya pada tahun 1969.

Awal mula menjadi petani penggarap adalah pada tahun 1989, ketika ada kawan dari kerabatnya yang tinggal di Jakarta menginginkan untuk membeli tanah di wilayah Bogor. Dari sini kemudian, Rohimah menawarkan tanah yang ada di Cimandiri, tepatnya di daerah Cikampak. Proses itu berlanjut, dan Rohimah selaku perantara dari proses jual beli itu mendapat kepercayaan untuk menjaga tanah itu. Sebagai imbalan dari menjaga tanah tersebut, Rohimah diperbolehkan untuk mengelola dan menggarap tanah itu, tanpa ada kewajiban untuk menyerahkan hasilnya kepada si pemilik tanah. Tanah dua petak yang dikelola Rohimah tersebut secara bergiliran ditanami dengan padi atau palawija. Jika ditanami padi, biasanya Rohimah memperoleh sekitar 1,5 kwintal beras. Jumlah ini didapat setelah dipotong bagi hasil *ngepak*. Serta

ongkos penggilingan. Sementara itu dengan sukarela dan atas dasar kesadaran sendiri, setiap selesai panen padi, Rohimah senantiasa mengirimkan beras kepada pemilik tanah sebanyak 50 kg. Meski tidak ada kewajiban atau permintaan dari pemilik tanah, hal ini dilakukan sebagai bentuk terima kasih dirinya kepada si pemilik tanah.

Beberapa tahun kemudian, si pemilik tanah yang merupakan pensiunan pegawai negeri di Jakarta berkeinginan untuk membeli lagi tanah di Cimandiri, kali ini Rohimah kembali menjadi perantara dengan menawarkan tanah di daerah Cimandiri Ilir, singkatnya, dua petak tanah kemudian berpindah kepemilikan kepada si orang kota. Hal ini juga menimbulkan konsekuensi perluasan tanah garapan milik Rohimah. Eksistensinya sebagai petani penggarap semakin kuat dengan bertambahnya tanah garapan. Sejalan dengan wafatnya sang suami, profesi petani penggarap menjadi aktivitas ekonomi utama keluarga ini. Namun demikian, tidak ada kepastian sampai kapan tanah ini akan digarap olehnya, karena tanah tersebut bisa setiap saat dijual oleh pemiliknya, atau diambil dan digarap sendiri oleh pemiliknya. Dengan kata lain profesi sebagai petani penggarap seperti Rohimah tidak memiliki kepastian. Dalam konteks jual beli tanah seperti inilah, konflik horizontal antarindividu atau antar keluarga bisa mengemuka, karena proses jual beli tanah yang melibatkan orang lain sebagai pihak ke-3 bukan hanya menyangkut komisi penjualan, lebih jauh dari pada itu hal ini terkait dengan peluang seseorang untuk bisa menjadi petani penggarap dalam jangka waktu yang cukup lama.

Dari ke semua tanah garap itu, selain ditanami padi, Rohimah juga menggilirnya dengan palawija seperti ubi jalar, jagung, kacang tanah atau bengkuang. Saat ini sawah di Cikampak ditanami dengan ubi jalar, sementara yang di Ilir ditanami dengan padi. Untuk modal tanam, dia senantiasa mengandalkan modal sendiri, tetapi jika tidak ada modal dia biasa minta kepada anak-anaknya. Belum pernah ia berhutang ataupun meminjam uang dari pihak lain. Modalnya seringkali habis setelah panen padi, karena hasilnya dia konsumsi langsung tidak dijual. Berbeda dengan tanaman palawija yang

sudah pasti dia jual. Dan menurutnya tidak perlu membagi hasil panen palawija kepada pemilik tanah, karena kurang pasti dimanfaatkan secara langsung, tidak seperti halnya beras.

Menanam padi dengan luasan seperti yang dimiliki Rohimah tentu tidak mungkin menguntungkan secara ekonomis, berbeda jika dia tanami palawija. Namun menanam padi menjadi satu keharusan, karena ia butuh beras untuk makan sehari-hari. Perihal permodalan, berbeda dari keterangan Rohimah, saya mendapat informasi lain yang mengatakan bahwa Rohimah kerap menggunakan jasa para tengkulak kecil di kampung untuk memperoleh modal. Tidak jarang ia menyewakan lahan garapnya untuk digarap orang. Informasi ini tidak diberikan kepada saya oleh Rohimah karena kekhawatirannya apabila pemilik tanah tahu bahwa ia sering menyewakan lahannya kepada orang lain, maka ada kemungkinan hak garapnya bisa dicabut atau dialihkan kepada orang lain.

Untuk pekerja atau kuli sawah, Rohimah biasa menggunakan jasa Encu untuk *ngepak*, sementara untuk kuli harian tidak tetap, sering berganti-ganti, bisa siapa saja yang dia minta, termasuk Encu. Bahkan untuk saat ini misalnya, dia memborongkan pekerjaan penggalian di sawah Cikampak kepada dua orang kuli, dia bayar dengan sistem borongan Rp. 250.000, dikerjakan dalam waktu 5 hari. Keuntungan sistem borongan dari sistem upah harian, dia tidak perlu lagi memberikan kopi, rokok ataupun makan untuk para kuli. Meskipun jika dihitung dengan sistem upah harian, totalnya tidak jauh berbeda, dengan asumsi upah buruh tani pacul (laki-laki) sebesar Rp. 20.000 – Rp. 25.000 per hari. Sedang untuk *ngeluku* biasa dibayar Rp. 50.000 sa *bedug*. Untuk *ngoret* biasanya dia menggunakan tenaga buruh tani wanita.

Mengenai buruh tani wanita, pada awalnya hanya ada dalam sistem *ngepak*. Dalam penanaman palawija tidak ada buruh tani wanita yang ikut serta. Karena pekerjaan dalam produksi palawija biasanya berupa *macul*, *ngoret* serta panen, pekerjaan yang menjadi domain laki-laki. Perubahan dengan mulai ikut sertanya buruh tani perempuan pada penanaman palawija baru ada di awal tahun 90-an, itupun setelah ada tanaman bengkuang yang ditanam oleh

penduduk. Dengan adanya proses pemangkasan pucuk-pucuk tanaman bengkuang, maka buruh tani wanita bisa terlibat. Selanjutnya barulah mereka ikut *ngoret* dengan bayaran Rp. 5000 *sa-bedug*. Untuk jagung biasanya tidak dia jual kepada tengkulak. Dia akan panen sendiri, dengan alasan agar bisa dimanfaatkan juga oleh dirinya dan keluarganya. Atau dia jual sendiri di rumah kepada para tetangga.

Menurut pengakuan Rohimah, saat ini cukup sulit untuk mencari buruh tani. Karena semakin sedikit orang muda yang mau menjadi buruh tani. Lebih banyak yang pergi ke kota untuk menjadi pembantu, buruh tani yang sekarang kebanyakan seangkatan dengannya. Jika dibandingkan, menjadi pembantu lebih enak daripada menjadi kuli sawah. Pagi hari mereka berangkat, bekerja di dalam rumah, makan disediakan oleh majikan, pulangunya bisa membawa makanan pemberian majikan, sedangkan ongkos diganti sehingga gaji utuh.

5.1.4. Persoalan Kepemilikan Tanah Penguasa dan Elit Desa

Kelompok elit desa pada umumnya merupakan keturunan dari leluhur-leluhur desa sehingga mereka mewarisi bentuk-bentuk kekuasaan, baik yang sifatnya material seperti penguasaan atas tanah-tanah desa, ataupun yang sifatnya immaterial seperti warisan otoritas lokal dari orang tuanya. Mereka menguasai tanah dan sawah, mampu secara efektif mengoptimalkan program-program pemerintah di perdesaan, mengeksploitasi kelompok masyarakat miskin melalui berbagai macam hubungan-hubungan sosial dan ekonomi, serta mengkooptasi kekuasaan negara yang dioperasikan sampai ke tingkat desa. Dalam struktur produksi pertanian di perdesaan, maka kelompok elit desa ini memiliki kecenderungan menguasai rantai produksi dari awal sampai akhir. Dalam perkembangannya elit desa kemudian ada yang dominan dan ada yang tidak dominan. Sementara keluarga-keluarga penguasa tanah di desa pada perkembangannya juga mengalami perubahan, ada segolongan orang yang mampu terus menerus mengakumulasi kekayaannya melalui perluasan tanah-tanah pertanian, ataupun membuka sektor ekonomi baru di luar pertanian, sementara keluarga yang lain, secara perlahan mengalami disakumulasi kekayaannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

Trah Penguasa Pemerintahan Desa dan Sejarah Silsilah Keluarga

Secara administratif, Cimandiri sebagai satu kesatuan masyarakat hukum baru terbentuk di tahun-tahun 70-an. Namun secara sosiologis sebagai satu kesatuan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sampai sekarang ini, sesungguhnya Cimandiri yang dahulu bernama Cilubang telah berusia lebih dari dua ratus tahun. Dari catatan yang saya peroleh dan berdasarkan cerita-cerita orang-orang desa, maka bisa diketahui bahwa pada tahun 1800-an saja dari desa ini telah muncul seorang ulama yang cukup disegani di wilayah Bogor. Meski kemudian ulama itu tidak menetap di Cimandiri tetapi tinggal di Kota Bogor.⁴¹ Ulama itu bernama H. Naidan, yang dimakamkan di dekat pemakaman umum Belender, Tanah Sareal, Bogor. Saat ini makamnya dikeramatkan oleh banyak orang, sehingga selain keluarga atau keturunannya, banyak pula yang berziarah ke makam ini. Keturunan H. Naidan yang saat ini masih tinggal di Desa Cimandiri diantaranya adalah Suma, yang pernah menjabat ketua RT pada tahun 60 sampai 70-an. Sedangkan anak dari Suma adalah Ahmadi yang telah saya ceritakan di awal. Salah seorang keturunan H. Naidan yang pernah menjabat sebagai kepala desa adalah Ujang Ahmad. Dia merupakan kepala desa ke-4 dari 16 kepala desa yang tercatat dalam catatan Ahmadi mengenai orang-orang yang pernah menjabat sebagai kepala desa di wilayah Cimandiri.

Selain itu, saat ini ada tokoh yang cukup disegani sebagai sesepuh di Desa Cimandiri, yakni Herman, seorang mantan lurah pada masa awal reformasi (1999-2004). Herman sendiri merupakan cucu dari Irin Ailah, yang pernah menjabat sebagai kepala desa antara tahun 1930-1940. Kemudian yang paling dikenal dan sangat membekas di hati masyarakat adalah kepemimpinan Lurah Ardo yang menjabat sebagai kepala desa pada tahun 60-an sampai 70-an. Dia menjadi kepala desa pasca tragedi berdarah 30 September 1965. Pada saat itu dia mampu tampil sebagai sosok yang sangat dihargai oleh masyarakat karena

⁴¹ Muhamad Daud Sudargan, seorang mantan Jaksa di Kota Bogor, anak mantan Wedana, melakukan wawancara kepada sanak saudaranya perihal asal usul silsilah keluarganya. Catatan wawancara itu kemudian diketik rapi olehnya dan di bundel menjadi sebuah buku. Dari buku ini banyak diperoleh informasi mengenai perkembangan masyarakat khususnya Sukawening dan Bogor pada umumnya pada masa-masa kolonial sampai awal-awal republik berdiri.

program-program pembangunan desa yang dia pimpin dianggap berhasil, sejalan dengan program pembangunan orde baru pada saat itu.

Lurah Ardo masih keturunan dari Lurah ke-5 Cimandiri, yakni Lurah Ali. Lurah Ali menjabat sebagai kepala desa kira-kira pada tahun 40-an. Masa-masa dimana Indonesia baru saja berdiri sebagai republik.

Selain orang-orang yang disebutkan diatas, kiranya kiprah kepala desa yang sekarang yakni Rokib perlu dilihat lebih jauh. Rokib adalah warga Cimandiri Kulon, yang secara historis tidak dihitung sebagai faksi politik yang cukup kuat di desa ini. Rokib yang terpilih pada pilkades 2004 dalam sejarahnya masih ada hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan pejabat lurah pada tahun 90-an, yakni Asmadi. Karena pada saat itu, Lurah Amirudin berhalangan, maka digantikan secara sementara oleh Kepala Dusun Cimandiri Kulon, yakni Asmadi. Sekertaris Desa Cimandiri, selama dua periode ini dipegang oleh Ugan, yang masih keturunan dari H. Naidan, kerabat dari Ahmadi .

Dari penjelasan diatas, kiranya kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa, kekuasaan pemerintahan di level desa, dalam perjalanannya memang mengalami perubahan dari sisi orang-orang yang berkuasa. Namun demikian jika kita lihat lebih dalam lagi, mereka semua itu masih merupakan keturunan atau kerabat dari para leluhur desa atau elit-elit lama desa. Perubahan penguasaan politik pemerintahan di desa, terbatas pada lingkaran elit-elitnya saja, sementara itu kelompok non elit cukup mengalami kesulitan untuk mengakses sumber-sumber kekuasaan itu. Penjelasan yang lain, kenapa kemudian para keturunan-keturunan itu mewarisi semangat berkuasa para pendahulunya, salah satunya adalah karena adanya sejarah yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Contohnya adalah Ahmadi , yang merupakan keturunan dari H. Naidan, yang kakeknya pernah menjabat sebagai lurah, dan ayahnya ketua RT. Dia dan keluarganya memiliki catatan sejarah mengenai desa ini, dimana leluhur-leluhur mereka pernah memiliki kekuasaan yang cukup berpengaruh disertai *priviledge* dan hak atas tanah yang cukup luas. Bahkan dalam beberapa kali diskusi, Ahmadi mengingatkan kepada saya,

bahwa para pemimpin Desa Cimandiri saat ini lupa akan sejarah yang pernah terjadi di desa ini. Dan hanya orang yang mengerti sejarahlah yang mampu menjadi pemimpin. Dengan kata lain, Ahmadi sebagai seorang penerus dari leluhur desa, merasa memiliki kewajiban moral untuk bisa mengembalikan kekuasaan desa kepada yang berhak. Dan hak itu diperoleh karena faktor sejarah yang pernah berlangsung di desa ini. Pada titik ini kiranya benar bahwa sejarah adalah milik yang menang. Meskipun dalam konteks struktur yang lebih besar seperti negara, sejarah keluarga besar H. Naidan merupakan sejarah kelompok yang kalah, namun pada level yang lebih rendah, sejarah mereka berpeluang dan berpotensi menjadi sejarah besar yang bisa menjadi sangat hegemonik pada level desa karena sejarah mereka lebih dahulu memasuki fase literasi ketimbang sejarah keluarga-keluarga yang lainnya.

Strategi Tuan Tanah, Dari yang Bertahan Sampai yang Menghilang

Tidak secara deterministik kita bisa mengatakan bahwa para keturunan pemilik tanah di perdesaan mengalami situasi yang membaik dan menguntungkan bagi mereka hari ini. Dalam perkembangannya para pemilik tanah di perdesaan, tidak juga bisa menghindari dari hambatan-hambatan sosial di sekitar lingkungan mereka atau keluarga mereka, sehingga kepemilikan atas tanah tidak lagi mampu dipertahankan atau ditambah. Justru sebaliknya, banyak para keturunan pemilik tanah yang sedikit demi sedikit kehilangan hak atas tanah milik mereka. Namun dalam beberapa kasus, para pemilik tanah lama di desa tetap bisa mempertahankan bahkan mengakumulasi luasan tanah mereka dengan berbagai strategi.

Hal ini berbeda dengan kesimpulan Jeffrey (2000) dalam satu studinya di perdesaan India. Dalam hubungannya dengan apparatus pemerintah, kelompok orang kaya di perdesaan India dalam satu situasi demokrasi yang terbuka memiliki kemampuan mengelola hubungan mereka dengan aparat kepolisian serta menguasai jaringan birokrasi pemerintah lokal, yang dengan ini mereka bisa mengisolasi, mengeksploitasi dan memperdaya masyarakat miskin di sekitar mereka. Pandangan Jeffrey yang begitu deterministik ini, tidak bisa digunakan untuk menggeneralisir seluruh kelompok pemilik tanah di perdesaan. Karena pada kasus-kasus tertentu, menjadi independen atau tidak terikat

dengan urusan-urusan kekuasaan sengaja dipilih oleh para pemilik tanah. Dengan begitu, memungkinkan mereka untuk menghilangkan ongkos-ongkos sosial atau politik yang muncul akibat relasi dengan pemerintah ataupun kelompok politik.

Konsep khas kaum Marxian ini, kiranya sering kita dengar, mengenai akumulasi dan disakumulasi kapital para pemilik tanah di perdesaan. Dalam perkembangannya, para penguasa-penguasa tanah itu mengalami pasang surut atas kepemilikan lahan mereka. Dalam konteks Haji Daud misalnya, H. Daud sendiri adalah seorang keturunan pemilik tanah lama di Cimandiri. Sampai hari ini dia mampu mempertahankan bahkan memperluas kepemilikan sawahnya. Jika kita berdiri di belakang rumah Jali, misalnya, maka kita akan melihat hamparan sawah yang luasannya berhektar-hektar ditanami padi dan palawija. Itulah tanah H. Daud. Berdasarkan cerita beberapa orang, H. Daud saat ini adalah orang terkaya di Cimandiri, karena selain tanahnya paling luas sampai wilayah Desa Sukadamai, dia juga memiliki sejumlah toko di pasar. Menurut keterangan orang-orang yang saya temui, ada beberapa strategi untuk memperluas tanah miliknya, yang *pertama* dengan mengawinkan anak-anaknya dengan keluarga pemilik tanah yang lain sehingga luasan tanah keluarga menjadi bertambah, dalam istilah bisnis mungkin ini sering disebut sebagai *merger*. *Kedua*, adalah dengan membatasi anak-anak mereka untuk bersekolah terlalu tinggi. Bagi H. Daud, anak-anak cukup bisa membaca dan berhitung, selanjutnya mereka tidak perlu untuk belajar lebih banyak. Yang kemudian dia lakukan kepada anak-anaknya adalah memberikan modal atau membelikan tanah untuk anak-anaknya berusaha. Dari sini kemudian anak-anak H. Daud benar-benar menjadi pengusaha yang untuk ukuran desa bisa dibilang sangat sukses. Anak-anak mereka meskipun pendidikannya tidak tinggi namun dari sisi pendapatan bisa dibilang cukup memadai. Saat ini anak-anak H. Daud ada yang berusaha di sektor pertanian langsung, ada pula yang membuka toko di pasar. Lantas bagaimana persepsi orang-orang kepada H. Daud?

Dalam beberapa kesempatan dan obrolan saya dengan orang-orang di desa, teranglah bahwa H. Daud tidak terlalu mendapat apresiasi yang baik dari masyarakat. Meski dia orang kaya, banyak yang menganggap bahwa H. Daud cukup pelit dan tidak peduli dengan orang-orang miskin di sekitarnya. Tidak ada orang yang saya ajak bicara mengemukakan hal-hal baik soal H. Daud, bahkan mereka menyayangkan mengapa H. Daud tidak menyekolahkan anak-anak mereka sampai tinggi. Yang penting juga adalah pandangan aparat desa kepada H. Daud, menurut keterangan seorang mantan pengurus desa Cimandiri, H. Daud cukup sulit untuk diajak bekerja sama. Pada satu ketika pemerintah desa mengadakan survey sosial ekonomi di tingkat desa, aparat desa itu mengalami kesulitan bahkan untuk bertemu saja dengan H. Daud. Setelah bertemu pun H. Daud sulit untuk dimintai keterangan terutama perihal luasan tanah yang saat ini dimiliki olehnya. Apalagi jika dimintai bantuan untuk memberikan bantuan atau dukungan sosial bagi kegiatan-kegiatan di masyarakat, H. Daud sungguh pelit dan tidak mau tahu dengan urusan semacam itu.

Sementara itu, lain H. Daud, lain pula dengan H. Udin misalnya. H. Udin adalah seorang keturunan pemilik tanah lama desa ini, yakni H. Yusuf. Telah disebutkan sebelumnya bagaimana keluarga H. Yusuf ini menguasai banyak lahan di Cimandiri. Tetapi dalam prosesnya, H. Yusuf yang kemudian mempunyai tiga orang anak, membagi warisannya rata kepada ketiga anaknya. Salah seorang anak H. Yusuf, yakni H. Udin, dalam perkembangannya memiliki enam orang anak, yang ketika H. Udin wafat, tanah yang dimilikinya diwariskan kepada anak-anaknya. Sampai saat ini tidak semua anaknya berhasil mempertahankan kepemilikan atas tanah mereka, sebagian besar dijual, malah saat ini ada seorang anaknya yang menjadi petani kecil dengan luasan lahan yang tergolong sempit. Meski begitu, berbeda dengan H. Daud, H. Udin menyekolahkan beberapa orang anak-anaknya sampai jenjang perguruan tinggi. Dan tidak ada satupun anak-anak mereka yang mengambil posisi politik di pemerintahan desa, meski hampir semuanya tinggal di Cimandiri. Dengan kata lain, anak-anak H. Udin seperti halnya kasus keluarga pemilik tanah di Subang Utara yang ditemukan oleh Breman. Dengan

menggunakan terminologi surat anasib, Breman menggambarkan bagaimana tuan tanah yang mempunyai banyak anak, pada akhirnya tidak mampu mewariskan posisi hegemonisnya dimata masyarakat akibat tidak ada satupun anaknya yang mampu menjadi tokoh di lingkungan desa itu.

Berbeda misalnya dengan H. Zainal, dia adalah saudara kandung H. Udin, anak dari H. Yusuf. H. Zainal memang tidak termasuk orang yang mampu mengakumulasi kapital seperti halnya H. Daud, namun dia tidak seperti H. Udin dan keluarganya. Saat ini, tanah yang dimiliki H. Zainal memang tidak mengalami penambahan luasan dari dahulu sampai sekarang, tetapi dia juga tidak kehilangan tanah miliknya itu. H. Zainal berprofesi sebagai guru, mengajar di satu sekolah dasar di daerah Petir. Dari profesinya inilah dia kemudian tidak lagi mengandalkan sektor pertanian sebagai sandaran hidup keluarga. Saat ini tanah yang dimilikinya dikelola oleh satu keluarga buruh tani di daerah Cikampak. Anak-anak H. Zainal, semuanya sekolah sampai perguruan tinggi dan masing-masing bekerja di kota. Hanya pada saat-saat tertentu mereka pulang ke Cimandiri untuk mengunjungi orang tuanya. Tetapi yang paling penting dari sosok H. Zainal sekarang adalah dia begitu mendapat penghargaan yang tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan begitu hormatnya masyarakat dan perangkat desa kepadanya. Kelompok masyarakat yang berpendidikan pun seperti guru-guru di SD Cilubang 02 sangat menghormati beliau. Saat ini H. Zainal selain menjadi guru SMP di daerah Petir, dia juga menjabat sebagai ketua sekaligus bendahara DKM Masjid Al ittihad. Jabatan lainnya yang bisa dijadikan sebagai penanda bahwa dia mendapat penghormatan dari masyarakat adalah sebagai ketua komite sekolah SD Cilubang 02, Cimandiri Ilir.

Dengan melihat fenomena diatas, kiranya kita bisa lihat bahwa para keturunan pemilik tanah lama di desa, dalam perkembangannya mengalami situasi yang cukup beragam dan dinamis. Ada kelompok yang mampu mempertahankan dominasinya dibidang ekonomi sehingga dalam struktur produksi pertanian di masyarakat mereka masih menempati posisi yang cukup tinggi, ada pula yang perlahan-lahan kehilangan cengkeramannya dan ada yang secara stabil mampu

mengganti dominasi dalam bidang ekonomi pada struktur produksi pertanian dengan masuk ke dalam ranah kekuasaan lain di luar sektor pertanian yang dengannya dia mampu menjaga dan mempertahankan prestise dan privilege yang pernah dimilikinya. Dalam satu situasi demokrasi yang terbuka seperti sekarang ini, kiranya relasi dengan aparat pemerintah tidak lagi bisa menjadi satu patokan apakah orang kaya di desa mampu mempertahankan dominasinya atau tidak.

Inilah yang kemudian membedakan situasi sekarang dengan masa orde baru. Di masa orde baru, karena dominasi negara begitu kuat, maka relasi dengan kekuasaan menjadi prasyarat penting bagi elit desa untuk menjaga kelangsungan dominasi mereka di perdesaan. Tetapi untuk saat ini, kelompok elit di perdesaan memiliki banyak alternatif untuk bisa mempertahankan kekuasaannya, negara dalam hal ini hanya menjadi salah satu faktor saja yang tidak senantiasa dominan. Disinilah letak perubahan yang mendasar bagi kelompok elit, pada satu kesempatan negara bisa negasikan. Sementara bagi kelompok miskin, situasi atau tindakan yang diambil oleh kelompok elit menjadi tidak relevan untuk diperhitungkan oleh mereka karena, dalam struktur sosial di desa mereka tetap tidak mampu melampaui kekuasaan yang dipegang oleh kelompok elitnya.

Kelompok Tuan Tanah Baru

Disamping mereka-mereka yang merupakan keturunan para penguasa tanah lama di perdesaan, ada juga orang-orang yang masuk kategori pemilik tanah baru di perdesaan. Namun perlu dibedakan bahwa tuan tanah baru dalam kasus ini adalah mereka-mereka yang tinggal dan menetap di desa, bukan orang luar yang hanya membeli tanah kemudian memberikan hak garap kepada orang lain. Orang-orang seperti ini adalah kelompok pendatang yang memiliki kekuatan modal untuk berinvestasi di sektor pertanian. Mereka menguasai produksi dari hulu sampai hilir. Selain memiliki lahan untuk produksi pertanian mereka juga memiliki kios-kios dipasar plus kendaraan pengangkut untuk membawa hasil pertanian milik mereka dan milik petani yang lain ke pasar.

Dalam kasus ini kiranya fenomena Ahub menjadi penting untuk dilihat. Ahub adalah seorang pendatang yang tinggal di Cimandiri sejak tahun 90-an awal. Sebelum terjun ke bisnis pertanian, Ahub terlebih dahulu memiliki kios di pasar yang menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari bagi orang-orang. Peluang dan potensi pasar yang begitu terbuka terhadap hasil-hasil pertanian, pada prosesnya cukup menggoda Ahub untuk juga bermain dalam proses produksi pertanian itu. Lantas ia kemudian membeli sebidang tanah di Cimandiri untuk dia tanami padi. Dia kemudian mendirikan rumah di desa ini juga. Dalam perkembangannya ia kemudian mampu menambah luasan lahan miliknya. Bahkan saat ini dia sudah mampu untuk membuka beberapa kios di pasar. Hubungannya dengan aparat desa cukup baik, ia juga suka menyumbang dalam kegiatan-kegiatan sosial di desanya.

Salah satu strategi untuk mendapatkan dukungan tenaga kerja yang dipercaya olehnya adalah dengan melibatkan seluruh keluarga dalam bisnis yang digelutinya. Seperti halnya H. Daud, Ahub tidak menyekolahkan anak-anaknya sampai tinggi, ketika sang anak sudah bisa membaca, menulis dan berhitung, maka baginya sudah cukup. Si anak mestilah diberikan kepercayaan untuk berbisnis. Oleh karenanya, anak-anak Ahub tidak ada yang bersekolah sampai tinggi, namun, semuanya saat ini sudah memiliki kios sendiri di pasar. Dari hari ke hari usaha Ahub semakin lancar dan berkembang. Begitulah, bahwa modernisasi di bidang pendidikan oleh sebagian kalangan pemilik tanah dimaknai sebagai faktor yang menghambat mereka dalam mendapatkan tenaga-tenaga untuk melanggengkan atau menambah kapasitas usaha mereka. Pertanyaannya kemudian, apakah sekelompok masyarakat non elit, kaum miskin di perdesaan yang seringkali mengabaikan pendidikan anak-anak mereka untuk ikut dipekerjakan dalam pekerjaan-pekerjaan buruh tani di sawah, memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok elit yang melakukan hal itu juga. Jika ya, maka ada kecenderungan nilai yang sifatnya universal dan lintas kelas yang memang mengakar dalam kehidupan masyarakat desa. Jika tidak, kemungkinan besar semua ini hanya urusan ekonomi saja.

5.2. Dinamika Perekonomian Desa Pasca Reformasi.

Dalam kegiatan produksi pertanian di sawah saat ini, peran tengkulak amat penting dalam memperlancar transaksi-transaksi antara para petani kecil dan pasar. Tengkulak sangat mendominasi arus komoditas pertanian di Cimandiri sampai ke pasar-pasar baik di Bogor maupun Jakarta. Mereka adalah orang-orang yang berperan sebagai perantara antara para petani dan pasar. Para tengkulak kecil yang jumlahnya puluhan orang ini merupakan institusi perantara antara para petani dengan tengkulak besar di pasar. Pada dasarnya mereka masuk ke dalam golongan para *broker*, yang mencari rente pada rantai produksi pertanian di perdesaan. Karena ketiadaan institusi atau lembaga yang bisa menangani persoalan-persoalan pemasaran komoditas pertanian, maka keberadaan tengkulak di dalam sistem produksi pertanian menjadi begitu signifikan bagi para petani.

Dalam kenyataannya para tengkulak kecil di desa hanyalah kepanjangan tangan dari tengkulak-tengkulak besar di kota. Para tengkulak kecil ini sesungguhnya berada dalam situasi yang tidak menguntungkan dihadapan tengkulak besar atau bos mereka di pasar. Pada beberapa contoh dibawah ini nanti akan bisa kita lihat betapa tengkulak besar menjadi muara dari akumulasi keuntungan yang diperoleh dalam sistem ekonomi pertanian di perdesaan. Bahkan dalam beberapa contoh terjadi proses perpindahan kepemilikan tanah melalui proses hutang piutang yang terkesan sepele. Dan para tengkulak kecil ini tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem eksploitasi kelompok kapitalisme pasar. Yang lebih parahnya lagi, situasi ini tidak juga disadari oleh para petani kecil karena disamarkan melalui hubungan-hubungan kekerabatan diantara para petani dan tengkulak tingkat kampung. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, elemen positif dari struktur sosial masyarakat, yakni *trust* atau kepercayaan antarwarga menjadi modal utama para tengkulak untuk memperlancar strategi eksploitasi tersebut.

Hubungan kekerabatan yang dimiliki oleh kelompok tengkulak kecil dengan anggota masyarakat di kampungnya, mampu dikapitalisasi oleh para tengkulak besar. Pelibatan tengkulak kecil ini menjadi lebih berarti justru tatkala para petani kecil menyadari bentuk penindasan yang sebelumnya mereka alami. Tetapi alih-

alih mereka menyasati bentuk penindasan itu, justru mereka kembali terperangkap dalam bentuk penindasan lainnya.

Beberapa tengkulak kecil yang ada di wilayah Cimandiri, khususnya kampung Cimandiri Ilir, Cimandiri Kulon dan Cimandiri Udik antara lain Obar, Rudin, Aat dan Eep. Keempatnya adalah tengkulak-tengkulak kecil dengan kapasitas yang berbeda-beda dan jaringan pasar yang berbeda pula. Obar misalnya, tengkulak yang paling senior diantara keempat orang tengkulak lainnya itu memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan buruh tani di kampung ini. Sebagai tengkulak dia cukup aktif, tidak saja menampung dan menjual hasil pertanian orang lain melalui sistem borong yang kemudian berganti menjadi sistem bukti. Ia juga aktif untuk bertani di lahan istrinya yang diperoleh melalui warisan dari mertuanya. Selain menanam lahan sempit miliknya, Obar juga menyediakan jasa kepada semua orang tanpa terkecuali untuk menggadaikan tanah kepadanya. Sistem ini dinamakan sistem gadai.

Perawakan Obar sendiri tidak jauh berbeda dengan para buruh tani lainnya, setiap hari dia berangkat ke sawah dari pagi sampai siang kemudian diteruskan lagi dari siang sampai sore. Selain ulet, Obar juga memiliki jaringan yang cukup kuat di pasar. Jaringan ini tidak lain adalah tengkulak besar pedagang di pasar. Jaringan ini diperolehnya karena sebelum menjadi tengkulak seperti sekarang ini, Obar adalah mantan pekerja pasar. Dia pernah berprofesi sebagai kuli panggul di Pasar Induk Kramat Jati. Keputusannya untuk kembali ke kampung dan menjadi petani dilakukannya pada awal krisis moneter 1997. Dari situ kemudian usaha pertaniannya menjadi semakin lancar karena bos besarnya bersedia memberikan dana untuk membiayai pertaniannya ataupun memberikan hutang kepada petani lain yang memerlukan modal. Maka dari itu, dia tidak pernah kesulitan untuk mendapatkan modal usaha, dan jika ada petani lain yang ingin meminjam modal atau menggadaikan sawahnya, dia pasti mampu dan bersedia.

Sejalan dengan Obar, maka Eep yang wilayah operasinya berada di sekitar Cimandiri Ilir sampai Cimandiri Kulon, adalah juga seorang tengkulak kecil. Dengan mekanisme yang sama seperti Obar, dia menyediakan jasa bagi para petani yang ingin menggadaikan tanahnya. Perawakan Obar dan Eep jauh dari

bayangan perawakan seorang tengkulak di desa-desa. Mereka tidak jauh berbeda dengan perawakan orang-orang yang menjadi buruh tani. Sulit membedakan jika mereka sedang bekerja dan berkumpul bersama dengan buruh tani, mana yang buruh tani dan mana yang tengkulak. Padahal, secara ekonomi, tengkulak kecil ini memiliki kekuasaan yang lebih besar ketimbang para buruh tani. Posisi para buruh tani sebenarnya dikendalikan oleh para tengkulak ini. Meski bos besar Obar dan Eep berbeda, namun mereka sama-sama kepanjangan tangan dari para tengkulak besar di kota.⁴²

Sementara itu Rudin dan Aat, adalah tengkulak kecil yang sedang memulai atau merintis profesinya, sehingga dalam beberapa hal mereka tergolong masih belum bisa berbuat banyak untuk mengembangkan usahanya. Permodalan mereka pun relatif lebih sedikit ketimbang dua orang yang telah saya sebutkan sebelumnya. Selain itu mereka juga menghadapi kendala perihal tidak adanya jaminan pasar yang jelas dari tengkulak besar di kota. Inilah yang juga menyebabkan para petani dan pemilik komoditas pertanian belum bisa mempercayai mereka untuk memasarkan hasil pertaniannya. Jikalau ada petani yang mau, biasanya masih kerabat atau keluarga mereka. Jumlah dan jenis komoditas pertaniannyapun tidak terlalu signifikan. Bagi tengkulak-tengkulak kecil seperti Rudin dan Aat, maka ketidakpastian usaha mereka tidak jauh berbeda dengan ketidakpastian yang dialami para buruh tani. Salah satu kejadian di Kampung ini menunjukkan betapa di tengah ketidakpastian yang dialami oleh tengkulak kecil, para tengkulak besar di pasar bisa mengambil keuntungan yang berkali-kali lipat. Di tengah nuansa reformasi, desentralisasi serta gagasan besar revitalisasi pertanian dan perdesaan yang digulirkan pemerintah, para petani kecil, tengkulak kecil dan buruh tani masih saja terjebak dalam rantai eksploitasi kelompok pemilik modal besar di pasar.

5.2.1. Sistem Bukti, Kepercayaan Antar Warga dan Strategi Eksploitasi

Hubungan produksi antara pemilik komoditas pertanian dengan pasar dijumpai oleh para tengkulak kecil yang masih bisa dikatakan sebagai kerabat dekat ataupun tetangga mereka. Para tengkulak itu saat ini

⁴² Odih dan Kukun memiliki bos besar di Pasar TU, yakni pasar induk sayuran untuk wilayah Kabupaten Bogor.

menerapkan sistem bukti sebagai pengganti sistem borong. Sistem bukti sendiri dilakukan dengan tahapan-tahapan seperti ini, pertama, para tengkulak akan mendatangi pemilik hasil pertanian yang sebentar lagi masuk waktu panen. Begitu pula sebaliknya, dalam beberapa kesempatan seringkali para petani itu sendiri yang mencari tengkulak untuk menjual komoditas pertaniannya di pasaran.

Setelah mereka bertemu dan bersepakat untuk melepas hasil pertaniannya ini ke pasar, barulah kemudian, pada saat yang telah ditentukan, panen dilakukan oleh sang tengkulak, dengan menghitung seluruh hasil pertanian itu dengan cara ditimbang dihadapan pemilik lahan.⁴³ Setelah semua hasil ditimbang, barulah barang-barang itu diangkut oleh tengkulak ke pinggir jalan dengan menggunakan jasa kuli pikul. Bayaran untuk kuli pikul sendiri, saat ini sudah naik, dari Rp. 50/kg menjadi Rp. 100/kg. Setelah sampai di jalan, tengkulak ini kemudian menunggu komoditasnya diambil oleh bos besar mereka di pasar. Biasanya bos besar mereka di pasar cukup memerintahkan anak buahnya untuk mengambil barang yang telah dijanjikan dengan menggunakan kendaraan *colt* bak terbuka.

Setelah proses pembayaran dari tengkulak besar dilakukan kepada tengkulak kecil, baru kemudian tengkulak kecil membayar keseluruhan hasil komoditas pertanian itu kepada petani. Sebelumnya para petani sendiri mengaku tidak tahu menahu berapa harga jual di pasar. Mereka memasrahkan kepada para tengkulak untuk mengurus hal itu. Penjelasan dari para petani sendiri adalah bahwa, karena para tengkulak kecil tidak lain adalah tetangga-tetangga atau kerabat dekat mereka, maka mereka dengan kepercayaan penuh melepas komoditas pertanian mereka tanpa tahu berapa harga komoditas itu dipasaran. Meskipun mereka bisa menaksir berapa rupiah yang akan mereka peroleh dari penjualan hasil panen, namun tidak pernah ada percakapan sebelumnya antara para petani dengan tengkulak-tengkulak ini mengenai uang yang akan mereka

⁴³ Sistem penimbangan ini dilakukan langsung di depan pemilik lahan atau pemilik komoditas yang sedang dipanen. Sebelumnya mereka menerapkan sistem borong, dimana, ketika panen mereka tidak pernah menimbang berat hasil panennya, melainkan hanya dengan menaksir berapa nilai seluruh hasil panen. Cara ini dianggap lebih adil bagi para petani pemilik hasil panen.

peroleh. Bahkan tidak jarang ekspektasi mereka meleset. Kepercayaan yang diberikan oleh para petani pemilik hasil panen itu kiranya bentuk dari begitu kuatnya sistem kekerabatan yang ada di lingkungan mereka. Ada perasaan dari para petani, bahwa para tengkulak kecil ini tidak mungkin membohongi mereka atau menipu mereka. Bagi para petani, mengambil untung sedikit dari hasil panen mereka wajar dilakukan oleh para tengkulak. Karena selain mereka tidak perlu mengurus kemana barang itu akan dibawa, mereka juga merasa sudah sesuatu yang lumrah untuk membantu sanak atau kerabat mereka yang menjadi tengkulak kecil.

Contoh dari kasus ini adalah Rudin, yang seorang tengkulak kecil. Rudin adalah seorang tengkulak kecil yang masih tergolong pemula, dia sendiri memiliki jaringan yang sama dengan Obar. Dengan usianya yang baru menginjak 20 tahun, dia telah memberanikan diri untuk menjadi seorang tengkulak kecil di kampungnya. Satu kasus yang kebetulan saya jumpai ketika Rudin sedang memanen bengkuang dari ladang ayahnya. Dia menyatakan bahwa bengkuang itu dia beli dari ayahnya sebesar Rp. 1100/kg. Dalam praktiknya, bahasa membeli sebenarnya tidak secara langsung mengartikan satu bentuk transaksi nyata jual beli, melainkan satu bentuk kesepakatan antara dirinya dengan ayahnya, atau antara tengkulak dengan pemilik lahan. Dari kesepakatan yang telah dilakukan, Rudin mencari orang-orang yang mau menjadi kuli sawah guna memanen dan mengangkut bengkuang-bengkuang itu ke pinggir jalan desa. Biaya panen dan angkut sendiri sebesar Rp. 100/kg, sama seperti yang telah dikemukakan Eep sebelumnya. Selanjutnya bengkuang itu akan dikumpulkan di pinggir jalan, dan esoknya akan diambil oleh tengkulak dari pasar induk Kramatjati. Setelah bengkuang itu dibawa oleh tengkulak besar, baru kemudian ia mendapatkan uang untuk membayar bengkuang yang telah diambilnya kepada ayahnya. Menurut pengakuannya lagi, bengkuang itu bisa dilepas kepada tengkulak besar dengan harga Rp. 1300 -1350/kg kepada si tengkulak besar. Dengan kata lain, modal utama dia dalam proses penjualan bengkuang hanyalah untuk kebutuhan membayar kuli panen dan angkut. Sisanya, seperti pembelian bengkuang kepada ayahnya, baru akan ia berikan setelah proses jual beli dengan tengkulak besar dia

lakukan. Dari penjualan itu dia mampu mendapatkan keuntungan Rp.100 s/d Rp.150 setiap kilogramnya. Dari panen sebanyak kurang lebih 2 ton, Rudin mampu mendapatkan keuntungan antara Rp. 200.000 s/d 300.000. Jumlah yang cukup besar untuk ukuran petani di desa. Keuntungan yang semestinya bisa diperoleh langsung oleh pemilik bengkuang. Namun dikarenakan pemiliknya adalah ayah Rudin sendiri, maka pada titik ini bisa dikatakan bahwa sistem produksi pertanian yang dilakukan oleh keluarga Rudin sesungguhnya mencerminkan satu strategi distribusi pendapatan dalam keluarga petani. Meskipun pendapatan yang diperoleh masih sangat sedikit, namun upaya untuk mendistribusikan hasil itu kepada anggota keluarga menjadi penting. Dengan kata lain, dalam sistem usaha pertanian ini ada pertemuan antara dua sistem ekonomi, yang pertama sistem ekonomi kapitalis pasar dengan menggunakan jaringan para tengkulak di perdesaan, dengan sistem ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan.

Pada saat kegiatan pengangkutan bengkuang itu dilakukan, ada empat orang kuli pikul yang terlibat, kesemuanya laki-laki. Masing-masing membawa pikulan bambu, dan hasil pikul keempat kuli pikul itu dicatat dengan baik oleh Rudin, hal ini untuk memudahkan Rudin membayar mereka. Dari hasil panen yang kurang lebih 2 ton itu, Tidak secara merata masing-masing kuli pikul itu mendapat bagian, tergantung dari kemampuan mereka untuk mengangkut bengkuang. Siapa yang memiliki tenaga lebih besar, dia akan mendapat bagian yang besar pula, sementara bagi yang tidak terlalu kuat mengangkut, bagiannya tentu akan lebih kecil. Hubungan diantara mereka sekilas nampak biasa dan setara. Mungkin karena Rudin masih tergolong muda, sementara para kuli pikulnya telah cukup dewasa, lebih tua dari Rudin.

Hubungan sosial seperti ini bagi mereka cukup adil, meski dalam kenyataannya pihak yang paling diuntungkan dari rantai produksi yang penuh dengan nilai-nilai moral seperti ini adalah para tengkulak dan pedagang besar di pasar. Para pemilik modal besar yang senantiasa mampu mengkreasikan strategi untuk melakukan eksploitasi dengan mengambil rente di para petani. Untuk urusan sistem bukti ini, tidak ada perbedaan kapasitas tengkulak. Dari

ke empat orang yang saya sebutkan diatas, semuanya melakukan hal yang sama, karena praktis para tengkulak kecil ini tidak membutuhkan modal yang besar kecuali ongkos pikul yang harus dibayar langsung. Sedangkan uang untuk memebayar hasil panen baru dibayarkan setelah para tengkulak besar membayar mereka.

Pernyataan bahwa para tengkulak besar mengambil keuntungan yang paling besar terbukti dengan kasus Rudin, dua hari setelah proses panen itu, saya masih bisa melihat tumpukan bengkuang di pinggir jalan belum juga diangkat atau diambil oleh pedagang dari pasar. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Rudin sebelumnya, bahwa bosnya dari pasar akan segera mengambil barang itu. Tidak ada kesulitan untuk memasarkan bengkuang yang telah di penennya. Namun fakta bahwa bengkuang itu masih teronggok di pinggir jalan membuktikan bahwa para tengkulak besar bisa saja memainkan proses jual beli itu untuk tidak memenuhi harga yang mungkin diminta oleh Rudin. Bengkuang yang tidak diangkat itu, tentu saja menambah pembiayaan bagi Rudin, atau paling tidak telah menurunkan harga bengkuang.

5.2.2. Sistem Gadai, Dari Hutang ke Perpindahan Kepemilikan Tanah

Tengkulak kecil sekelas Aat ataupun Rudin, kiranya tidak atau belum bisa bermain dengan mekanisme ini, karena selain resikonya besar, dibutuhkan modal yang tidak sedikit untuk melakukan sistem gadai dalam produksi pertanian di desa. Hanya tengkulak kecil sekelas Eep dan Obar yang telah siap dengan sistem ini.

Sistem gadai tidak lain adalah sistem hutang yang dahulu dikembangkan oleh para lintah darat untuk menjerat kelompok petani miskin yang tidak memiliki modal cukup untuk bertani. Dengan memberi hutang kepada para petani miskin, kemungkinan besar petani-petani itu tidak dapat mengembalikan hutang mereka. Oleh karenanya, ada peluang untuk mendapatkan asset-asset para petani kecil itu, terutama tanah.

Salah satu tengkulak kecil yang sedang mendapat hak gadai adalah Eep, dia saat ini menggarap tanah gadai seorang warga dari Cimandiri Kulon. Sistem gadai adalah satu mekanisme di kalangan masyarakat petani di Cimandiri,

dimana para pemilik tanah biasa menggadaikan tanah mereka untuk kebutuhan-kebutuhan yang dianggap penting. Proses penggadaian itu dilakukan melalui kesepakatan antara pemilik tanah dengan sang tengkulak. Berapa nilai uang yang dibutuhkan oleh pemilik tanah, sejumlah itulah yang harus dipenuhi oleh si tengkulak. Biasanya untuk gadai si pemilik tanah lebih suka menggunakan emas sebagai ukurannya. Atau jika harus dengan uang, sebagian kecil jumlah itu tetap saja berupa emas.

Berdasarkan pengakuannya, Eep telah memberikan 30 gram emas kepada sang pemilik tanah yang saat ini tengah ia garap. Dia sendiri tidak mengetahui kapan itu akan dikembalikan, yang penting bagi dia, sebelum gadaian itu dikembalikan, dia bisa mengolah dan menggarap lahan si penggadai. Saat ini, tanah itu tengah ditanami terong biru olehnya, kebetulan sekali harga terong biru sedang jatuh, jika biasanya harga terong Rp. 3000/kg, saat ini harganya hanya Rp. 300/kg. Hal ini cukup merugikan dia sebagai petani yang mendapat tanah gadaian.

Mengenai banyaknya warga yang memilih emas untuk menggadaikan tanahnya, penjelasan Eep adalah karena harga emas relatif stabil dan cenderung terus naik. Sebenarnya semua itu terserah si penggadai, untuk pengembaliannya pun terserah si penggadai, mau dalam bentuk emas atau uang. Yang jelas, tidak ada tenggat waktu pengembalian uang itu, selama belum ditebus, maka tanah menjadi hak garap si tengkulak. Jumlah gadaian sendiri tidak berbunga atau bertambah, tidak seperti di pegadaian, pinjaman uang di bank atau di lintah darat yang terus menerus berbunga. Sistem gadai ini bagi tengkulak kecil seperti Eep sangat menguntungkan diambil hasilnya. Dia membandingkan dengan system sewa lahan yang menurutnya sangat merugikan bagi pihak yang menyewa. Jika lahan di sewa, maka petani seolah berkejaran dengan waktu. Sewa lahan selama satu tahun, maksimal hanya bisa tiga kali panen. Itupun seolah-olah dikejar oleh target, belum tentu hasil panen mencukupi biaya kebutuhan sewa plus produksi. Kisaran sewa lahan sendiri saat ini sekitar Rp. 1.000.000 per tahun.

Kelebihan system gadai bagi para tengkulak adalah, dalam beberapa kondisi system gadai bisa mendorong terjadinya perpindahan lahan dari penggadai kepada tengkulak. Caranya, ketika penggadai membutuhkan uang untuk kebutuhannya, tengkulak mesti siap untuk memenuhi kebutuhannya itu. Jika hal ini dilakukan terus menerus, sampai jumlah gadaianya mendekati harga tanah yang digadai, maka tengkulak biasanya menawarkan untuk memberikan sedikit uang atau emas agar tanah itu bisa dipindah tangankan kepadanya. Kecuali jika si pemilik tanah bisa melunasi hutangnya, maka tengkulak mesti angkat kaki dari lahan itu. Dalam konteks ini tidak ada paksaan atau tekanan yang melibatkan tindakan-tindakan kekerasan kepada petani yang menggadaikan tanahnya. Jika dahulu orang kerap dipaksa untuk melunasi hutang dan menyerahkan tanah mereka kepada tengkulak. Saat ini proses pengambilalihan tanah menjadi sangat halus. Meski menyesal karena telah melepas tanahnya, namun petani yang tanahnya diambil tidak merasa bahwa itu adalah satu bentuk ketidakadilan. Contohnya adalah Edi, warga Ilir yang pernah menggadaikan sepetak tanah yang kemudian dilepas kepada Obar. Proses pelepasan ini memakan waktu hampir lima tahun. Selama lima tahun itu tanahnya praktis diolah oleh Obar. Proses berhutangnya Edi dimulai dari kebutuhan yang mendesak untuk mengawinkan anaknya lima tahun lalu. Setelah dipikir-pikir, Edi memberanikan diri untuk menggadaikan tanah warisan orang tuanya kepada Obar sebesar tiga juta rupiah. Permintaan itu kemudian dituruti oleh Obar, dengan syarat tanah itu akan diolah olehnya selama Edi belum mampu melunasi hutangnya. Singkatnya, Edi menyetujui syarat yang diajukan Obar. Uang tiga juta rupiah itu dibayar Obar dengan menggunakan emas sebanyak 15 gram (harga emas waktu itu masih Rp.200.000/gram). Selama beberapa waktu Edi tidak juga bisa melunasi hutangnya kepada Obar. Bahkan beberapa kali Edi sempat meminjam uang dari Obar untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Singkat kata, dalam waktu lima tahun uang yang dipinjam oleh Edi kepada Obar sudah mencapai jumlah sekitar sepuluh juta rupiah. Sementara harga dari tanah itu sendiri sekitar 12-15 juta rupiah. Dalam satu kesempatan, Obar kemudian mengajukan keinginannya untuk memberikan Edi emas sebanyak 15 gram (dengan harga

emas kira-kira Rp.250.000/gram) sebagai penggenap dari harga tanah itu sendiri. Pada akhirnya Edi pun menyetujui untuk menerima tawaran dari Obar. Sejak saat itulah tanahnya berpindah tangan menjadi milik Obar.

Berdasarkan contoh itu, kita bisa lihat betapa tanah yang semula menjadi alat produksi bagi keluarga petani, dalam prosesnya diambil alih dengan cara yang sangat halus oleh para tengkulak. Dan menurut pengakuan Edi, tidak ada yang salah dengan proses itu, justru dalam banyak hal baginya Obar telah banyak membantu keluarganya ketika ia mengalami kesulitan keuangan. Meski dia merasa menyesal telah kehilangan tanahnya, namun baginya proses itu cukup adil dan *fair*. Bahkan ia tidak bisa membayangkan apabila harus menggadaikan tanahnya kepada pihak pegadaian. Bagaimana ia mesti membayar bunganya? Sementara berhutang kepada Obar sama sekali tidak dikenai bunga dan tidak pernah sekalipun Obar menagih hutang padanya. Dia cukup merelakan lahan miliknya digarap oleh Obar selama ia belum mampu membayar hutang gadai tanahnya.

Secara historis budaya menggadaikan lahan sawah ini, dalam catatan Sudargan (1988) disebutkan telah ada sejak zaman dahulu, transaksi seperti ini memang ada di kalangan Orang Sunda, bagian dari sistem adat Sunda itu sendiri, disebut dengan istilah *ngajual akad*.⁴⁴

Tengkulak kecil seperti Eep biasa mengandalkan "toke-nya" untuk urusan permodalan. Baik modal untuk penggarapan lahan yang dia peroleh, maupun modal untuk membayar uang gadaian kepada pemilik tanah. Dengan satu syarat, dia mesti menjual seluruh hasil pertaniannya hanya kepada bos besarnya itu, tidak boleh kepada orang lain. Sedangkan harga komoditas pertaniannya ditentukan oleh sang bos atau toke. Toke-nya yang kebetulan orang Cina itu memiliki kios di pasar TU.⁴⁵ Saat bercerita mengenai kondisi pertanian saat ini, Eep mengeluhkan betapa biaya produksi untuk pertanian

⁴⁴ Mengenai proses jual akad ini, Sudargan mencontohkan apa yang pernah terjadi dalam keluarga besarnya, dimana orang tuanya membeli kembali tanah yang pernah dijual oleh salah seorang anggota keluarga besarnya yang pernah di jual pada tahun 40-an. Seolah ada satu kewajiban untuk mengembalikan kembali tanah milik keluarga yang merupakan warisan dari orang tua mereka.

⁴⁵ Pasar TU, sebutan untuk pasar induk di daerah Cimanggu, Jalan Raya Parung, Bogor.

semakin hari semakin tinggi. Bukan hanya harga bibit, pupuk dan obat-obatan yang mahal, para buruh tanipun saat ini tidak mau lagi dibayar dengan Rp. 25.000 *sa-bedug*, mereka minta Rp. 30.000 *sa-bedug*. Sedangkan kuli panggul untuk hasil panen dari sawah ke jalan desa, telah menetapkan harga Rp. 100/kg. Apabila panennya mencapai jumlah 3-4 ton, maka bisa dibayangkan untuk biaya angkut saja dia mesti mengeluarkan biaya Rp. 300.000 – 400.000. Baginya situasi sekarang sangatlah sulit, bukan hanya bagi buruh tani, tetapi juga bagi tengkulak kecil seperti dirinya.

5.2.3. Sistem Borong

Kelompok tengkulak kecil ini di daerah-daerah pertanian padi sawah biasa disebut sebagai penebas, yang dipekerjakan oleh petani besar ataupun pedagang-pedagang besar di pasar. Mereka biasa memanen padi dengan sistem tebasan, dengan mengira-ngira berapa jumlah padi yang akan dipanen, lantas membayar dimuka baru kemudian memanennya (Breman, 2000). Sistem ini adalah kemajuan dari sistem ijon yang sebelumnya pernah marak di perdesaan, yaitu membeli pada saat tanaman di sawah atau di ladang masih berumur muda. Sistem borong, meski sudah lama ditinggalkan namun untuk beberapa kasus, dalam kenyataannya masih bisa dijumpai.

Sistem borong sangat menguntungkan bagi para tengkulak dan secara langsung merugikan pemilik komoditas. Saat itu saya menyaksikan satu proses pembelian buah menteng dari satu pohon milik warga oleh seorang tengkulak kecil yang bernama Aat. Menteng adalah salah satu buah tropis khas Bogor, rasanya sangat asam, bentuknya kecil seperti duku, namun kulitnya lebih licin dan mengkilap. Buah yang muda berwarna hijau kekuningan, sementara jika sudah tua warnanya kuning keemasan. Daging buahnya memiliki kandungan air yang tinggi, melekat di bijinya yang kecil. Buah ini banyak digunakan untuk manisan, sekarang sudah jarang kita menemukan buah ini dipasar.

Aat memberong buah menteng di satu pohon itu sebesar Rp. 250.000, tanpa melalui proses penimbangan ataupun perkiraan yang cermat. Harga itu langsung diterima oleh pemilik pohon menteng. Besaran harga itupun tidak

langsung diterima oleh pemilik pohon, melainkan masih ada perantara lagi dalam transaksi itu. Si pemilik pohon hanya mendapatkan Rp.200.000. Sementara Rp. 50.000 menjadi hak dari perantara transaksi itu.

Dari satu pohon menteng diperkirakan ia bisa memperoleh 3-4 kwintal buah menteng segar. Yang kemudian akan dijual oleh Aat di pasar dengan harga Rp. 2500/kg. Artinya, Aat bisa meraup omset sebanyak Rp. 750.000 - 1.000.000, keuntungan berkisar antara Rp. 500.000 -- 750.000. Keuntungan yang cukup fantastis bagi bisnis seorang tengkulak kecil di kampung. Namun resikonya pun tidak kalah berat, karena Aat harus memanjat sendiri pohon menteng yang cukup tinggi dan rindang itu untuk mengambil buah-buah yang letaknya di pucuk-pucuk dahan. Tanpa menggunakan peralatan pengaman, bermodalkan seutas tambang yang dililit di batang pohon dan satu ujungnya lagi dililitkan pada dirinya, Aat meniti dahan demi dahan pohon menteng. Sementara seorang anak buahnya yang masih tergolong anak-anak ada di bawah pohon, memunguti buah menteng yang jatuh dan mengumpulkannya di keranjang yang telah dipersiapkan. Untuk menjual menteng itu, Aat bersama ketiga orang kawannya memiliki satu kios kecil di pasar Cibereum. Mereka secara bergantian berjualan di kios tersebut.

5.3. Dinamika Relasi Patronase Orang Desa

5.3.1. Meluruhnya Dominasi Menak di Perdesaan, Stagnasi Kemiskinan

Relasi antara menak cacah kiranya merupakan relasi lama di perdesaan Jawa Barat. Menak yang berarti bangsawan atau golongan aristokrat, sedangkan cacah adalah golongan non bangsawan, kelompok petani kecil dan buruh tani miskin di tatar Sunda. Sulit untuk menemukan relasi ini masih berlangsung. Kalaupun ada kemungkinan besar hal ini hanya ada dalam lingkup rumah tangga-rumah tangga tertentu. Dalam konteks penelitian ini, tidak ditemukan bentuk-bentuk pola hubungan yang seperti ini. Meski demikian, di beberapa bagian Jawa Barat, terutama di wilayah dataran tinggi selatannya, oleh Fauzi (2008) dikatakan masih bisa dilihat jelas bentuk-bentuk eksploitasi kelompok keturunan menak sunda atas kelompok miskin di perdesaan. Meski tidak secara eksplisit dia

menjelaskan bagaimana pola hubungan itu berlangsung, tetapi perubahan sosial-politik di tingkat nasional dan global, pada kenyataannya tidak juga mengganggu kenyamanan mereka untuk memperoleh penghasilan dari sistem pertanian yang sesungguhnya tidak adil. Memang, pembelahan langsung antara kelompok tersebut tidak lagi ada. Namun kelompok menak yang dalam sejarahnya bekerjasama dengan penguasa kolonial untuk menjual tanah-tanah kepada tuan-tuan tanah partikelir. Kemudian membuka perkebunan komoditas ekspor dengan skala besar yang pada akhirnya dikuasai oleh Negara melalui PTPN. Serta penguasaan sumberdaya kehutanan serta arealnya oleh badan kehutanan Belanda yang kemudian menjelma menjadi perhutani, kenyataannya tetap saja menguasai hajat hidup orang banyak. Sebaliknya, kelompok yang dahulunya masuk golongan cacah pun saat ini masih terjerembab dalam lingkaran kemiskinan Parahnya, selain merasakan langsung eksploitasi dari kelompok elitnya, mereka kini kerap menjadi korban bencana alam akibat eksploitasi tanah yang berlebihan.

Relasi antara menak dan cacah itu pada awalnya digambarkan oleh Sudargan (1986) seperti :

Mangsa harita, menak-cacah mangrupa dua kelompok masyarakat anu jelas pisan bedana. Sing saha nu rek nepungan kanjeng dalem (sabangsa bupati), ti jauh keneh gesu, diuk dina ubin, maju ngesod bari acong-acongan, nyembah. Beungeut ngeluk kawas wayang Arjuna neuteup laleur dina gebog. Sumuhun dawuh gamparan. Kaulanun pangersa pangjeneungan, ieu conto kecap-kecap anu kudu kaluar ti sungut cacah dipayunan meunak. Beda darajat antara cacah jeung menak. Cacah hina, menak mulia.⁴⁶

...menak oge mibanda atribut-atribut kamasyarakatan. Menak boga hak make gelar raden, Raden Mas, Raden Ayu. Putra menak lalakina disebut Aden, Adang atawa Aom. Lamun awewe disebut Deh, Enden atawa juag.

⁴⁶ Ibid-527

*menak oge make basa Sunda lemes, cacah mah basa kasar, raksukan Juragan Asisten nyaeta jas tutup, samping dodot, mastaka dibulen bendo. Teu kantun selop mungkus sampean menak. Cacah mah cukup nyokor.*⁴⁷

*...aya faktor nu ngabedakeun asisten wedana jeung camat. Nu dibenun asisten wedana biasanya jalma nu aya turunan menak, camat mah hente kitu.*⁴⁸

Digambarkan bahwa perbedaan antara kelompok menak dan cacah sangat kentara sekali dalam beberapa hal, yaitu : jika seseorang ingin bertemu dengan menak – dicontohkan pada waktu itu adalah bupati – maka dari jauh dia mesti jalan *ngesot* atau jalan jongkok sambil menyembah, kemudian dari sisi bahasa pun mesti diatur benar kata-kata yang keluar dari pihak yang akan menghadap menak agar bahasanya sangat halus dan jangan sampai menyinggung perasaan menak yang diajak berbicara, dari sisi berpakaian pun, kelompok menak dalam kesehariannya menggunakan pakaian jas tutup (*beskap*), kemudian sarung yang mahal dan senantiasa memakai selop, sementara cacah biasanya tidak bersandal apalagi bersepatu, mereka cukup *nyeker* dengan pakaian ala kadarnya saja. Dalam pergaulan sehari-hari kelompok menak menggunakan bahasa sunda yang halus, sementara kelompok cacah menggunakan bahasa yang kasar. Dari sisi politikpun, para keturunan menak mendapatkan posisi yang istimewa di pemerintahan, selain menjabat sebagai wedana, biasanya mereka menjadi asisten wedana, atau berbagai jabatan di dalam struktur birokrasi kolonial. Peningkatan kemampuan kaum menak dalam hal pemerintahan tidak lain banyak ditunjang oleh keberadaan sekolah kaum menak di Bandung. Sekolah ini sesuai dengan namanya, dikhususkan hanya untuk anggota keluarga dari kelompok menak sunda.

Dengan kata lain, relasi antara menak dan cacah selama beberapa kurun waktu di masa lampau bisa dikatakan penuh dengan simbolisasi yang makna sesungguhnya adalah dominasi yang begitu kuat dari kelompok menak terhadap kelompok cacah. Situasi ini terus berlangsung, hingga

⁴⁷ Ibid-528

⁴⁸ Ibid-496

tahun 60-an. Dalam catatan Sudargan, sejak tahun 60-an, baru kemudian pamor menak perlahan-lahan mulai melemah dan bisa dikatakan pada hari ini sudah tidak bisa lagi kita temui hubungan yang demikian itu.⁴⁹ Hanya saja beberapa sektor produksi pertanian di dataran tinggi Jawa Barat bagian selatan masih dikuasai oleh keturunan menak.

Berdasarkan catatan Scott, meluruhnya dominasi kaum menak kepada cacah bukan berlangsung mulai tahun 60-an, jauh sebelum itupun dominasi kelompok menak perlahan-lahan mulai pudar seiring masuknya kolonialisme ke Nusantara. Kolonialisme mampu membuka peluang dan kesempatan bagi kelompok menak untuk mengakumulasi kekuasaannya dalam bidang ekonomi maupun politik. Selain itu kolonialisme juga memiliki dampak lain yang sesungguhnya melemahkan dominasi kaum menak pada cacah. Modernisasi pemerintahan yang dilakukan oleh kolonial mempengaruhi relasi antara dua kelompok itu. Salah satunya digambarkan oleh Scott, dengan adanya perlindungan tanah-tanah para menak oleh negara kolonial. Pada saat itu pula para pemilik tanah di Jawa mengalami krisis legitimasi dari para klient yang dahulunya loyal kepada mereka. Karena dengan perlindungan itu, kelompok tuan tanah mesti membayar pajak kepada pemerintah kolonial, otomatis, insentif yang bisa mereka berikan kepada klien-klien yang dahulu bekerja pada mereka semakin hari semakin berkurang.⁵⁰

Dalam konteks ini maka kolonialisme sendiri bagi kelompok menak dan tuan tanah memiliki dua wajah yang satu sama lain situasinya saling bertentangan, di satu sisi menguntungkan, namun di sisi yang lain cukup merugikan kekuasaan mereka. Tetapi bagi kelompok miskin, dari sisi ekonomi dan politik, situasinya tetaplah sama, mereka tetap miskin dan tidak juga mampu merubah situasi yang ada. Secara ekonomi, mereka tetap masih bergantung pada kemurahan hati para pemilik tanah di desa baik sebelum ataupun setelah hadirnya kolonialisme di Indonesia. Sedangkan

⁴⁹ Ibid-528

⁵⁰ Scott, 1972. *The Erosion of Patron-Client Bonds and Sosial Change in South East Asia*

secara politik, pada masa ini sesungguhnya telah ada benih-benih kekuatan politik baru dalam kelompok petani. Perlawanan petani terhadap kolonialisme marak muncul di berbagai wilayah di Indonesia. Yang paling relevan ketika kita berbicara tentang gerakan perlawanan petani dalam konteks penelitian ini mungkin kasus pemberontakan petani Banten 1888 yang secara kewilayahan cukup dekat dengan Bogor. Meski tidak banyak ditemukan informasi mengenai keterlibatan para ulama maupun petani dari Cimandiri ke wilayah Banten, namun dalam sistem sosial masyarakat Indonesia pada waktu itu, berita akan pemberontakan yang dilakukan oleh petani Banten akan cepat menjalar menggunakan media komunikasi pesantren dan ulama. Berangkat dari penjelasan Kartodirdjo bahwa pemberontakan petani Banten dilandasi oleh semangat mesianisme atau milenarisme, hal ini menegaskan bahwa peran elit dalam pergerakan petani tentu saja sangat besar. Dalam kasus Banten, elit ulama berperan sangat penting karena pada beberapa hal kekuasaan mereka merasa terancam dengan adanya kolonialisme.⁵¹

Sementara di satu sisi, meski secara ekonomi dan politik relasi sosial mereka dengan kelompok elit tidak berubah, dengan hadirnya kolonialisme, pola-pola lama seperti jalan *ngesot*, menyembah-nyembah dan lain sebagainya secara perlahan berkurang bahkan hilang sama sekali. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Scott (1972), bahwa:

Empirically, I hope to explain how, in Southeast Asia, the strong social bonds which joined peasants to local elites tended to break down during the colonial period – particularly in directly – ruled lowland areas. By examining the effect of social differentiation, the commercialization of subsistence of agriculture, and the growth of colonial administration on day to day class relations in the country side, it is possible to show, if unequal, bargaining or of outright exploitation how a

⁵¹ “100 Tahun Pemberontakan Petani Banten” dalam Kartodirdjo, “Sejak Indische sampai Indonesia”, 2005

*relationship the peasant once viewed as collaborative and legitimate came increasingly to be seen as simple.*⁵²

Jelaslah bahwa, pada situasi sosial di Asia Tenggara yang mayoritas masyarakatnya petani, pengaruh dari diferensiasi sosial, komersialisasi pertanian subsisten dan pengaruh administrasi kolonial dalam hubungan sosial sehari-hari di perdesaan telah mempengaruhi hubungan antara petani dan pemilik tanah.

Tetapi dalam melihat situasi ini, kiranya kita mesti tetap kritis. Meskipun ikatan sosial lama berupa relasi patron-klien mengalami erosi besar-besaran, namun fakta bahwa kelompok miskin di perdesaan sampai hari ini belum juga beranjak dari kemiskinan yang membelenggu hidup mereka tidak dapat kita acuhkan. Contoh, seperti keluarga Romli atau beberapa keluarga di wilayah Udik, memperingatkan kita bahwa pasang surut dinamika patron-klien di perdesaan, tidak juga berpengaruh terhadap dimensi ekonomi manusia petani. Karena akar dari ketidakberdayaan manusia petani justru terletak pada struktur-struktur yang membuat kemiskinan petani menjadi semakin abadi (Sutomo, 1997). Perubahan-perubahan besar dalam struktur makro baik di level desa sampai nasional pun tidak mampu merubah struktur ekonomi kaum tani miskin.

5.3.2. Jawara di Cimandiri

Dalam struktur sosial masyarakat Cimandiri kini, dan masyarakat Sunda pada umumnya peranan menak sudah bisa dikatakan hilang. Berganti dengan kelompok-kelompok baru yang mewarisi kekuasaan-kekuasaan kecil para menak. Mereka adalah kelompok ulama dan jawara. Kelompok masyarakat yang secara historis memiliki akar kuat pada masyarakat Jawa Barat bagian barat, khususnya yang berbatasan dengan wilayah Banten. Banten sebelumnya masuk ke dalam wilayah Propinsi Jawa Barat, namun dalam perkembangannya mereka berinisiatif untuk memisahkan diri dan membentuk propinsi sendiri yang bernama Propinsi Banten. Dalam konteks masyarakat Bogor, maka pengaruh dari Banten masih terasa cukup kuat. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal diantaranya, bahasa sunda orang

⁵² Ibid-6

Bogor tergolong bahasa sunda kasar. Bahkan masyarakat Bogor yang tinggal di bagian barat, bahasa dan logat bicaranya sangat mirip dengan bahasa dan logat bicara orang Banten. Tidak hanya itu saja, penguasa-penguasa informal di terminal atau pasar di daerah Bogor biasanya adalah orang-orang Banten yang lebih dikenal sebagai jawara atau jagoan. Orang-orang ini menguasai secara informal pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti terminal dan pasar. Mereka mendapatkan kekuasaan karena kemampuannya dalam berkelahi atau *ngejago*. Selain itu, banyak dari mereka yang memiliki kedekatan relasional dengan beberapa penguasa formal di pemerintahan, seperti di dinas-dinas terkait. Seperti dinas perhubungan jika berkaitan dengan terminal, dan dinas pasar jika berurusan dengan pasar-pasar. Bahkan di daerah Banten, mereka menguasai berbagai macam akses-akses ekonomi maupun politik daerah.⁵³

Berbicara soal jawara, kiranya tidak bisa lepas dari peranan kiai atau ulama, karena pada dasarnya jawara adalah pelindung ulama. Pada masa kolonial, ulama memiliki peran penting dalam memimpin pemberontakan di Banten.⁵⁴ Ulama adalah pemimpin karismatik, sementara jawara adalah pesuruh dan *bodyguard* dari ulama pada saat perang, ulamalah yang mengajarkan jawara ilmu beladiri dan ilmu keagamaan.

Soal jawara di Cimandiri, kiranya catatan sejarah mengenai hal ini ada di dalam penjelasan Sudargan.⁵⁵ Dalam catatan wawancara Muhamad Daud Sudargan, bisa dilihat beberapa penjelasan yang menceritakan peran dan

⁵³ Dalam penjelasannya, Okamoto Masaaki, dalam *Lokal Politics in Decentralized Indonesia: the Governmoor General of Banten Province*, IIAS Newsletter, IIAS Newsletter, #34, Juli 2004, menceritakan profil seorang jawara Banten yang sangat *powerfull*, yakni H.Tb. Chasan Sochib. Profil sang jawara yang dalam kenyataannya mampu mendominasi kekuasaan ekonomi, politik dan budaya Banten secara keseluruhan. Bahkan sebagai satu penanda yang paling penting adalah terpilihnya sang puteri jawara sebagai gubernur Banten, setelah sebelumnya sang puteri menjadi wakil gubernur. Selain warisan kekuasaan orde baru, peluang kekuasaan muncul tatkala era desentralisasi berlangsung di Indonesia, Chasan Sochib juga memiliki beberapa organisasi massa yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan jawara-jawara Banten. Selain itu, beberapa jabatan penting juga pernah dipegangnya seperti Ketua Kadin propinsi, Ketua Gapensi propinsi dan beberapa jabatan lainnya.

⁵⁴ Kartodirdjo, 1988, 100 Tahun Pemberontakan Petani Banten, dalam Kartodirdjo, 2005

⁵⁵ Sebuah catatan wawancara yang ditemukan oleh peneliti ketika menelusuri sejarah Desa Cimandiri. Muhamad Daud Sudargan sendiri merupakan seorang anak Wedana. Ia juga pernah menjadi jaksa di Bogor. Catatan wawancara yang bersumber dari kerabat dan keluarganya focus pada masalah silsilah keluarga besar Haji Naidan. Muhamad Daud Sudargan adalah salah satu keturunan dari H. Naidan, sesepuh dan leluhur Desa Cimandiri, tepatnya Kampung Cikampak. Catatan ini dibuat pada tahun 1988 berdasarkan wawancara dari beberapa nara sumber.

fungsi Jawara pada masa colonial di masyarakat. Buyut dari Sudargan adalah seorang pemimpin agama di Bogor, sementara kakeknya – anak dari buyutnya -- lebih dikenal orang sebagai jawara. Buyutnya, Haji Naidan yang merupakan salah satu keturunan pertama dari Desa Cilubang – sekarang Cimandiri – adalah pemimpin agama yang cukup dikenal di Bogor. Bahkan dalam catatan itu dikisahkan bahwa H. Naidan pernah ikut serta bersama Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda. H. Naidan bersama kelompoknya, berangkat dari Bogor untuk ikut berperang melawan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah sebagai bentuk solidaritas sesama muslim. Meskipun keterangan ini sulit diverifikasi, namun penjelasan itu bisa menyiratkan bahwa kelompok ulama adalah salah satu kelompok elit yang mampu memimpin perlawanan terhadap kolonialisme. Di dalam catatan itu dikisahkan pula bagaimana H. Naidan memiliki relasi yang cukup baik dengan serdadu-serdadu Belanda yang merupakan orang pribumi – Jawa, Manado, Ambon dan lainnya.

Selain soal H. Naidan, catatan itu juga menceritakan perihal anak H.Naidan yang bernama Ilut, atau kerap disapa Aki Ilut.⁵⁶ Meski seorang putra pemimpin agama, Ilut tidak mengikuti jejak ayahnya, karena dia lebih tekun untuk menuntut ilmu beladiri ketimbang ilmu agama. Dalam perkembangannya, Ilut kemudian menjadi seorang jawara yang cukup dikenal di wilayah Bogor, tidak hanya oleh sesama jawara, namun juga dikenal oleh para pedagang, tuan tanah ataupun serdadu Belanda. Dalam catatan tersebut, jawara diklasifikasikan menjadi dua, jawara yang baik dan jawara yang jahat. Jawara yang baik adalah mereka yang tidak melakukan pemerasan ataupun perampokan kepada rakyat. Sementara jawara yang jahat, dikenal oleh masyarakat sebagai jawara yang suka merampok, memeras dan membunuh orang.

Hal lain yang cukup menarik adalah relasi antara jawara dengan kelompok pedagang di pasar. Dalam catatan itu, Ilut seringkali memperoleh uang dengan cara yang mudah, kemanapun ia pergi, pulangny ia akan memperoleh uang yang berasal dari pemberian orang. Disini bisa kita tarik

⁵⁶ Aki, sebutan untuk kakek dari cucu atau anaknya.

satu penjelasan bahwa relasi antara jawara dengan para pedagang merupakan bentuk pertukaran yang rasional, pedagang membutuhkan keamanan yang bisa diberikan oleh jawara, sementara jawara memperoleh imbalan uang dari para pedagang atas jasa pengamanan yang telah diberikan. Pertukaran ini kemudian membentuk satu relasi sosial yang dalam perkembangannya banyak mewarnai dinamika ekonomi-politik di perdesaan, khususnya Desa Cimandiri. Pertanyaannya kemudian, bagaimana sosok jawara saat ini?

Untuk bisa menjelaskan sosok jawara saat ini, kiranya kita tidak lagi bisa menemukan gambaran jawara seperti halnya Ki Ilut. Jawara seperti itu sekarang sudah bisa dikatakan tidak ada lagi. Karena dalam prosesnya mereka juga mesti berhadapan dengan peraturan serta hukum yang berlaku. Peraturan dan hukum ini tidak lagi memungkinkan bagi kelompok-kelompok jawara untuk bisa bertindak seperti halnya pendahulu-pendahulu mereka. Strateginya kemudian, mereka menyamakan bentuk-bentuk relasinya baik dengan negara ataupun dengan para pedagang. Tanda-tanda dari hal itu sampai saat ini masih bisa kita saksikan. Seperti bagaimana relasi antara orang-orang desa dengan keberadaan pasar di Bogor. Dalam kenyataannya, di Cimandiri saat ini banyak orang-orang desa yang secara kultural memiliki kekuasaan informal di pusat-pusat ekonomi masyarakat seperti pasar dan terminal. Orang-orang ini jauh dari sosok jawara seperti yang digambarkan oleh Sudargan mengenai Ilut. Sosok mereka saat ini tak ubahnya seperti orang biasa, namun pada kenyataannya mereka mendapatkan akses-akses ekonomi dan politik dari luar desa karena kekuasaan yang mereka miliki di pasar atau terminal. Bahkan sekarang, Sang Kepala Desa Cimandiri adalah orang pasar yang dikenal memiliki kemampuan dalam hal ilmu bela diri. Dia adalah “yang memegang” Pasar Anyar di Bogor. Rokib, yang pada awal tulisan ini telah diceritakan bagaimana relasinya dengan kekuatan politik masa lalu dan sekarang.

Selain Rokib, di Cimandiri, tepatnya di wilayah Cimandiri Kulon ada dua orang lagi yang dikenal sebagai “yang memegang pasar”. Dia adalah Ojay dan Lukman. Keduanya memang telah lama dikenal sebagai “orang kuat” di

desa ini. Selain ketiga orang itu, tidak lupa, Jali, seorang jawara “kecil” yang dalam struktur sosial masyarakat di kampungnya memiliki kedudukan yang cukup kuat. Namun dibandingkan dengan ketiga orang jawara lainnya, Jali bukanlah siapa-siapa. Yang lebih menarik adalah ketiga orang ‘kepala pasar’ yang telah disebutkan sebelumnya, semuanya berdomisili di Cimandiri Kulon. Mereka bertiga tinggal dan menetap disana. Bahkan dalam perkembangannya, mereka mampu mewarnai proses perubahan ekonomi warga Cimandiri Kulon.

5.3.2. Kampung Orang Pasar

Beberapa orang yang saat ini cukup dikenal karena memiliki kekuasaan informal di pasar adalah warga Cimandiri Kulon. Jika sebelumnya warga Cimandiri Kulon dikenal karena hal-hal yang dianggap negatif, saat ini pandangan itu sudah cukup mengalami pergeseran. Sebelumnya mereka dikenal sebagai kelompok masyarakat yang sangat kompak apabila ada warga mereka yang disakiti. Dan atas nama solidaritas, beramai-ramai mereka akan melakukan pembalasan kepada orang atau kelompok yang melakukannya. Saat ini persepsi itu telah berubah. Orang Cimandiri Kulon, saat ini jauh lebih maju dari warga kampung manapun di Cimandiri.

Cimandiri Kulon adalah salah satu kampung di Cimandiri, yang letaknya paling barat, jika kita berada di pusat desa. Jalan penghubung dari balai desa ke Cimandiri Kulon juga terakhir dibangun, bahkan beberapa tahun yang lalu jalan ke lokasi ini masih tergolong kurang baik, banyak lubang serta belum diaspal. Karena aspal menuju ke Cimandiri Kulon hanya sampai belakang daerah Ilir, tidak sampai Cimandiri Kulon. Dengan kata lain, selama beberapa waktu wilayah ini tergolong sebagai wilayah ujung kampung, atau pelosok.

Tidak hanya dalam hal infrastruktur jalan wilayah ini seolah terpinggirkan dari komunitas Cimandiri. Secara sosial pun, komunitas warga Cimandiri Kulon, sebelumnya lebih dikenal oleh orang-orang desa sekitar sebagai daerah yang cukup ditakuti. Ditakuti dalam arti orang-orang di wilayah ini adalah orang-orang beringas yang kerap membuat keributan di desa Cimandiri. Anggapan seperti ini sudah mafhum dikalangan orang-orang

Cimandiri, karena mayoritas warga di Cimandiri Kulon adalah orang-orang pasar. Orang-orang yang mata pencahariannya di pasar, sebagai kuli angkut, sebagai pedagang sayur, juru parkir dan calo pasar.

Sebagai satu contoh kasus masa lalu yang menggambarkan bagaimana warga Cimandiri Kulon bersikap adalah, pernah satu ketika ada seorang anak yang bersekolah di SD Cilubang 02, dipotong rambutnya oleh salah seorang guru karena dianggap terlalu panjang dan tidak rapih. Setelah anak itu pulang, tidak berapa lama orang tuanya datang ke sekolah sembari membawa *bedog*, senjata khas Jawa Barat dan Betawi, yang tidak lain adalah golok. Orang tua itu mengancam untuk menghajar guru yang memotong rambut anaknya. Namun setelah diberi tahu secara baik-baik, orang itu pun mengerti dan lantas pulang ke rumahnya. Selain cerita seperti itu, banyak lagi cerita-cerita lain menyangkut keberingasan warga Cimandiri Kulon. Jika ada satu orang yang diganggu oleh orang dari kampung lain, maka tak ayal, seluruh warga Cimandiri Kulon akan datang untuk membantu. Tidak hanya untuk urusan yang sifatnya negatif, untuk soal solidaritas, mereka juga diakui sangat kuat, hal ini bisa nampak jika salah satu keluarga ada yang sednag punya hajat, hampir dipastikan semua warga akan membantu perayaannya. Mereka akan bergotong royong memberikan bantuan materi dan tenaga.

Ada tiga orang yang paling disegani dan dikenal di Cimandiri Kalong, yaitu, Rokib, Ojay dan Lukman. Ketiganya adalah tokoh masyarakat di Cimandiri, khususnya di wilayah Cimandiri Kulon. Selain tokoh masyarakat disana, ketiganya dikenal sebagai "kepala-kepala pasar". Rokib dan Ojay adalah kepala Pasar Anyar, Bogor, sementara Lukman adalah Kepala Pasar Ciawi. Pengertian kepala pasar disini seperti telah saya sebutkan sebelumnya bukanlah kepala pasar dalam artian aparat birokrasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengepalai administrasi dan manajemen pasar. Kepala pasar disini lebih mengarah pada "yang pegang" pasar. Orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan untuk menentukan kegiatan-kegiatan tertentu di pasar. Orang-orang seperti ini mendapatkan otoritasnya bukan melalui jalur birokrasi atau jalur pemerintah. Orang-

orang seperti ini memperoleh posisi-posisi seperti itu tidak lain melalui cara-cara yang lazim disebut oleh kalangan mereka dengan istilah "ngejago". Istilah ini artinya mengandalkan kekuatan fisik untuk mendapatkan suatu hal atau untuk mencapai satu tujuan. Dalam istilah Jawa Barat sampai Banten, ada terminologi Jawara yang berasal dari kata Juara, yang artinya orang yang telah memenangkan perkelahian diantara orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berkelahi (*jago*). Orang-orang seperti Rokib, Ojay dan Lukman adalah mereka yang memiliki kekuasaan sesungguhnya di pasar. Melalui mereka orang bisa ikut bekerja di pasar, melalui mereka, hasil pertanian bisa masuk ke pasar, melalui mereka seseorang bisa membuka lapak dagangan di pasar. Sesungguhnya kekuasaan mereka dalam menentukan perputaran ekonomi serta aktivitas di pasar-pasar tradisional jauh lebih besar ketimbang kepala pasar dalam artian yang formal (pemerintah), karena mereka sejak lama berada di pasar tersebut, sementara kepala pasar dalam artian pejabat pemerintah senantiasa bergilir. Dengan keberadaan orang-orang seperti mereka pula, pasar bisa mendapatkan jaminan pasokan hasil bumi dari desa.

Dengan kemampuan dan kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa pasar, saat ini hampir 90% warga Cimandiri Kulon bekerja di pasar, baik menjadi pedagang, menjadi kuli angkut ataupun menjadi keamanan pasar. Secara tidak langsung yang dilakukan oleh ketiga tokoh Cimandiri Kulon itu mampu membantu mengurangi pengangguran di masyarakat, selain memudahkan aliran hasil pertanian dari desa ke pasar-pasar.

Dampak yang sangat nyata adalah, saat ini hampir rumah-rumah di wilayah Cimandiri Kulon telah dibangun dengan baik, sangat jarang sekali rumah bilik atau rumah bambu. Setiap orang hampir dipastikan memiliki penghasilan meskipun tidak tetap. Bagi yang ingin bekerja di pasar menjadi kuli panggul, mereka harus mendaftar terlebih dahulu kepada salah satu diantara ketiga orang ini. Selain mendaftar mereka juga diharuskan membayar uang sebesar Rp. 500.000. Sedangkan untuk hariannya mereka diwajibkan menyetorkan kepada kepala pasar sebesar Rp. 2000/hari dari hasil pendapatan hariannya. Dari sinilah modal ekonomi mereka

berkembang, karena meski dari pasar mereka tidak mendapat gaji, namun istilah “*jatah preman*” dia dapatkan setiap hari, dengan begitu sekaligus mereka mampu membangun ketokohan dengan pengikut atau patron-patron barunya. Karena mereka juga memiliki kemampuan untuk memberhentikan atau melarang seseorang ataupun barang dagangan masuk ke pasar itu.

Pada saat ini, Cimandiri Kalong justru menjadi satu kekuatan politik tersendiri yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Dengan adanya kekuatan ekonomi seperti yang telah disebutkan diatas, pada pilkades 2004, calon mereka menang mutlak atas calon lain dari Kampung Ilir. Padahal selama beberapa kurun waktu, secara politik Cimandiri Kalong tidak memiliki representasi politik pada level desa.

Dalam konteks hubungan antara kelompok penguasa pasar dengan buruh tani atau kelompok miskin di perdesaan, kiranya penjasna mengenai setoran yang mesti mereka berikan kepada para kepala pasar bis menjadi bukti, bagaimana dominasi secara ekonomi dalam konteks pekerjaan di luar sektor pertanian – lebih tepatnya sektor pendukung pertanian – tetap berlangsung dalam cara-cara yang cukup nyata. Meski nilai setoran itu cukup kecil jika dibandingkan dengan hasil para kuli panggul yang berkisar antara Rp. 20.000 s/d Rp. 30.000 sehari, namun setoran itu menjadi satu faktor yang mengikat para kuli pasar dengan kepala-kepala pasar. Para penguasa pasar pun bisa memberhentikan secara langsung kuli-kuli yang tidak patuh atau tidka memberikan setoran kepadanya secara rutin. Pola ini terus menerus dijaga dan dalam konteks perpolitikan desa, Rokib pada akhirnya mampu memobilisasi kelompok-kelompok kuli pasar untuk memilihnya sebagai kepala desa. Meski dalam prakteknya, selama dia menjabat, belum ada tanda-tanda yang cukup jelas yang bisa membuktikan bahwa dia adalah pemimpin kaum kuli pasar.

5.3.3. Mengkonstruksi Identitas

Dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan politik di tengah struktur sosial yang ketat, bagi kelompok miskin di perdesaan, maka jalan lain yang bisa dilakukan adalah dengan mencoba merekonstruksi identitas dirinya dihadapan pihak luar. Dalam kasus Udik misalnya, perubahan yang terjadi semenjak

wilayah itu dibuka oleh jalan setapak sepanjang kurang lebih 800 meter, dalam perkembangannya membuka peluang-peluang baru bagi masyarakat. Peluang-peluang itu bagi sebagian orang seperti Jali dan keluarganya, bisa secara optimal dimanfaatkan apabila hambatan-hambatan struktural yang melingkupi struktur sosialnya dihilangkan sejenak atau disamarkan.

Setelah proses pembangunan jalan setapak dan kamar mandi umum pada tahun 2004 selesai dilakukan. Maka sejak saat itu warga Udik tidak lagi mengalami kesulitan dalam hal aksesibilitas dari dan ke kampung mereka. Jalan setapak yang panjangnya sampai 800 meter dengan lebar jalan kurang lebih 1 meter itu menghubungkan antara tepi jalan desa di Kampung Cimandiri Ilir sampai ujung Kampung Cimandiri Udik. Posisi ujung jalan setapak itu persis berada di mulut pemakaman umum dan di sebelah timur rumah Jali. Sementara kamar mandi umum yang digunakan oleh warga tepat berada di depan rumah Jali, bahkan penerangan kamar mandi itu menggunakan listrik dari rumah Jali -- meski pembayarannya dilakukan iuran oleh semua warga yang menggunakan fasilitas ini. Dari sinilah rekonstruksi identitas Jali dan keluarga kemudian diupayakan kembali.

Sesungguhnya program pembangunan yang telah dilakukan, diakui oleh Jali dan warga sekitar telah memberikan pengaruh yang cukup kuat. Bagi Jali pengalaman ini dimaknai sebagai satu kesadaran bahwa jalan akan membuka banyak peluang-peluang ekonomi baru ke kampungnya. Meskipun secara ekonomi ia tidak sekuat atau sekelas dengan para elit lama desa, seperti H. Daud, H. Udin, serta H. Entong. Begitupun secara politik, ia bukan lawan dari Lurah Rokib, Lurah Herman, Ojay atau Ogan. Namun pada lingkup yang lebih kecil di Kampung Udik, Jali memiliki peluang untuk menjadi pemimpin atau tokoh diantara warga yang lain.

Mengkapitalisasi Ruang Publik

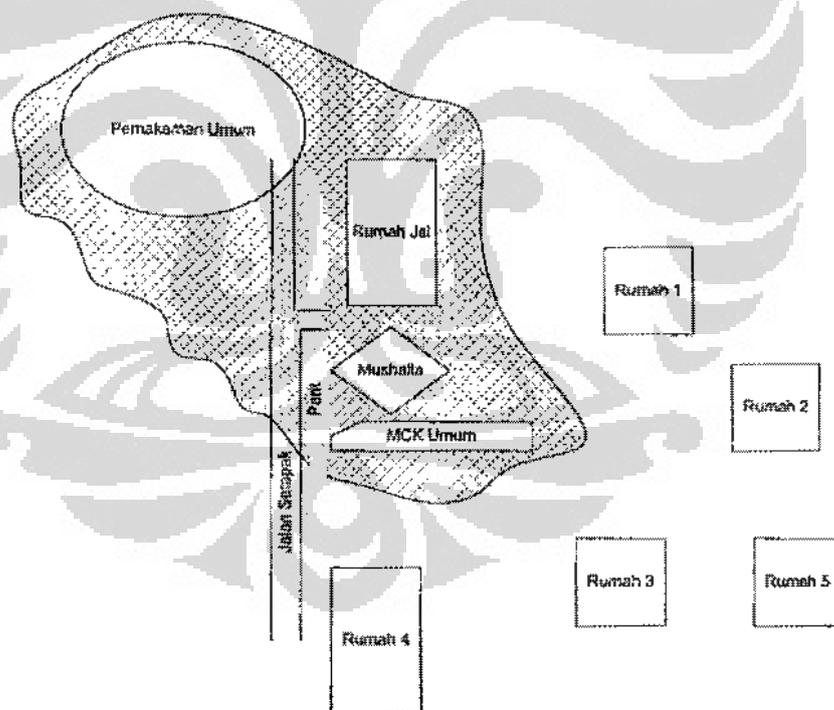
Pada tahun 2006, dua tahun setelah program pembangunan itu dilakukan, berdiri sebuah mushalla kecil di Udik. Letak mushalla itu berada diantara kamar mandi umum yang baru dibangun dan rumah Jali. Ukurannya tidak lebih besar dari kamar mandi umum yang berada di sebelahnya, sekitar 5 x 5

meter persegi. Dengan bangunan utama dan teras di depannya. Kondisi mushalla itu memang tidak tergolong baik, namun untuk ukuran kampung, kiranya itu sudah cukup memadai. Mushalla itu sudah ditembok dan plester kasar, lantainya tidak dikeramik, hanya *dipetur*⁵⁷ saja. Untuk melapisi lantai digunakan karpet dan beberapa lembar sajadah. Di mushalla itu juga disediakan mukenah dan sarung yang bisa digunakan oleh siapa saja yang ingin sholat disana. Beberapa meja kecil untuk anak-anak belajar mengaji juga tersedia disana. Selain itu juga terdapat mimbar kecil, tongkat kayu disamping mimbar dan seperangkat alat elektronik sebagai penguat suara. Demikianlah gambaran mengenai mushalla kecil itu. Tetapi pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana mushalla yang kondisinya jauh lebih baik dari rumah-rumah penduduk di Udik ini bisa berdiri disini. Bagaimanapun juga warga Udik bukanlah kelompok orang kaya atau mereka-mereka yang memiliki penghasilan lebih untuk disumbangkan. Mereka rata-rata berprofesi sebagai buruh tani miskin yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya dan menjadi muskil untuk secara kolektif mengumpulkan uang dalam waktu pendek.

Bahwa kemudian ada keterangan mengenai asal muasal berdirinya mushalla kecil ini, pada awalnya bukan berasal dari pengakuan Jali, melainkan dari orang-orang luar yang seringkali membicarakan keberadaan mushalla ini. Keberadaan mushalla di Udik tentu saja menjadi buah bibir banyak orang. Bukan hanya warga luar Udik yang terheran-heran dengan berdirinya mushalla ini, bahkan sebagian kecil warga Udik merasa takjub dengan berdirinya mushalla ini. Karena mereka menyadari bahwa di lingkungannya tidak ada saudagar kaya atau tuan tanah yang tinggal. Tanpa perlu berprasangka macam-macam, orang kemudian tahu bahwa Jali lah yang mempelopori berdirinya mushalla ini, karena mushalla ini berdiri di atas tanah miliknya yang ia wakafkan. Lantas, dari mana uang untuk membiayai pembangunan mushalla ini. Menurut pengakuan beberapa orang yang pernah bercerita pada saya, dan beberapa tahun setelah itu, saya mendengar

⁵⁷ Bahasa Jawa untuk kondisi lantai rumah yang hanya diplester kemudian dilapisi dengan menggunakan semen.

pengakuan langsung dari Jali, ternyata seorang tokoh dari satu Partai Amanat Nasional di tingkat kabupaten telah memberikan sumbangan uang untuk membangun mushalla kecil ini. Kesempatan ini diperoleh Jali karena ia cukup intens berhubungan dengan orang ini terutama dalam urusan per-klenikan. Relasi Jali dengan orang-orang luar desa, berujung pada terbukanya kesempatan bagi dirinya untuk memperoleh peluang baru yang bisa ia bawa ke wilayahnya. Saat ini lengkap sudah di rumahnya, akses jalan yang baik – meski hanya bisa dilewati kendaraan roda dua – adanya sarana mandi cuci kakus yang memadai, keberadaan mushalla untuk warga kampung beribadah plus lokasi pemakaman umum yang tepat berada di belakang rumahnya. Kesemua itu berada dalam orbit spasial rumahnya. Dengan kata lain meskipun penguasaan atas tanah tidak dimiliki, namun keberadaan sarana-sarana publik di sekitar rumah Jali menjadi satu potensi tersendiri yang menandakan bentuk penguasaan secara simbolis atas struktur sosial di kampung kecil ini.



Gambar 9. Peta 'Simbolisasi Orbit Kekuasaan Jali'

Berbicara mengenai penguasaan simbolis atas keruangan yang dimiliki oleh Jali, kiranya perlu diuraikan satu persatu manifestasi dari keuntungan-keuntungan yang kemudian didapatkan olehnya. Keuntungan atau manfaat ini

perlu kiranya penting diketahui untuk melihat struktur rasionalitas yang kemudian dilakukan oleh Jali dalam mewujudkan kepentingan-kepentingannya. *Pertama* adalah jalan setapak. Dari semula jalan setapak dibangun, keterlibatan Jali telah sangat kuat sebagai salah satu panitia pembangunan dilanjutkan dengan panitia pemeliharaan. Selanjutnya adalah posisi jalan setapak yang berakhir tepat di sisi timur rumahnya seolah menandakan bahwa pembangunan itu memang bermaksud mengarah ke rumahnya.

Kemudian yang *kedua* soal kamar mandi umum. Selain sebagai salah satu panitia di pembangunan jalan setapak, otoritas Jali semakin kuat lagi tatkala lahan untuk membangun sarana MCK itu adalah tanahnya yang kemudian diwakafkan. Wakaf dalam pandangan orang islam biasa dilakukan oleh kelompok orang kaya untuk menyisakan sebagian kekayaannya yang berupa tanah untuk dibuat tempat ibadah ataupun tempat pemakaman. Pelaksanaan wakaf pada hakikatnya mesti diiringi keikhlasan seseorang agar mendapatkan ganjaran berupa pahala dari Allah. Bahkan pandangan yang lebih ekstrim menyatakan bahwa tanah yang diwakafkan untuk sarana ibadah atau tempat pemakaman pahalanya akan terus menerus mengalir kepada orang yang mewakafkan sampai hari kiamat.⁵⁸ Sebagai orang yang tidak tergolong kaya apalagi mampu, maka kerelaan Jali untuk mewakafkan tanahnya menjadi buah bibir banyak orang.

Beberapa bulan setelah pembangunan itu selesai, terjadi konflik antarwarga dengan keluarga Jali. Warga menganggap Jali terlalu mendominasi penggunaan kamar mandi yang ada dengan memberikan berbagai macam aturan dan sanksi bagi orang-orang yang tidak mau membersihkan kamar mandi secara rutin. Satu hal yang juga melatarbelakangi ini adalah, beberapa warga yang dahulu enggan untuk ikut bekerja bakti dan bergotong royong membangun sarana jalan setapak dan kamar mandi umum, dalam kesehariannya adalah mereka-mereka yang paling aktif memanfaatkan sarana-sarana itu. Hal inilah yang kemudian membuat Jali kerap berlaku keras dan

⁵⁸ Penjelasan soal wakaf adalah interpretasi pribadi peneliti berdasarkan pengetahuan yang selama ini diketahui.

kasar terhadap golongan orang-orang seperti ini. Fasilitas yang sejatinya menjadi milik umum ini pada prosesnya menjadi satu perangkat kekuasaan bagi Jali untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan tetangganya.

Ketiga adalah soal mushalla kecil yang berada di depan rumahnya. Jali merasa bahwa walau bagaimanapun, mushalla kecil ini bisa berdiri atas jasanya. Dia pernah sesumbar bahwa hanya karena orang itu mengenal dia dan ingin membalas jasa atas apa yang sudah dilakukan Jali untuknya, maka mushalla ini bisa berdiri. Tidak ada warga kampung disini yang bisa mencari orang yang mau beramal dengan membangun tempat ibadah seperti dirinya. Adanya mukenah, sarung, sajadah dan karpet di mushalla itu tidak lain juga karena Jali aktif mencari sumbangan dari orang-orang luar desa yang ia kenal. Meskipun begitu, pembangunan mushalla inipun bukan tanpa kendala. Beberapa orang warga kemudian merasa kesal dan tidak mau ikut serta pada saat pembangunan, lantaran ada anggapan bahwa Jali menggelapkan sebagian dari dana pembangunan mushalla. Bahkan kabarnya, ia sempat cekcok dengan anaknya urusan pengelolaan dana pembangunan. Menurut pengakuan Jali, saat ini rasa memiliki mushalla dikalangan warga sangat lemah. Keadaan yang sebaliknya dengan Jali, saat ini justru dia sering bertindak sebagai imam di mushalla itu serta melakukan upaya untuk meramaikan tempat ibadah dengan mendatangkan guru ngaji dari luar kampung.

Keempat adalah soal pemakaman umum yang berada di belakang rumahnya. Pemakaman ini telah lama ada, bahkan menurut pengakuan Jali, banyak orang-orang dari luar kampung bahkan orang luar Jawa yang dikuburkan disini. Disini juga banyak terdapat makam yang tidak jelas siapa yang dikubur didalamnya, karena hanya diberi batu sebagai penanda, tanpa ada nisan yang ditulis. Mengenai kuburan ini, Jali cukup lama dikenal sebagai juru kunci, atau orang yang menjaga makam ini. Pada saat hari raya, banyak orang yang datang untuk berziarah ke makam ini. Tidak sedikit yang meminta Jali untuk membersihkan makam keluarga mereka. Dari sini banyak yang kemudian memberikan uang ataupun bingkisan kepada Jali karena telah membantu menjaga makam leluhur ataupun keluarga mereka. Untuk memenuhi

permintaan bersih-bersih makam itu, Jali kerap mempekerjakan orang lain seperti anak-anaknya ataupun tetangganya yang mau dipekerjakan dengan bayaran 20 ribu rupiah untuk bekerja *sa-bedug* membersihkan makam. Jumlah itu bukanlah yang diberikan kerabat pemilik makam kepada Jali, terkadang mereka memberikan lebih kepada Jali, bisa sampai 50 atau 100 ribu rupiah. Setelah digunakan untuk membayar orang yang membersihkan makam, sisa uang pemberian keluarga pemilik makam diambil oleh Jali.

Menjadi Bapak Kolot

Setelah kesemua cerita diatas, selanjutnya masuklah kepada satu fase dimana Jali mulai memberanikan diri untuk membangkitkan identitas dirinya yang baru dengan melakukan satu langkah terobosan. Langkah terobosan yang bagi saya cukup menakjubkan meski tidak sulit untuk bisa melihat kesemuanya itu dalam satu rangkaian proses yang berurutan. Semula saya masih kurang percaya ketika beberapa orang di Cimandiri bercerita mengenai perubahan besar yang dialami oleh Jali. Perubahan bukan hanya soal kehidupan ekonominya saja, melainkan perubahan pada diri Jali sekarang ini.

Saat ini orang di Cimandiri lebih mengenal Jali sebagai orang yang sudah tobat. Jika dahulu orang mengenalnya sebagai jawara, tukang mabuk, jagoan *ngibing* atau raja sawer dalam acara-acara dangdut di kampung ini, kemudian sering mengumpulkan orang-orang bermasalah di rumahnya, tempat bersembunyi para begal atau rampok dari luar desa, serta segudang pelabelan negatif lain yang melekat pada dirinya, saat ini pandangan itu berubah total.

Dengan keberadaan mushalla kecil di depan rumahnya, sosok Jali sat ini lebih dikenal sebagai *ajengan* atau pemuka masyarakat dan tokoh agama. Dalam interpretasi saya kemudian, semua itu tidak berjalan secara kebetulan, melainkan satu bentuk konstruksi sosial yang disadari sepenuhnya oleh Jali.

Setelah kedudukannya di mushalla cukup kuat, ia kemudian mengundang seorang ustad muda dari Cimandiri Kulon untuk mengajar ngaji sekaligus pembimbing agama di mushalla ini. Sang ustad tidak digaji atau dibayar secara rutin, melainkan hanya diberikan hasil bumi ketika Jali panen. Selain itu, Jali juga turut membantu sang ustad muda untuk menjual beberapa barang

dagangan yang dibawa ustad muda ini. Tetapi yang lebih penting, keberadaan ustad muda ini telah memperkuat posisi dan peran Jali di mushalla. Dengan kesadaran penuh Jali mengetahui bahwa mau sehebat apapun dia membaca ayat suci ataupun serajin apapun ibadahnya, di desa untuk menjadi seorang ajengan atau pemuka agama ada persyaratan-persyaratan tersendiri. Antara lain soal dimana ia menimba ilmu mengenai agama. Ini yang kemudian tidak dimiliki oleh Jali, otoritas dan legitimasi untuk menjadi seorang pemuka agama.

Tidak cukup sampai disitu, selanjutnya karena unsur-unsur untuk memperkuat identitas barunya telah tercukupi, dia kemudian memproklamirkan dirinya sebagai *bapak kolot*. Sebutan bagi orang tua desa yang memiliki kemampuan supranatural untuk membantu mengatasi masalah orang lain. Arti yang lain, seperti halnya “orang pintar”, dukun, paranormal ataupun orang yang memiliki kesaktian. Memang tidak secara langsung dan besar-besaran ia memproklamirkan dirinya sebagai *bapak kolot*, dia tidak pernah memasang papan nama, dia tidak pernah mensosialisasikan kemampuannya pada warga desa, bahkan banyak warga sekitar yang tidak tahu apabila Jali saat ini telah menjadi *bapak kolot* bagi orang-orang luar desa. Yang mereka tahu hanya, saat ini banyak sekali orang-orang asing –luar desa – yang berkunjung ke Udik untuk mencari dan bertemu dengan Jali, tanpa pernah tahu apa tujuannya.

Seorang tukang jahit di kampung ini mengatakan bahwa pada saat lebaran lalu, Jali banyak membawa pakaian-pakaian untuk dijahit ulang disesuaikan dengan bentuk dan ukuran tubuhnya. Pakaian-pakaian itu menurut pengakuan Jali, diberikan oleh kenalan-kenalannya yang sering berkunjung ke rumahnya. Bahkan pada satu kesempatan, ada dua stel pakaian dinas camat yang dijahit ulang di tukang jahit ini. Kiranya, saat ini semakin banyak orang kota yang meminta pertolongan Jali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka.

Pada kali waktu saya kesana, beberapa minggu setelah lebaran, dan suasana lebaran masih terasa sekali di kampung kecil itu. Ada satu kejadian yang

menurut saya menggambarkan bahwa ada perubahan mendasar pada diri Jali dan Cimandiri Udik saat ini, yakni :

Diantara rumahnya dengan MCK yang dibangun oleh Kekal, telah berdiri Mushalla kecil yang permanen dan kelihatan terawat. Tidak sampai disitu saja keterkejutan saya, saya lihat ada dua motor yang parkir dimuka rumah Pak Jali, sementara di dalam rumah ketika kami berniat masuk, ada tamu-tamu yang sedang duduk di kursi, sementara istri Pak Jali terlihat membawa baskom kaleng yang dari jauh Nampak berisi air kembang. Tidak kalah terkejutnya pasangan suami istri itu ketika melihat kami dimuka rumahnya. Segera saja kami menyapa Pak Jali dan langsung cepat-cepat meninggalkan rumah itu untuk berjalan ke kuburan di belakang rumah Pak Jali. Kuburan yang jauh dari kesan seram, karena nampak bersih, terawat, bahkan disediakan saung untuk sekedar duduk-duduk dan berteduh disana. Anak-anak dan remaja banyak yang menggunakan areal ini untuk sekedar bermain atau nongkrong. Tidak lama kemudian, Pak Jali menghampiri kami dan mengajak kami untuk menunggu di depan rumahnya, seraya menawarkan kopi serta memberikan sinyal kepada kami bahwa orang-orang itu adalah "pasien" dari Jakarta yang sengaja datang untuk meminta bantuan spiritual kepadanya. Setelah memastikan kami duduk di depan rumahnya, ia kemudian masuk kembali ke dalam. Satu penampakan sikap yang tidak lazim menurut saya, jika dahulu kami berhubungan begitu akrab, hangat bahkan cenderung kurang ajar karena usia kami terpaut begitu jauh dengannya, tapi baru saja dia menunjukkan sikap yang serius, dingin dan seolah-olah berwibawa. Sejenak saya pastikan setting situasi apa yang tengah berlangsung diantara kami. Setelah tamu tersebut pergi, kemudian Pak Jali keluar rumah untuk bergabung dengan kami yang duduk-duduk di teras mushalla. Seketika gaya bicara, tutur kata serta sikapnya berubah seperti saat saya mengenalnya dahulu. Dengan lantang – memang dia

terbiasa berbicara kencang dan sedikit sesumbar – dia menceritakan apa yang barusan saja terjadi, mungkin dia mencoba untuk menetralsir suasana atas kekakuan yang muncul barusan saja.

Dalam situasi yang demikian, dia sendiri mengakui bahwa dengan kemampuannya sekarang dia memperoleh pendapatan sampingan yang cukup lumayan, bahkan terasa berlebih jika dibandingkan pekerjaannya sebagai petani penggarap ataupun buruh tani.

...Selanjutnya dengan setengah menyombongkan diri, Pak Jali mengeluarkan amplop dari dalam saku baju kemudian membukanya didepan kami, nampak uang lima puluh ribuan muncul dari balik amplop itu, kemudian dia mengeluarkan lagi uang lima puluh ribu dari saku kantong yang lain, serta merta dengan bangganya dia mengatakan " ...coba kalau macul..., berapa hari baru bisa dapet segini..".

Untuk menunjang profesinya itu, dia membangun kamar baru di bagian belakang rumahnya, khusus untuk dirinya sendiri dan para pasiennya yang datang. Di kamar itu banyak terdapat benda-benda yang dia anggap keramat atau pusaka. Profesinya itu ditunjang oleh istrinya. Sang istri dengan telaten melayani tamu-tamu yang datang, mulai dari memberikan makanan ataupun minuman, sampai menyiapkan sesaji serta memandikan khusus pasien wanita. Menurut pengakuan Jali, saat ini dirinya hampir bisa dikatakan tidak bisa istirahat malam, karena hampir setiap malam dia harus bergadang membaca *wirid* atau mantra yang diperuntukkan bagi pasien-pasiennya. Hal ini pula yang kemudian menghalangi dia untuk bisa melakukan aktivitas sehari-harinya sebagai petani penggarap. Satu contoh lain yang menunjukkan bahwa Jali saat ini sudah bisa dikatakan kecukupan secara ekonomi adalah ketika ladangnya sudah tiba masa panen kacang panjang dan buncis, dia tidak serta merta memanennya atau mempekerjakan orang untuk memanen hasilnya. Dia

membiarkan saja, alasannya dia tidak kuat untuk pergi ke sawah karena semalam sampai pagi dia harus *wirid*.⁵⁹

Untuk membangun satu konstruksi yang kuat atas keberadaannya sebagai seorang *bapak kolot*, kiranya seluruh potensi yang ada di sekitarnya dimanfaatkan secara langsung, mulai dari rumahnya yang terpencil dan terletak diujung jalan, mushalla kecil yang berada di depan rumahnya, serta kuburan di belakang rumahnya. Kesemuanya menjadi peralatan yang sangat tepat untuk memperkuat konstruksi atas kesaktian dirinya itu.

Perlawanan Simbolis Warga

Selaku pemimpin kultural di Udik seperti yang telah disebutkan diatas, saat ini Jali juga menggagas diadakannya pengajian rutin seminggu sekali dimushalla depan rumahnya. Ia menyediakan jasa pengajar (*ustad*) dan makanan atau minuman seadanya bagi warga yang datang di pengajian itu. Satu hal yang mulia menurut saya, namun dalam kenyataannya Jali cukup kecewa karena tidak banyak warga yang antusias untuk ikut serta dalam pengajian ini. Meski fasilitas sudah dipenuhi oleh Jali, namun antusiasme warga justru semakin hari semakin menurun. Hanya pada saat awal saja mereka ikut serta, selanjutnya mereka jarang lagi datang. Beberapa alasan yang dikatakan oleh warga antara lain karena mereka cukup sibuk dengan urusan duniawi mencari makan untuk anak istrinya.

Pengajian itu dilakukan setelah zuhur, yang artinya waktu itu adalah waktu dimana kelompok buruh tani sudah pulang ke rumah. Namun tentu saja pekerjaan bertani bukanlah pekerjaan yang ringan, sehingga waktu setelah zuhur sesungguhnya adalah waktu istirahat untuk para buruh tani. Beberapa orang merasa terpaksa dan tidak enak ketika diundang untuk ikut pengajian, sehingga pada kesempatan-kesempatan berikutnya mereka justru tidak terlalu bersemangat untuk mengaji. Bahkan ada yang secara terang-terangan menolak untuk ikut karena mereka beranggapan ini hanya akal-akalan Jali untuk bisa

⁵⁹ Wirid adalah satu kegiatan ritual kerohanian dengan membaca beberapa bacaan-bacaan berbahasa arab atau berbahasa daerah, yang dilakukan dalam waktu-waktu tertentu dengan tingkat konsentrasi yang tinggi. Wirid dilakukan sebagai sarana dalam rangka memohon satu berkah atau pertolongan dari Tuhan.

menguasai mushalla agar dia bisa dipandang sebagai *ajengan* oleh orang lain. Sejak saat itu pula, Jali mewajibkan istrinya untuk mengikuti pengajian-pengajian di luar kampung yang diselenggarakan oleh warga desa Cimandiri yang lain. Dia mengharuskan sang istri datang dan ikut serta dalam proses pengajian itu.

Meskipun begitu, faktanya, tidak ada warga yang secara terang-terangan menggugat dominasi Jali terhadap mushalla yang ada. Bagi mereka, karena mushalla itu sebenarnya berada di tanah wakaf Jali, sehingga wajar saja apabila Jali saat ini menguasai kegiatan disana. Dan persoalan meramaikan mushalla, itu juga menjadi tanggung jawab Jali. Perkiraan saya, semua ini berawal dari proses pembangunan yang kurang transparan sehingga masyarakat menganggap Jali banyak mengambil keuntungan pada saat pembangunan mushalla dilakukan. Keberadaan mushalla itu sendiri, oleh beberapa orang warga dianggap hanya memberikan keuntungan kepada Jali, masalah kegiatan-kegiatan peribadatan sesungguhnya hanya kedok atau topeng untuk memperlancar urusan-urusannya yang lain. Begitulah sikap yang ditunjukkan oleh warga.

5.3.4. Ritus dan Kontrol Sosial

Negara pada masa orde baru seperti dikatakan oleh Anthlov (2002), berhasil menyerap ritual-ritual yang kerap dilakukan oleh masyarakat desa untuk digunakan sebagai mekanisme kontrol sosial dan politik dalam rangka menjaga stabilitas. Tak terkecuali di Cimandiri, situasi itu masih bisa terlihat dalam beberap kasus selamatan.

Salah satu ritual yang kerap dilakukan di desa adalah selamatan. Selamatan adalah satu ritual yang kerap dilakukan oleh masyarakat. Biasanya mereka melakukan selamatan untuk acara-acara tertentu seperti *njuju* bulan, kelahiran bayi, memperingati kematian anggota keluarga, ada keluarga yang ingin naik haji, atau acara-acara yang sifatnya lebih kolektif, seperti selamatan sedekah bumi, atau untuk memohon perlindungan dari Tuhan atas satu musibah atau

kesulitan bersama⁶⁰. Oleh Geertz (1959) selamatan didefinisikan sebagai ritus keagamaan orang Jawa pada umumnya, makan-makan bersama yang menyimbolkan mistisisme dan kesatuan sosial dari mereka-mereka yang berpartisipasi dalam ritual ini. Selamatan juga digambarkan oleh Geertz telah membentuk sejenis pengikatan sosial yang bersifat universal, satu mekanisme dimana ketegangan, konflik dan ketidakpastian bisa meluruh dengan sendirinya diantara anggota-anggota masyarakat yang ikut serta dalam selamatan ini. Masyarakat Jawa melakukan selamatan agar setiap orang bisa merasa sama satu dengan yang lainnya. Hasil yang diharapkan dari selamatan ini adalah agar tidak seorangpun yang merasa berbeda dengan orang lain, tidak ada seorangpun yang merasa lebih rendah dari orang lain dan tidak ada seorangpun yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari orang lain. Dengan selamatan, rasa benci antara satu dan yang lainnya bisa dihilangkan.(1959:11)

Dalam ritus selamatan itu biasanya ada suguhan-suguhan berupa makanan kecil seperti kue-kue kering, kue basah, rokok ataupun pisang. Sementara makanan besar biasanya dibungkus untuk dibawa pulang. Untuk bingkisan yang dibawa pulang oleh tamu-tamu yang ikut selamatan (*besekek*) biasanya berupa nasi, lauk pauk dan sayur seadanya ditambah dengan kue atau pisang yang disuguhkan tetapi tidak habis dimakan oleh para tamu -- semakin kaya penyelenggara, makanannya semakin banyak dan beragam. Biasanya pada setiap selamatan, selalu saja ada sisa makanan yang disuguhkan seperti kue ataupun pisang. Makanan yang tidak habis ini kemudian akan diambil oleh para undangan dan dimasukkan ke dalam *besekek* mereka masing-masing dengan cara berebutan. Hanya kiai pemimpin selamatan saja yang tidak ikut rebutan makanan karena untuknya sudah disiapkan khusus. Selain sang Kiai, semua orang berebutan tanpa memandang kelas ataupun status mereka dalam masyarakat. Tidak kaya atau miskin, tua atau muda, mereka semua berebut untuk memasukkan makanan kecil dan pisang ke dalam *besekek* mereka masing-masing. Pada saat itulah perilaku seseorang seringkali dinilai oleh masyarakat. Contohnya adalah :

⁶⁰ Soal selamatan ini sempat saya singgung dalam tulisan terdahulu saya mengenai Cimandiri, *ibid*, hal-68

Dalam kasus Jali misalnya, sewaktu ada undangan selamatan di rumah salah seorang warga kampung tetangga, dia mengajak beberapa warga Udik untuk ikut serta. Dalam proses selamatan itu, ada seseorang anggota Jali yang mengambil makanan (pisang) sebelum pembacaan doa dilakukan. Pada saat itulah Jali memarahi orang tersebut dengan menyatakan bahwa orang itu (Masna) telah membuat dirinya (Jali) malu (ngerakeun) dihadapan warga yang lain. Seketika orang itu menghentikan aktivitas makannya setelah diberitahu oleh Jali.

Hal diatas menunjukkan bahwa Jali selain memiliki kontrol terhadap beberapa fasilitas dan sarana umum, juga melakukan fungsi kontrol terhadap perilaku salah seorang tetangganya yang ikut serta dalam ritual-ritual selamatan. Fungsi kontrol itu diperolehnya karena orang yang dia maksud adalah salah seorang warga Udik yang dalam beberapa kesempatan pernah dia ajak untuk bekerja di sawahnya atau mengerjakan pekerjaan lain. Masna, adalah tetangga Jali di Udik. Rumahnya berada di mulut kampung. Kondisi rumahnya cukup memprihatinkan, dengan bilik bamboo yang sudah bolong disana-sini, tampak bahwa Masna termasuk ke dalam golongan orang miskin di desa ini.

Oding lain lagi kisahnya, dia bercerita mengenai seseorang yang menurutnya termasuk golongan orang yang mampu – sawahnya luas, anak-anaknya sudah bekerja semua – namun pada saat selamatan kerap menjadi yang paling banyak mengambil makanan ataupun rokok, tanpa menyisakan untuk orang lain. Perihal orang ini (Joni), ternyata Misdar dan Jali juga memilki persepsi yang sama terhadapnya. Jadilah orang itu bulan-bulanan pembicaraan mereka mengenai perilaku yang dianggapnya menyimpang dari norma-norma kesantunan warga.

Oding sendiri seperti halnya Jali adalah seorang keamanan desa. Dia merupakan anggota hansip Cimandiri. Dia juga merasa tidak sepakat dengan adanya orang-orang kampung yang berperilaku berlebihan dalam memperebutkan makanan pada saat selamatan. Pada perkembangannya

situasi-situasi selamatan seperti itu secara perlahan direspon oleh masyarakat yang menyelenggarakan selamatan untuk mengubah cara pembagian kue atau pisang. Mereka saat ini membuat *besek* yang di dalamnya sudah ada satu atau dua jenis kue serta sebuah pisang. Dengan cara ini mereka berharap semua mendapat porsi yang sama, jadi tidak ada yang mengambil banyak sehingga orang lain tidak kebagian. Selain dari pengaruh dari kehidupan kota yang memang membiasakan untuk menggunakan kotak untuk memuat seluruh makanan yang diberikan kepada orang-orang yang datang pada saat selamatan, pengaruh dari kebiasaan buruk beberapa orang peserta selamatan kiranya cukup mempengaruhi perubahan itu.

Pada titik ini, kiranya selamatan yang ada di wilayah Cimandiri jauh dari pandangan Geertz mengenai selamatan sebagai instrument yang mampu menjembatani konflik dan ketegangan diantara warga. Selamatan tidak lagi bisa dipandang sebagai satu ritual keagamaan *an sich* seperti apa yang ditemukan Geertz di Mojokuto. Meski tujuan dari diadakannya selamatan adalah menciptakan situasi harmoni di tengah masyarakat dan terkabulnya keinginan atau niat yang diinginkan oleh yang punya hajat. Namun selamatan saat ini menyimbolkan banyak hal. Dari makanan yang disajikan saja kita bisa melihat, selamatan ini dilakukan oleh siapa, bagi mereka yang termasuk kelompok elit dan orang kaya desa, maka makanan bisa berlimpah ruah dan beragam jenisnya. Jauh berbeda apabila selamatan diadakan oleh mereka yang termasuk kelompok petani miskin dan buruh tani. Selain itu, problem kekuasaan tidak saja hanya berlaku dalam hubungan-hubungan ekonomi ataupun politik di masyarakat. Dalam kasus selamatan di Cimandiri, keinginan untuk mengontrol perilaku seseorang dalam ritual selamatan pada kenyataannya justru memunculkan benih-benih ketegangan diantara masyarakat.

5.4. Strategi Petani, Jaringan Kerabat dan Pragmatisme Politik

Dalam menghadapi situasi-situasi sulit seperti yang sekarang ini, beberapa strategi-strategi pokok yang dilakukan oleh kelompok petani miskin pada dasarnya tidak mengalami perubahan. Seperti yang diungkapkan oleh Anthlov (2002), Migdal (1974), Breman (2004) para petani miskin di perdesaan masih

mengandalkan strategi yang sama selama beberapa kurun waktu. Strategi yang disebutkan sebagai strategi ke dalam (*inward strategy*) dan strategi ke luar (*outward strategy*). Strategi ke dalam diantaranya adalah mengatur bagaimana pengelolaan keuangan rumah tangga dilakukan, seperti, mengkombinasikan penggunaan gas, minyak tanah dan kayu bakar untuk kegiatan memasak. Tidak hanya kelompok buruh tani, namun petani kecil dan petani penggarap juga melakukan hal yang sama. Kemudian, mengatur sedemikian rupa, kebutuhan beras yang dikonsumsi setiap hari. Pada praktiknya, mereka kemudian mengurangi jatah asupan kalori untuk keluarga. Bisa kita lihat, dengan bobot pekerjaan yang sama dari waktu ke waktu, sementara asupan kalori terpaksa di kurangi karena ketidakmampuan mereka untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dalam jumlah yang banyak.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan seperti ada keluarga yang sakit atau terkena musibah, mereka mengandalkan bantuan dari keluarga dan kerabat dekat. Bantuan dari anggota keluarga menjadi satu-satunya jalan keluar mengatasi kebuntuan ini. Berkaca dari penjelasan Migdal, bahwa kelompok petani miskin seperti ini dalam rangka mencari bentuk-bentuk perlindungan atas ketidakpastian yang mereka hadapi setiap hari cenderung membentuk sistem perlindungan sendiri diantara mereka. Jenis perlindungan yang tentu saja memperkuat ikatan horizontal diantara para petani itu. Ikatan horizontal yang anggotanya adalah para petani yang sama-sama tidak memiliki akses yang baik terhadap sumberdaya. Mereka tidak lagi bisa mengandalkan kelompok petani kaya yang ada di desa. Kasus keluarga H. Udin yang semula diandalkan oleh keluarga petani miskin macam Dedih tentu menunjukkan pada kita bahwa pada beberapa keluarga tuan tanah di perdesaan juga mengalami kegagalan dalam menjaga kekuatan ekonomi mereka. Bahkan yang lebih tragis lagi seperti dilakukan oleh H. Daud yang berupaya untuk menghindar dari kewajiban-kewajiban sosial yang mestinya ia berikan kepada masyarakat. Situasi ini tentu saja akan menambah dalam jurang antara kelompok kaya dan kelompok miskin di perdesaan. Karena kelompok petani miskin seperti Dedih, Jali, Rohimah ataupun Romli sama-sama masih mengharapkan adanya uluran tangan dari kelompok orang-orang kaya di desa ini untuk memberikan sedikit kekayaan ekonomi mereka dalam bentuk pekerjaan.

Disini bisa kita lihat bahwa kewajiban sosial orang-orang kaya di perdesaan masih diharapkan mampu mengatasi ketidakpastian ekonomi yang dialami oleh buruh tani dan petani kecil.

Dengan membangun sistem proteksi diantara petani miskin ini, bisa dipastikan resiko hidup mereka akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan sistem itu merespon tantangan-tantangan dari luar yang dalam bahasa Migdal dianggap oleh para petani itu sebagai arena yang sangat rapuh dan tidak bersahabat. Berbeda dengan penjelasan Breman ketika mengamati bentuk strategi petani kecil di wilayah pesisir yang ikut terimbas krisis ekonomi 97. Dalam pengamatan Breman dikatakan bahwa keluarga-keluarga petani miskin dalam situasi ekonomi yang cukup sulit berusaha menghindari bentuk-bentuk bantuan kepada sanak keluarganya. Pada praktiknya, di Cimandiri kelompok petani miskin masih mau untuk mengupayakan bantuan demi membantu keluarga dan kerabatnya yang sakit atau mengalami musibah.

Sementara itu, strategi ke luar yang dikembangkan oleh para petani ini, adalah memanfaatkan sebesar-besarnya jaringan orang-orang luar yang membawa kesempatan-kesempatan ekonomi bagi mereka. Kasus Jali misalnya, merekrut orang-orang yang dalam konsepsi warga sekitar dan tetangganya dianggap sebagai orang-orang yang tidak jelas, pada dasarnya menjadi satu strategi bagi Jali untuk memperoleh tenaga kerja yang bisa diperbantukan untuk menggarap sawah garapannya. Upaya itu pun dalam beberapa kesempatan diinstitutionalkan melalui perkawinan dengan anak-anak atau saudaranya yang lain. Sebagai keluarga petani penggarap yang tergolong miskin, tenaga menjadi factor penting untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Atau kasus Rohimah yang berhasil menjembatani kepentingan orang kota untuk melakukan investasi kecil-kecilan di desa dengan membeli tanah. Dari semula Rohimah adalah seorang buruh tani, dengan kemampuan ia mencarikan tanah bagi orang kota, seketika dia menjadi petani penggarap yang jika dibandingkan dengan golongan buruh tani situasinya cukup jauh berbeda. Yang paling mencolok, menurut pendapat saya adalah pragmatisme mereka terhadap kekuatan politik yang bertarung di desa. Kasus Jali menunjukkan pada kita betapa masyarakat perdesaan pada praktiknya

menginginkan hal-hal yang konkret serta instan ketimbang memikirkan agenda-agenda perubahan yang memiliki dampak panjang bagi kehidupan mereka.

Ketika ranah kekuasaan politik di tingkat desa masih berada pada genggaman segelintir elit-elit lama di desa ini, maka agenda-agenda perubahan yang semestinya dilakukan untuk memperbaiki taraf hidup kelompok petani miskin di perdesaan terancam tidak berjalan. Di perdesaan, betapapun perubahan politik di tingkat nasional ataupun daerah, sesungguhnya tidak bisa menggeser peran dan kekuasaan elit-elit lama. Hal ini terbukti dengan sirkulasi kepemimpinan di desa yang masih berkuat pada keluarga-keluarga keturunan pemimpin-pemimpin desa masa lalu. Pada titik ini kiranya saya sepakat dengan penjelasan Breman dan Wiradi mengenai kekhawatiran mereka ketika reformasi mulai digulirkan.

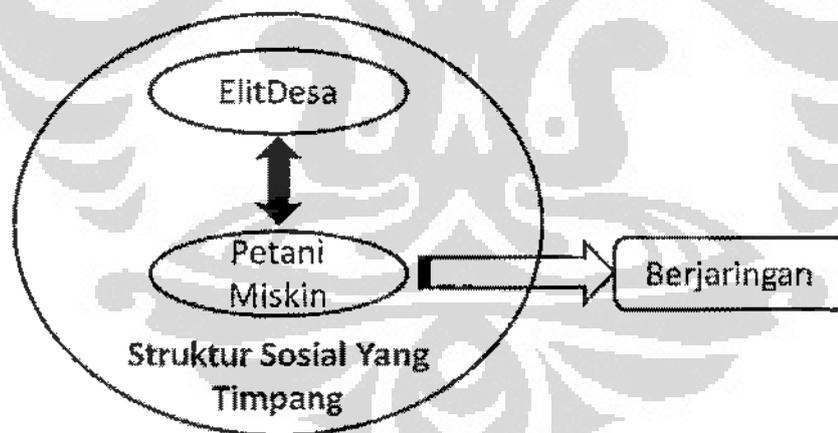
...kebutuhan yang paling mendesak untuk memberikan pengamanan sosial pada massa luas penduduk tidak akan dipenuhi kecuali kalau ada perubahan kekuasaan politik yang jauh lebih drastis dibandingkan dengan yang telah terjadi sampai sekarang. Dan perubahan ini tidak bisa didasarkan pada prasangka tentang nasib yang harus ditanggung bersama oleh kelas-kelas yang kedudukannya sangat senjang, suatu prasangka yang didengungkan sebagai asas pengorganisasian gerakan, perubahan haluan dari peminggiran ke pengikutsertaan, yang disebut reformasi itu, bukan suatu momen, melainkan suatu proses. Evolusi proses ini, baik di masa cerah maupun di masa suram, perlu selalu di pantau, ... (2004:230)

Gambaran lama mengenai organisasi petani yang cukup kuat di Cimandiri saat ini juga tidak ditemukan sama sekali.⁶¹ Walaupun ada, sifatnya hanya artificial saja, tidak ada muatan ideologis yang bisa menggerakkan petani sebagai satu kelas di masyarakat. Kabar terakhir yang saya dengar, saat ini ada satu kelompok minatani di Cimandiri. Kelompok tani yang diketuai oleh salah seorang staf desa yang pada prosesnya kerap menerima program-program bantuan dari pemerintah

⁶¹ Penjelasan dalam catatan Sudargan bahwa pada tahun 50-60 an, di desa ini terdapat beberapa organisasi petani seperti BTI dan GTI.

ataupun perguruan tinggi. Ruang gerak mereka hanya khusus pada program-program peningkatan kapasitas petani dalam mengolah asset-aset yang dimiliki. Tidak ada kepentingan mendasar petani yang diperjuangkan oleh organisasi seperti ini. Proses uniformisasi organisasi tani di perdesaan pada masa orde baru kiranya telah melumpuhkan kemampuan dan kesadaran kritis petani dalam berorganisasi di desa. Ketiadaan organisasi yang kuat inilah yang pada gilirannya memudahkan para petani untuk kembali dieksploitasi oleh kapitalisme pasar melalui cara-cara yang lebih halus.

Dari beberapa kasus diatas, kiranya kita bisa melihat bahwa masing-masing keluarga petani miskin di perdesaan dalam situasi yang cukup sulit, dalam struktur sosial yang demikian terkungkung dan dengan ketimpangan yang ada, telah secara rasional mengembangkan dan memanfaatkan jaringan-jaringan yang mereka miliki. Atau dengan kata lain, jaringan yang dibangun oleh para petani berangkat dari satu struktur sosial yang timpang. Ada kesan bahwa jaringan yang dibangun, meskipun rasional namun dalam kenyataannya seperti terpaksa dilakukan oleh para petani.



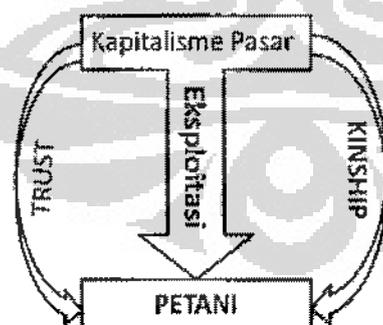
Gambar 10. Dorongan Petani Miskin Untuk Berjaringan

5.5. Perubahan Yang Melanggengkan Eksploitasi dan Kemiskinan
 Struktur sosial di perdesaan, pada kenyataannya tidak banyak mengalami perubahan pasca reformasi. Perubahan sosial-politik, gelombang besar demokratisasi dan desentralisasi sampai ke daerah-daerah pada kenyataannya tidak juga memiliki pengaruh yang kuat untuk merubah struktur produksi

pertanian yang timpang. Ketimpangan masalah kepemilikan alat produksi antara kelompok petani lahan besar dengan petani lahan kecil dan buruh tani.

Kelompok buruh tani yang dalam struktur produksi pertanian ini menempati posisi paling bawah dan paling rentan, sama sekali tidak mampu menciptakan momentum untuk mendorong satu proses perubahan. Kelompok elit desa baik pemilik tanah ataupun para penguasa politik dan pemerintahan desa disibukkan dengan ritual sirkulasi kekuasaan di kalangan mereka tanpa pernah memikirkan satu upaya massif untuk memperbaiki hajat hidup kelompok miskin di lingkungan mereka. Peranan para tengkulak sebagai lembaga perantara petani dan pasar, masih tetap berlangsung. Hanya mekanisme transaksinya saja yang mengalami perubahan pola, namun sejatinya, bentuk-bentuk dominasi kelompok tengkulak besar terhadap petani kecil dan buruh tani tetap berlangsung.

Dalam kasus Cimandiri ini kita juga bisa melihat bahwa dalam sistem produksi pertanian yang eksploitatif ini, strategi yang digunakan oleh kelompok tengkulak besar untuk melanjutkan dominasi mereka adalah dengan memanfaatkan elemen-elemen yang ada dalam masyarakat seperti kepercayaan antarwarga desa serta jaringan kekerabatan yang kuat di masyarakat. Dengan memanfaatkan ikatan-ikatan sosial semacam ini, proses eksploitasi menjadi semakin samar dan tidak disadari oleh masyarakat, dan pada prosesnya jauh lebih efektif.



Gambar 11. Problem Hubungan Pasar dan Petani

Sementara itu, kelompok buruh tani hanya bisa mengandalkan strategi-strategi yang paling mungkin dilakukan. Ditengah ketidakpastian sehari-hari yang ditemui oleh keluarga buruh tani seperti Dedih dan Romli, jaringan kekerabatan yang

sempit menjadi satu-satunya sistem yang bisa mereka andalkan untuk mengatasi ketidakpastian sehari-hari itu.

Berkaca pada tesis Scott yang menunjukkan respon petani terhadap ketidakadilan melalui aksi-aksi perlawanan sehari-hari yang sunyi. Atau hasil kajian Suwondo yang menjabarkan lahirnya organisasi masyarakat sipil di perdesaan dalam rangka mengatasi persoalan sehari-hari petani. Maka, Cimandiri dalam hal ini tidak nampak atas kedua hal tersebut. Para petani kecil disini mengalami kesulitan untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok kaya, ataupun berinisiatif untuk membentuk organisasi petani. Pada beberapa keluarga, jalan keluar yang diambil justru berupaya untuk meninggalkan profesi sebagai petani, dengan mencoba peruntungan di tempat lain. Ditunjang dengan pengaruh kota yang begitu kuat karena dekatnya Cimandiri dengan Bogor serta kemudahan akses dari dan ke Jakarta. Banyak buruh tani yang kemudian memilih untuk menjadi pembantu rumah tangga atau bekerja di pabrik. Menjadi pembantu rumah tangga jauh lebih ringan pekerjaannya ketimbang menjadi buruh tani. Fasilitas yang mungkin diperoleh juga jauh lebih banyak daripada buruh tani. Dengan kata lain, hasrat untuk memperjuangkan kepentingan kelas mereka sebagai petani dengan melakukan perlawanan ataupun membentuk satu organisasi dikalahkan oleh adanya kesempatan baru dalam bidang ekonomi, yakni industri dan jasa. Konsekuensinya kemudian semakin berkurangnya jumlah tenaga kerja produktif dalam sektor pertanian. Buruh tani yang dominan saat ini adalah mereka-mereka yang berusia diatas 40 tahun. Bagi mereka yang masih muda dan berpendidikan, menjadi buruh tani adalah pilihan terakhir ketika tidak ada lagi pekerjaan yang bisa dilakukan.

Namun demikian, ditengah situasi krisis finansial global yang salah satu dampaknya adalah bangkrutnya pabrik-pabrik yang mengandalkan pasar luar negeri, dampak terberat dialami para tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Gelombang PHK ini pada prosesnya akan mendorong peningkatan jumlah buruh tani di perdesaan. Jika kita berkaca pada hasil kajian Breman dan Wiradi mengenai dampak krismon 97 di perdesaan Subang, disana dapat kita lihat bahwa sektor pertanian di desa menjadi benteng terakhir dari para

buruh pabrik yang tidak lagi memiliki penghasilan. Padahal pada kenyataannya, luas lahan pertanian tidak bertambah sama sekali, bahkan di beberapa lokasi yang semula persawahan, saat ini telah berdiri rumah-rumah baru. Dengan kata lain, akan terjadi persaingan yang cukup tinggi di kalangan buruh tani, baik buruh tani yang lama, ataupun mereka yang baru saja menjadi buruh tani akibat dipecah dari pekerjaannya di kota. Situasi persaingan ini akan bercampur dengan proses pemilu yang sebentar lagi akan dilakukan di republik ini. Tarik ulur antara kelompok-kelompok politik di tingkat desa yang memperebutkan suara golongan petani kecil dan buruh tani pada prosesnya dapat memicu kerawanan-kerawanan sosial di masyarakat.

Dari penjelasan diatas pula, kiranya kita bisa menarik satu kesimpulan kecil bahwasanya, petani bukanlah satu identitas yang sifatnya homogen. Mereka terdiri dari orang-orang, kelompok-kelompok keluarga yang sesungguhnya berada dalam satu konstruksi yang tidak terbatas. Meskipun jika kita menggunakan perspektif ekonomi-politik dengan menggunakan patokan kepemilikan tanah misalnya, akan terdapat batasan-batasan yang jelas antara petani yang mempunyai dan yang tidak. Namun, pada kasus Dedih, identitasnya adalah seorang buruh tani, mantan klien dari satu keluarga, namun juga berprofesi sebagai pedagang, yang eksistensinya mengancam keberlangsungan tengkulak seperti Obar. Atau Jali, yang anggota hansip desa, petani penggarap, kadang-kadang menjadi buruh tani dan saat ini sedang mendaki tangga popularitas sebagai seorang *bapak kolot*. Atau H. Zainal, yang tuan tanah, guru di desa lain, tokoh masyarakat, tetapi kehilangan *grip* nya dalam ranah pertanian di Cimandiri karena tidak ada lagi penerusnya yang akan melanggengkan bentuk-bentuk kekuasaan simbolis yang dimilikinya saat ini. Dengan kata lain, definisi petani sebagai satu kelas pekerja menjadi demikian kabur, karena di dalamnya terdapat stratifikasi yang jelas. Oleh karena itu, perjuangan kepentingan kelas petani pada hakekatnya seringkali terjebak dalam rumusan-rumusan kepentingan para petani besar atau elit di perdesaan. Organisasi-organisasi petani yang saat ini muncul pun tidak luput dari penguasaan kelompok elitnya, sehingga agenda perubahan nasib kelas petani tidak bisa dititipkan pada organisasi petani yang di dalamnya masih ada itikad untuk tetap membiarkan kesenjangan-kesenjangan itu dilanggengkan.

5.6. Kekuasaan Yang Tersebar

Sejatinya dalam pandangan Gramsci yang kemudian dikritik sangat keras oleh Scott, kekuasaan adalah sesuatu yang sifatnya determinan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Hegemoni dalam pandangan Gramsci mengisyaratkan agar satu kelompok mestilah memegang kekuasaan penuh untuk kemudian melancarkan kerja-kerja penyadaran dalam rangka mencapai satu posisi hegemonik. Satu kelas sosial mestilah mampu melampaui kepentingan-kepentingan kelas sosial yang lain untuk bisa berkuasa. Namun tidak demikian dengan pandangan Scott mengenai kekuasaan. Posisi hegemoni itu menjadi satu persoalan tersendiri. Jika Gramsci menilai satu relasi yang sifatnya deterministik dari satu kelas kepada kelas yang lain, Scott justru melihat relasi antar kelas yang sangat dinamis terutama pada konteks kekuasaannya. Sehingga posisi hegemonik sendiri dalam hal ini digugat habis oleh Scott melalui satu tesis mengenai perlawanan diam-diam kaum tani di Asia Tenggara. Dalam posisi yang sangat timpang sekalipun, atau dalam satu keadaan dimana para petani menempati satu posisi yang sangat sulit untuk melakukan resistensi nyata terhadap kelas penguasa atau negara, mereka senantiasa mampu menyimpan dan memelihara bara perlawanan terhadap kelas di atasnya dengan gaya yang khas. Tidak dengan membangun satu kekuatan politik berdasarkan kelas petani, tidak dengan melakukan aksi-aksi perlawanan berdarah, melainkan hanya dengan memberikan simbol-simbol yang menunjukkan eksistensi mereka bahwa mereka berada pada posisi yang tidak bisa senantiasa dikuasai. Perlawanan yang sifatnya simbolis dan sporadis ini, disadari oleh setiap orang sebagai satu-satunya cara untuk menunjukkan ketidaksenangan atas klaim dominasi yang dimainkan oleh kelompok penguasa. Dengan menunjukkan simbol-simbol itulah, mereka masih terus mampu bertahan hidup. Bertahan dalam tekanan sosial dari kelas di atasnya. Bertahan dalam struktur sosial yang meniadakan jalan alternatif bagi perbaikan kualitas hidup mereka. Dengan demikian dalam kaca mata Scottian, kekuasaan menjadi tidak deterministik lagi sifatnya.

Pemusatan kekuasaan yang bersumber dari penguasaan alat produksi dan sumber-sumber kekuasaan negara menjadi kurang relevan apabila dikaitkan dengan perlawanan diam-diam kaum tani itu. Hal ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan telah menjauh dari satu posisi yang tersentralisasi menjadi terdistribusi dalam kualitas dan kadar yang sangat beragam. Kekuasaan yang semula dipandang hanya berada pada tingkat relasi makro dalam hubungan sosial di masyarakat, dengan keadaan yang ditemui oleh Scott, kekuasaan menjadi tersebar sampai pada level yang sangat mikro. Kekuasaan terbagi-bagi diantara anggota masyarakat. Setiap saat settingnya bisa berubah. Posisi dominasi ataupun hegemoni menjadi tidak relevan digunakan untuk melihat kecenderungan-

kecenderungan perilaku yang mungkin muncul akibat posisi yang timpang itu. Ketimpangan tidak menyebabkan orang tunduk patuh sepenuhnya, karena semarjinal apapun seseorang atau sekelompok orang, mereka tetap masih memiliki kekuasaan. Kekuasaan yang meski tidak bisa ditunjukkan secara ekonomi maupun politik, namun dimaknai secara utuh oleh mereka sebagai satu simbol yang bisa menegaskan eksistensi mereka sebagai kelas yang merdeka.

Dengan porsi kekuasaan yang beragam, setiap orang akan berusaha untuk membangun atau mengkonstruksi pemaknaan atas dirinya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Dengan kata lain, seseorang senantiasa bisa menyesuaikan diri dengan dinamika struktur sosial yang melingkupi dirinya. Hal ini berarti determinasi struktur sosial dalam mempengaruhi individu-individu menjadi lemah dikarenakan tersebarnya kekuasaan dalam kualitas yang beragam. Dalam konteks ini pula, persoalan menguasai atau dikuasai tentu memiliki pemaknaan yang agak berbeda. Seseorang bisa secara dinamis menempatkan diri pada posisi menguasai ataupun dikuasai. Sehingga, bukan saja orang cenderung sadar untuk berkuasa jika ia memiliki kekuasaan. Justru kecenderungan untuk dikuasai sebenarnya bersumber dari kesadarannya akan kadar kuasa yang ia miliki. Dalam satu relasi patronase di perdesaan, kiranya penjelasan mengenai hal ini menjadi masuk akal.

Kita mungkin bisa melihat dalam kasus Cimandiri, bagaimana orang seperti Jali melakukan pembangkangan terhadap kelompok penguasa desa dengan membangun satu identitas baru mengenai dirinya. Dalam situasi yang timpang itulah, Jali dengan sadar mencoba membangkitkan simbol untuk bisa didengar perkataannya melalui profesinya sebagai *bapak kolot*. Memang tidak di setiap konteks relasi dengan orang lain perkataan Jali akan di dengar orang atau bahkan dituruti oleh semisal Lurah Rokib Namun dalam momen yang diciptakan dan dikreasikan sendiri oleh Jali, kondisi itu bisa berlangsung. Pun demikian, hal ini dialami juga oleh tetangga-tetangga di sekitar rumah Jali. Penguasaan ruang publik oleh Jali sepertinya bisa dilihat sebagai bentuk hegemoni kecil di tengah-tengah kampung yang menggunakan peralatan-peralatan seperti majelis taklim dan aliran uang yang berasal dari pekerjaan membersihkan makam. Namun dalam praktiknya, hegemoni yang seharusnya diiringi oleh proses tunduk patuhnya tetangga-tetangga Jali ternyata tidak berlangsung dengan mulus. Bentuk-bentuk pembangkangan kembali dilakukan oleh tetangga-tetangga Jali yang merasa Jali banyak bertindak tidak adil terhadap mereka. Ketidakhadiran mereka dalam beberapa acara yang diselenggarakan oleh Jali, diakui sebagai satu bentuk perlawanan terhadap simbol

kekuasaan yang coba dikonstruksi oleh Jali. Pembangkangan yang dilakukan oleh mereka sekali lagi membuktikan bahwa kekuasaan berada pada setiap individu dalam satu struktur sosial yang melingkupinya. Kekuasaan itu ada dan terus dihidupkan dengan kualitas dan kadar yang beragam. Kekuasaan yang senantiasa bisa digunakan oleh para petani untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya atau untuk menunjukkan pada orang lain bahwa mereka masih memiliki tenaga dan kemampuan untuk tidak mau tunduk patuh terhadap orang lain. Sejatinya manusia itu adalah makhluk yang bebas dalam arti enggan berada dalam struktur sosial yang memiliki kecenderungan untuk membelenggunya. Meski setiap saat manusia mencoba untuk membebaskan diri, setiap saat itu pula mereka justru membangun belenggu-belenggu baru yang kembali akan membatasi kebebasan mereka. Yang membedakan lagi-lagi adalah seberapa besar porsi kekuasaan yang bisa diperoleh, dipertahankan ataupun ditambah. Kiranya kecenderungan manusia untuk membebaskan diri dari satu belenggu struktur adalah ilusi, karena tabiatnya manusia adalah membangun struktur itu sendiri.

Runtuhnya dominasi negara atas kehidupan masyarakat di perdesaan pasca gelombang besar reformasi telah mendorong perubahan relasi sosial di masyarakat, termasuk dalam hal ini relasi patronasenya. Hilangnya dominasi kekuasaan negara, mendorong para elit desa yang semula memiliki hubungan dengan jalur-jalur kekuasaan mereposisi dirinya untuk mencari sumber-sumber kekuasaan baru. Pada titik ini, relasi antara para patron lama dengan klien-kliennya juga mengalami pasang surut akibat perubahan aliran *resources* yang disebabkan bergesernya sumber-sumber kekuasaan eksternal desa. Semua pihak, tidak hanya kelompok elit desa, mencoba mencari bentuk-bentuk kekuasaan baru. Bagaimana semisal Rokib sang kepala desa yang sebelumnya memiliki ikatan kuat dengan kelompok penguasa orde baru, kemudian membangun relasi baru dengan kekuatan politik yang menurutnya dominan di wilayah Bogor. Seketika dia tinggalkan relasi lamanya. Jika sebelumnya Rokib dilihat sebagai tangan-tangan negara yang berada di desa. Seketika negara menjadi tidak bermakna dihadapan Rokib. Atau paling tidak relasi antara dirinya dengan struktur besar bernama negara direvisi secara cepat. Dengan kata lain, ia sebenarnya sedang mengangkangi negara, negaralah yang kemudian digunakan dan dikuasai olehnya meski pada level kampung. Ini membuktikan bahwa ia memiliki kekuasaan meski pada lingkup yang sangat kecil. Dia memiliki kekuasaan untuk menguasai, sekaligus dikuasai. Namun yang lebih penting daripada itu semua, posisi ekonomi maupun politiknya tetap ia jaga dan pertahankan. Sehingga dikuasai bukan berarti negatif bagi Rokib. Dikuasai adalah strategi untuk mempertahankan posisi dominannya di ranah Cimandiri. Kasus Rokib dan Jali kiranya menyiratkan satu keadaan

yang membingungkan, atau bisa dibilang tidak mudah untuk menentukan siapa menguasai siapa, atau siapa dikuasai siapa. Inilah yang oleh Scott mungkin dikatakan sebagai satu situasi manipulasi timbal balik lambang-lambang eufimisme.⁶²

Masih dalam posisi ini pula, dimensi perubahan sosial di desa menjadi sumir di tangan para elit yang berkuasa, karena perubahan sesungguhnya menjadi alat untuk bekerjanya kekuasaan. Manfaat-manfaat substantif dari perubahan sosial di perdesaan, seperti modernisasi pertanian, terbukanya akses pasar dan liberalisasi politik pada dasarnya akan mengalir mengikuti porsi-porsi kekuasaan yang berjalani di satu wilayah. Untuk mengatasinya, tentu diperlukan langkah kuat dari negara untuk senantiasa mendesain kerja-kerja transformatif masyarakat desa dengan mengedepankan kepentingan dari kelompok-kelompok masyarakat yang senantiasa terpinggirkan akibat lemahnya kekuasaan yang mereka miliki. Pada titik ini, intervensi dari luar menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses transformasi itu.

5.7. Siapa Pasar dan Siapa Negara

Problem terbesar dalam praktek kekuasaan di desa pasca tumbanganya orde baru adalah semakin tidak kentarnya batas antara negara dan pasar. Jika di masa orde baru berkuasa negara memberikan banyak fasilitas kepada kelompok *pseudo kapitalis* atau kapitalis ragu-ragu melalui mekanisme penguasaan atas asset-asset publik oleh kelompok elit desa, di masa setelah reformasi, dinamikanya cukup berbeda. Dan dalam konteks penelitian ini, ada beberapa contoh menarik yang bisa kita lihat sebagai satu pola penguasaan ekonomi masyarakat dengan mengaburkan batas antara negara dan kelompok kapitalis desa.

Kekuasaan negara di desa pada masa orde baru menurut Anthlov akan lebih efektif berjalan apabila kelompok yang berkuasa mampu menyerap dan menggunakan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dalam kacamata Foucault hal inilah yang dikatakan sebagai kekuasaan simbolis, dimana kekuasaan seperti ini akan bekerja dengan sangat efektif manakala dominasi yang sesungguhnya bisa disamarkan oleh si penguasa.⁶³ Bagaimana masyarakat dapat dipengaruhi oleh kekuasaan negara, kiranya penjelasan Anthlov mengenai kosmologi kekuasaan menurut orang Sunda menjadi penting. Menurutnya, kekuasaan bagi orang Sunda

⁶² Ibid hal-406

⁶³ Ibid, Anthlov, hal-13

mestilah terjalin dalam satu kerangka ideologi yang mencegahnya untuk ditantang.⁶⁴ Atau yang dalam terminologi orang Jawa mungkin peribahasa *ngehuruk tanpa bolo-menang tanpa ngasoraake* mampu mencerminkan apa yang oleh Foucault dikatakan sebagai kekuasaan simbolis.

Jika Anthlov dan Foucault mencoba mengurai aspek kekuasaan dari praktik-praktik yang sangat simbolis. Scott dengan dibantu oleh pemahaman Bourdieu mengenai eksploitasi simbolis melihat bahwa kekerasan yang paling canggih antar manusia terjadi tatkala eksploitasi secara terang-terangan tidak mungkin lagi dilakukan.⁶⁵

Eksploitasi atas kekuasaan ekonomi kemudian dibuat sangat halus, lembut dan terselubung. Hal-hal yang semula bisa dilihat sebagai bentuk-bentuk kemurahan hati, pertolongan dan bantuan bisa dimaknai sebagai satu kekerasan simbolis tatkala setelah itu semua berlangsung, ada tuntutan-tuntutan kepada orang atau kelompok yang dikuasai untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sukarela, kerja bakti atau gotong royong untuk kepentingan pihak yang berkuasa. Kekerasan simbolis dengan kata lain terjadi tatkala bentuk-bentuk kebaikan atau itikad untuk mencapai satu situasi yang baik mesti dipertukarkan dengan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang dikuasai. Proses ini mesti sedemikian tersamar sehingga daya rusaknya hampir tidak disadari. Dalam konteks hubungan patronase di desa, dimensi resiprositas dalam rangka mendukung tetap terjaganya hubungan sosial masih tetap dijaga. Kesan saya, resiprositas dalam hubungan patron-klien di desa pada prinsipnya mencerminkan bentuk eksploitasi simbolis.

Dalam level yang lebih makro ketika kita berbicara elemen-elemen supra desa – seperti yang tertuang dalam kerangka pikir penelitian ini – yang menjadi faktor determinan dalam konteks perubahan sosial di desa, kiranya bentuk penguasaan simbolis dan eksploitasi simbolis inilah yang pada gilirannya mengaburkan batasan antara negara dan pasar. Proses dominasi negara yang melemah dan kendali kekuatan pasar yang semakin menguat akibat melemahnya negara pasca

⁶⁴ Ibid, hal-13

⁶⁵ Ibid, Scott, hal-403

reformasi, bukan mendorong penguatan *civil society*, melainkan semakin menguatkan kelompok pasar dan kapitalis desa untuk melancarkan tekanan-tekanan dalam bentuk yang semakin halus.

Di tengah ketidakberdayaan aktor-aktor negara di desa, pasar mampu dengan lihai mendompleng kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Kasus Rokib yang berprofesi sebagai kepala desa plus kepala pasar mencerminkan bagaimana problem batas antara aktor pasar dan aktor negara menjadi absurd. Ojay misalnya, selama beberapa kurun waktu dia adalah ketua RW di Cimandiri Kulon, dan selama beberapa kurun waktu dia menjadi kepala Pasar Anyar, Rokib sendiri terhitung kerabatnya, dan cukup junior untuk urusan pasar. Ojay tidak lagi kuat untuk tiap hari pergi ke pasar. Dia cukup menunggu “jatah” di rumah. Kedua orang ini memiliki jabatan-jabatan yang secara simbolis cukup strategis di desa. Meski menjadi kepala desa atau ketua RW tidak diberi gaji, namun dengan posisi itu mereka mampu memastikan banyak hal bagi kebutuhan pasar. Diantaranya kepastian tenaga kerja yang murah dan kepastian komoditas pertanian untuk pasar. Selain kepastian pasar, mereka juga secara formal memiliki legitimasi untuk memastikan program-program pemerintah berjalan dengan baik. Tentu saja kesemuanya itu dilakukan dalam kerangka memastikan kepentingan dan tujuan-tujuan mereka tercapai. Sekali lagi, para elit desa mampu mengangkangi entitas supra desa. Dan posisi aktor negara ataupun aktor pasar di desa menjadi tidak relevan lagi untuk dipisahkan. Hanya kepentinganlah yang bisa menentukan apakah ini agenda pasar ataupun agenda negara, bukan aktor.

Kasus diatas memiliki dimensi historis yang kuat apabila kita kaitkan dengan sisa-sisa intervensi orde baru di desa. Pada masanya, orde baru menerapkan sistem “mendukung yang kuat” bagi anggota masyarakat yang ingin maju. Dengan dukungan kepada kelompok-kelompok yang kuat itu, diharapkan bisa terjadi apa yang dinamakan mekanisme *trickel down effect*. Dimana keberhasilan yang dicapai oleh kelompok-kelompok kuat itu pada gilirannya akan berimbas atau merembes kepada orang-orang atau pihak-pihak yang tidak mendapat dukungan langsung dari negara. Hal ini terbukti gagal, karena negara lupa bahwa tabiat utama dari kapitalisme sendiri adalah ketamakan dan kerakusan. Ketika sampai

pada situasi mereka tidak lagi mampu menampung manfaat dan keuntungan yang dihasilkan dalam satu proses produksi, bukan membiarkan luberan itu mengalir kemana-mana, mereka justru sibuk membangun kanal-kanal baru untuk menampung luberan yang terjadi. Sehingga dengan asumsi ini, maka bagian untuk orang miskin tidak akan pernah sampai karena senantiasa direproduksi oleh para kapitalis untuk kembali mencari keuntungan. Keberadaan kelompok-kelompok kuat yang mendapat dukungan pemerintah orde baru inilah yang pada masa sekarang menguasai banyak hal di desa. Meski mereka tidak lagi bisa leluasa untuk memperoleh dukungan dan fasilitas negara karena masyarakat yang semakin kritis, namun dengan porsi kekuasaan yang lebih besar daripada anggota masyarakat yang lain, mereka pada akhirnya mampu memenangkan pertarungan.

Dengan kesulitan dalam pendefinisian berbasis aktor untuk menentukan siapa negara dan siapa pasar. Kiranya negara atau pasar mesti dilihat sebagai satu ranah atau arena, dimana setiap pihak, apakah mereka-mereka yang secara formal dikategorikan sebagai pelaku negara ataupun pelaku pasar muncul dengan kepentingannya masing-masing. Dari kepentingannya itulah kita bisa melihat apakah ini kepentingan negara atau kepentingan pasar yang sedang mengemuka sehingga kita mampu melihat secara lebih jernih dan kritis atas apa-apa yang sedang diupayakan untuk dimasukkan ke desa.

BAB VII. KESIMPULAN

Dari riset ini, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil yang terbagi ke dalam dua kategori, yakni, kesimpulan teoritis dan kesimpulan praksis menyangkut kebijakan mengenai pembaruan perdesaan saat ini serta rekomendasi yang dihasilkan dari riset ini.

Kesimpulan Teoritik :

1. Strategi yang dikembangkan oleh keluarga-keluarga petani miskin dalam menghadapi keterkungkungan ini masih berkisar pada cara-cara lama dengan memperkuat ikatan sosial horizontal sesama petani miskin untuk membangun sistem perlindungan sendiri. Pola berjaringan seperti ini dilakukan karena ketiadaan pilihan bagi mereka.
2. Partisipasi keluarga-keluarga petani miskin dalam urusan politik sangat pragmatis dikarenakan organisasi-organisasi yang sebetulnya bisa membangkitkan kesadaran politik petani cenderung dikuasai oleh para elit desa yang tidak memiliki itikad untuk merubah tatanan ketimpangan yang ada. Hal ini yang sangat membedakan dengan situasi tahun 50-60an.
3. Eksploitasi petani di perdesaan saat ini dilakukan oleh kelompok kapitalisme pasar melalui jaringan kekerabatan dengan memanfaatkan sistem kepercayaan diantara masyarakat yang cukup kuat sehingga bentuk dari eksploitasi itu semakin halus dan samar.
4. Sejalan dengan pandangan Scott mengenai kemampuan kelas petani dalam melakukan perlawanan secara diam-diam akibat satu bentuk penindasan yang dilakukan secara langsung. Dalam konteks penelitian ini, eksploitasi yang dilakukan secara simbolis oleh kelas penguasa desa, pada gilirannya mendapatkan bentuk-bentuk perlawanan yang simbolis dari petani. Hal ini terjadi dikarenakan kekuasaan yang ada tidak tersentralisasi melainkan terdistribusi diantara warga desa dengan kadar dan kualitas yang beragam. Tesis ini sekaligus menegaskan bahwa situasi hegemoni atau dominasi secara utuh sesungguhnya tidak terjadi pada masa sekarang, karena masing-masing pihak pada prinsipnya memiliki kekuasaannya sendiri.

5. Pendefinisian berbasis aktor kepada entitas supra desa seperti negara dan pasar, dalam konteks penelitian ini menjadi problematik. Negara atau pasar tidak lagi bisa dilihat atau dibedakan hanya dari aktor atau pelakunya saja, melainkan mesti dilihat dari kepentingan apa yang mengemuka. Negara dan pasar mesti dilihat sebagai satu arena atau ranah yang di dalamnya berbagai aktor bisa ada dan terlibat untuk merumuskan kepentingan masing-masing.
6. Intervensi sosial pada level mikro akan sulit berkesinambungan apabila persoalan kesenjangan di tingkat makro tidak mampu diatasi.

Kesimpulan Praksis dan Rekomendasi:

1. Dalam mengkritisi realitas sosial yang muncul di desa, kiranya setiap hal mesti dilihat dari sisi kepentingan yang muncul. Tidak senantiasa aktor negara membawa kepentingan negara, dan tidak setiap aktor pasar membawa kepentingan pasar. Keduanya bisa saling menyamakan. Oleh karenanya, pasar dan negara mesti dilihat dari kepentingan yang muncul dan bukan berdasarkan aktornya.
2. Program pemberdayaan yang sejatinya dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, cukup efektif untuk mengatasi persoalan-persoalan kecil dari fenomena kemiskinan itu sendiri. Sementara persoalan besar mengenai kemiskinan hanya bisa diatasi oleh satu upaya massif untuk mengatasi problem kesenjangan diantara masyarakat desa.
3. Mencermati proses politik yang akan berlangsung di tahun 2009 ini, maka kemungkinan paling besar, adalah transaksi politik hanya akan dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik dari luar desa dengan para elit desa. Orang miskin di perdesaan hanya akan menjadi kelompok yang dimobilisasi atas dasar transaksi yang telah dilakukan oleh elit-elit desa. Kalaupun ada manfaat atau keuntungan dari transaksi politik yang terjadi, maka aliran manfaat itu akan mengikuti sistem kekuasaan yang ada berdasarkan kadar dan kualitas kekuasaan masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthlov, Hans. *Negara Dalam Desa-Patronase Kepemimpinan Lokal*. Yogyakarta: LAPPERA PUSTAKA UTAMA, 2002.
- Bauman, Zygmunt, and Tim Malay. *Thinking Sociologically 2nd ed*. Massachusetts: Blackwell Publishing, 2001.
- Bocock, Robert. *Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.
- Bottomore, Thomas B. *Elite and Society*. London: Routledge, 1993.
- Breman, Jan, and Gunawan Wiradi. *Masa Cerah dan Masa Suram di Pedesaan Jawa; Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi Dua Desa Menjelang Akhir Abad Ke-20*. Jakarta: LP3ES dan KTILV, 2004.
- Chambers, Robert. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Faulks, Keith. *Political Sociology; A Critical Introduction*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999.
- Fauzi, Noer. "Nanjeurkeun Obor jang Nyageurkeun Panyakit Poho Sajarah; Sketsa Tiga Abad Politik Agraria di Tatar Priangan." *Tidak Diterbitkan*, Maret 12, 2008.
- Foster, George M. *Traditional Culture and Impact of Technological Change*. New York: Harper, 1962.
- Geertz, Clifford. *Agricultural Involution; The Process of Ecological Change in Indonesia*. Berkeley: Univ. of California Press, 1963.
- . *Interpretation of Culture*. London: Hutchinson & CO Publisher LTD, 1973.
- . *The Religion of Java*. Chicago/London: Chicago University Press, 1960.
- Gunawan, Daddi H. *Penguatan Desa Pakraman Melalui Pengembangan Awig-Awig; Kasus Otonomi Desa di Bali*. Depok: Yayasan Tifa & Kelompok Studi Perdesaan FISIP UI (Belum Diterbitkan), 2008.
- Hart, Gillian. "Agrarian Structure and the State in Java and Bangladesh." *The Journal of Asian Studies* 47, No.2, May 1988: 249-267.
- Husken, Frans. *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman; Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830-1980*. Jakarta: PT. Grasindo, 1998.
- Jeffrey, Craig. "Democratisation Without representation? The power and political strategies of a rural elite in north Indoa." *Political Geography*, 2000: 1013-1035.
- Kano, Hiroyoshi. *Land Tenure System and the Desa Community in Nineteen Century Java*. Tokyo: Institute of Development Economics, 1977.

- Kartodirdjo, Sartono. *Elite dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES, 1981.
- , *Sejak Indische sampai Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.
- King, Victor T. "Review Works : Protest Movement in Rural Java by Sartono Kartodirdjo." *Modern Asian Studies*, Vol (9) No.4 (Cambridge University Press), 1975: 571-575.
- Kirst-Ashman, K.K, and Hull H. *Understanding Generalist Practice*. Thomson Wardsworth Publishing, 1999.
- Lawang, Robert M.Z. *Stratifikasi Sosial di Cancar, Manggarai, Flores Barat Tahun 1950-an dan 1980-an*. Depok: FISIP UI Press, 2004.
- Lyon, Margo. "Dasar Dasar Konflik di Daerah Perdesaan Jawa (Terjemahan)." In *Dua Abad Penguasaan Tanah ed. revisi*, edited by S.M.P. Tjondronegoro and Gunawan Wiradi, 202-286. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Masaaki, Okamoto. "Local Politics in Decentralized Indonesia; The Governoor General of Banten." *IJAS Newsletter #34*, July 2004.
- Mazlish, Bruce. "Invisible Ties; From Patronage to Network." *Theory, Culture & Society*, Vol 17(2) (Sage), 2000: 1-19.
- Migdal, Joel S. *Peasant, Politics and Revolution*. New York: Princetown, 1974.
- Mustain. *Petani Vs Negara; Gerakan Sosial Petani Melawan Negara*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2007.
- Neuman, Lawrence W. *Social Research Methods; Qualitative and Quantitative Approach*, 4th ed. Boston: MA: Allyn and Bacon, 1997.
- Nurman, Ari, and Yuke Ratnawulan. *Jalan Panjang Pengembalian Otonomi Desa; Pengalaman Eksperimen Desentralisasi di Kabupaten Bandung*. Bandung: Perkumpulan Inisiatif, 2006.
- Patai, Raphael. "On Cultural Contact and Its Working in Modern Palestine." *American Anthropologist*, n.s. 49, 1947.
- Rosen, George. *Peasant Society in A Changing Economy; Comparative Development in Southeast Asia and India*. Chicago: University of Illinois Press, 1975.
- Scott, James C. *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Scott, James C. "The Erosion of Patron-Client Bonds and Social Change in Rural Southeast Asia." *The Journal of Asian Studies*, Vol.32, No.1 (Association for Asian Studies), November 1972.
- Spradley, James P. *Metode Etnografi (Terjemahan)*. Jakarta: Tiara Wacana, 2006.

Sudargan, Muhamad Daud. *Luluhur Urang Haji Naidan Jeung Luluhur-Luluhur Lianna*. Bogor: Tidak Diterbitkan, 1988.

Sutomo, Greg. *Kekalahan Manusia Petani*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1997.

Suwondo, Kutut. *Civil Society di Aras Lokal; Perkembangan Hubungan Antara Rakyat dan Negara di Perdesaan Jawa*. Salatiga: Pustaka Percik, 2003.

Tsing, Anna L. *Friction; An Ethnography of Global Connection*. New Jersey: Princetone University Press, 2005.

Wasino. *Kapitalisme Bumiputera; Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*. Yogyakarta: LKIS, 2008.

Wiradi, Gunawan. "Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria." In *Dua Abad Penguasaan Tanah, edisi revisi*, edited by S.M.P. Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, 346-393. Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Wolf, Erick R. *Peasant*. New York: Englewood Cliffs, 1966.

Yulianto, Bayu A. *Pembelajaran Otonomi Desa dari Bandung*. Depok: Yayasan Tifa & Kelompok Studi Perdesaan FISIP UI, 2008.